Pdt. Dr. Johny Christian Ruhulessin

STRUKTUR ORGANISASI DAN MISI GEREJA



PENERBIT PT KANISIUS

Struktur Organisasi dan Misi Gereja

1020003037

© 2020 - PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.co.id Website : www.kanisiusmedia.co.id

 Cetakan ke 3
 2
 1

 Tahun
 22
 21
 20

Editor : Rosa de Lima Desainer : Oktavianus

ISBN 978-979-21-6472-5

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta



Ecclesia via torum, gereja yang terus berziarah di tengah pusaran zaman yang terus berubah. Sebagai persekutuan umat beriman maupun sebagai lembaga keagamaan, gereja bukanlah entitas yang kaku dan beku. Ia terus menanggapi irama zamannya. Ibarat perahu atau bahtera yang mengarungi samudra luas maka gereja akan selalu diperhadapkan pada badai dan gelombang zaman. Secara khusus, Gereja Protestan Maluku (GPM) sebagai gereja laut pulau memiliki tantangan dan dinamika yang kompleks. Bertolak dari konteks ini struktur gereja mesti menjawab dinamika yang ada.

Organisasi dan struktur gereja mesti menolong gereja dalam bermisi. Struktur bukan merupakan benteng kekuasaan. Struktur organisasi yang "gemuk" tidak akan membantu pelaksanaan misi karena memberi kelambanan dam pembebanan, termasuk beban penganggaran. Gereja harus lebih fungsional dan produktif dalam menolong umat. Gereja harus melihat jemaat sebagai basis pelayanan. Dengan demikian, struktur dibuat untuk optimalisasi pelayanan dan bukan untuk melindungi kekuasaan. Misi dalam konteks yang dinamis. Misi dalam konteks oikumene gereja-gereja dan oikumene semesta. Misi dalam konteks masyarakat yang majemuk (multikultural). Misi dalam konteks masyarakat digital. Struktur itu mesti terus-menerus dibarui agar gereja tetap menjadi



gereja. Dalam konteks ini kita perlu melakukan *re-thinking* tentang struktur, organisasi, dan misi itu sendiri.

Buku ini awalnya merupakan karya akademik yang ditulis tahun 1984 pada Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Dalam konteks waktu tersebut tentang gereja – dalam kasus yang diulas, yakni Gereja Protestan Maluku (GPM) menggumuli konteksnya yang khas. Jika titik tolaknya adalah 6 September 1935 maka telaah ini ditulis 50 tahun setelah GPM mandiri. Ada beragam pergumulan. Dalam konteks internal 25 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1960 GPM mengeluarkan Pesan Tobat. Dalam konteks kebangsaan, GPM sebagai bagian dari NKRI maka *setting* tahun 1984 merupakan masa berkuasanya Orde Baru dengan sistem pemerintahannya yang otoriter dan sentralistik.

Konteks nasional ini secara langsung maupun tidak langsung turut memengaruhi keberadaan GPM. Arus waktu terus bergerak. Zaman berubah. Demikian pula saat ini. Gereja-gereja telah berada di era reformasi sejak 1998. Rezim Orde Baru telah tumbang. Otonomi daerah semakin tumbuh subur. Apakah itu memengaruhi gereja-gereja termasuk GPM? Ini tentu tidak ditelaah dalam buku ini, tapi merupakan isu krusial yang perlu dikaji ke depan. Demikian pula gereja-gereja sedang memasuki era digital yang ditandai dengan revolusi teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat. Wacana generasi milenial yang berkaitan erat dengan perubahan masyarakat global turut berpengaruh terhadap eksistensi gereja, termasuk kelembagaannya. GPM juga telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam konteks sosial kulturalnya maupun kelembagaannya.

Sebagai sebuah dokumen pada zamannya, buku ini dapat menjadi bacaan dan rujukan untuk memotret dinamika bergereja di tahun 1980-an. *Historia magister vitae*, sejarah adalah guru kehidupan. Dengan membaca kembali kajian dalam buku ini kita



dapat menimba pelajaran yang berharga untuk membangun teologi dan eklesiologi yang dinamis dan kontekstual. Untuk mengaktualkan kajian ini pada akhir buku ini kami sengaja menyertakan tulisan pendamping dari Pendeta Dr. Frans Serang, seorang pendeta GPM yang melakukan riset disertasi terkait organisasi GPM dalam konteks masa kini. Harapannya tulisan tersebut turut memberi pengayaan dan aktualitas terhadap fokus kajian buku ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada Penerbit PT Kanisius Yogyakarta atas kerja sama penerbitan buku ini. Terima kasih kepada Pdt. Rudy Rahabeat dan Pdt. Chepu Rusunwally yang membantu menyiapkan naskah dan koordinasi bersama penerbit. Terima kasih juga kepada para dosen yang kala itu membimbing penulisan ini, alm. Dr. Soetarno dan Prof. John Titaley. Buku ini penulis persembahkan kepada Gereja Protestan Maluku (GPM) dan dalam kenangan serta syukur bersama istri penulis, Lien Gaspersz dan anak-anak cucu penulis. Semoga bermanfaat. Ingatlah moto GPM "Aku Menanam Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan" (1 Korintus 3: 6).

Ambon, Media Februari 2020 Penulis,

Pdt. Dr. Johny Christian Ruhulessin



Pengan	tar		iii	
Daftar I	si		v	
		. 6		
Bab I	Per	ndahuluan	1	
	A.	Konteks Permasalahan	1	
	B.	Rumusan Permasalahan	9	
	C.	Tujuan Penulisan	10	
	D.	Batasan Permasalahan	10	
	E.	Metode Penulisan	15	
	3			
Bab II	Per	mahaman Sosiologis dan Teologis tentang		
	Gei	reja sebagai Organisasi Keagamaan	16	
	A.	Sosiologis	16	
	B.	Pemahaman Teologis	44	
	C.	Kesimpulan	55	
Bab III	Str	uktur Organisasi Gereja Protestan		
202 111		Maluku (GPM)		
	Α.		57 60	
	B.	Struktur Kekristenan Modern	64	
	C.	Fleksibilitas di dalam Struktur Gereja	_	
Bah IV	Mis	si GPM	86	



Bab V	GPM Selayang Pandang	104
Bab VI	Beberapa Catatan Analisis dan Evaluasi	115
Bab VII	Penutup	134
	Kesimpulan	134
Tulisan	Pendamping	
	Struktur Organisasi GPM: Dinamika dan	
	Problematika	144
Daftar F	Pustaka	164
Tentang	Pustakag Penulis	167
1	Penulis	



A. KONTEKS PERMASALAHAN

Gereja Protestan Maluku dinyatakan dalam Tata Gereja pasal 1 sebagai "Persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang dibentuk dan ditantang oleh kenyataan tindakan Allah di dalam dunia, oleh karena itu Ia kudus dan oikumenis". Menghayati akan keberadaannya sebagai gereja secara demikian serta dengan keyakinan akan Roh Kudus melalui firman Allah di dalam Alkitab, GPM melaksanakan tugas panggilannya sebagai pelayan Yesus Kristus dalam rangka "mendirikan tanda-tanda sejahtera bagi dunia dan umat manusia melalui pemberitaan dan tindakan pemasyhuran segala kebaikan dan kasih setia Allah dalam Yesus Kristus" (Tata Gereja Pasal 3).

Amanat keterpanggilan pelayanan itu didasarkan atas keyakinan percaya bahwa kasih Allah yang utama adalah dunia yang di dalamnya gereja itu hidup. Kasih Allah itu bukanlah untuk membinasakan dunia ini, tetapi untuk membarui, membebaskan, serta menyelamatkan dunia dan manusia. Allah bersikap sangat serius terhadap dunia ini. Itu berarti, seluruh perwujudan misiodei adalah perwujudan kasih Allah bagi dunia dan manusia. Dalam konteks kasih Allah itulah, GPM secara hakiki menyadari



eksistensinya dalam rangka melakukan pelayanannya searah dan bergantung pada tindakan kasih Allah itu (Tata Gereja pasal 3).

Jika kasih Allah yang utama itu adalah dunia, kasih itu untuk membarui dan menyelamatkan dunia ini, dan GPM secara eksistensial di tempatkan dalam konteks kasih Allah itu sehingga pertanyaan mendasar yang harus dikaji secara memadai, yaitu dalam konteks apa dan bagaimana GPM itu berada?

- Gereja Protestan Maluku berada dalam konteksnya yang 1. universal. Konteks yang universal ini mengasumsikan pengakuan iman GPM bahwa ia percaya pada satu gereja yang kudus dan Am. Itu berarti, percaya kepada satu gereja yang kudus dan universal. Pengakuan akan universalitas gereja berarti pengakuan bahwa persekutuan orang-orang percaya meliputi seluruh umat manusia pada segala tempat yang menembusi batas-batas kewilayahan dan ideologi tertentu. Dengan pengakuan itu maka GPM bersama gereja-gereja lain di Indonesia dan di seluruh dunia menyatakan eksistensi keterpanggilannya (CF. Tata Gereja bab 1 pasal 1). Gereja Protestan Maluku bukan saja universal, tetapi ia juga kudus. Kekudusannya itu bukan dari diri sendiri, tetapi dikuduskan dari pihak Allah sendiri. Ia dipanggil dan dikuduskan menjadi "umat Tuhan" dalam rangka karya penyelamatan Allah dalam dunia. Dalam kerangka itulah, ia percaya dan mengakui bahwa Roh Kudus tetap hadir dan memimpin gereja-Nya disepanjang sejarah dan tetap mendorong GPM untuk melaksanakan Injil kerajaan Allah di dalam dunia (Tata Gereja BAB III pasal 3).
- 2. Gereja Protestan Maluku berada dalam konteks negara-negara dunia ketiga. Konteks ini sebetulnya menyatakan adanya suatu "transformasi nilai" yang sangat kompleks dan meliputi hampir seluruh segi kehidupan manusia. Katakanlah hampir tidak ada sejengkal wilayah kehidupan manusia ini yang lepas

dan luput dari transformasi nilai itu. Konteks ini ditandai dengan apa yang disebut sebagai peradaban dunia baru, di mana ilmu dan teknologi modern menjadi alternatif satusatunya, kalau bukan yang satu-satunya. Dalam konteks inilah negara-negara dunia ketiga berusaha untuk menemukan dan mencapai modernitas, namun yang serentak dengan itu berusaha untuk menumbuhkan identitas di dalam modernitas itu. Di samping itu, konteks ini juga menyajikan akses-akses kemanusiaan yang mengancam kemanusiaan, manusia secara dahsyat, dan memprihatinkan, misalnya: kemiskinan, kelaparan, individualisme, sekularisme, konsumerisme, krisis pengharapan, kekurangan gizi, dan lain-lain.

Gereja Protestan Maluku berada dalam konteks Indonesia. 3. Konteks ini juga mengatakan bahwa Indonesia sedang berusaha menemukan dan mencapai modernitas, tetapi serentak berusaha menumbuhkan identitas di dalam modernitas. Usaha ke arah itu ditempuh dengan membangun nasionalitas sebagai sistem pendekatan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tetapi, konteks ini tidak kurang menyajikan akses-akses kemanusiaan yang sangat hebat serta mengancam kemanusiaan manusia sendiri secara dahsyat. Di samping itu, konteks Indonesia ini juga hendak menyatakan konteksnya yang khas, apa konteks yang khas itu? Sebutan yang tepat untuk konteks yang khas itu adalah "pluralitas". Bukan saja secara fisik sebagai sebuah negara kepulauan, yang kurang lebih terdiri dari 13.500 pulau kecil dan besar, tetapi juga secara etnis dan kultural. Kurang lebih 300 kelompok etnis dan lebih dari 250 bahasa. Sejumlah agama-agama besar dunia ada di Indonesia, seperti: Hindu, Budha, Islam, Kristen. Pluralitas itu juga tampak secara politik, ekonomi, dan sosial. Di samping pluralitas yang luar

biasa itu, Indonesia juga merupakan sebuah negara kesatuan politik dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila telah berjasa besar melahirkan dan mempertahankan serta melestarikan kesatuan Indonesia di dalam pluralitasnya. Ini berarti, pluralitas Indonesia telah sejak lama diterima menjadi bagian yang integral dari kesatuan Indonesia.

- Gereja Protestan Maluku berada dalam konteksnya yang 4. khas, yaitu konteks Maluku. Sebutan untuk konteks ini ialah konteks kepulauan dengan ciri yang paling menonjol, yakni ciri kedesaan. Konteks kepulauan itu, di samping menyatakan bahwa secara fisik kepulauan Maluku secara geografis dipisahkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, tetapi juga menyatakan kemajemukan baik secara kultural, sosial, politik juga adaptasi ekonomi. Ada kesamaan-kesamaan dan perbedaan, tetapi juga ada variasivariasi lainnya. Ciri kedesaan, di samping menyatakan tempat di mana di sana berlangsung gumulan-gumulan hidup yang konkret juga merupakan lingkungan hidup yang serupa dengan komponen-komponen fisik dan manusia, juga komponen nilai-nilai. Pada tempat itu pula sedang berlangsung transformasi nilai.
- 5. Gereja Protestan Maluku berada dalam konteks pengaruh badan-badan zending dan para pekabar Injil dari barat, yang mengambil bentuknya di tengah-tengah medan pengaruh yang tak terelakkan dari realisme politik, ekonomi, sosial, budaya dari sejarah zaman itu, dan yang telah turut menempah suatu corak keumatan gereja dan struktur kelembagaan gereja tertentu pula (CF tap Sinode GPM No. 1/1983, BAB I.4).

Meniti dan memahami "konteks-konteks" secara demikian dapatlah dikatakan bahwa GPM berada di dalam konteksnya yangs sangat pluralistis. Itu berarti, ia menyatakan dan melakukan eksistensinya yang fungsional di dalam konteks plural itu. Konteks yang bersifat sangat pluralistik itulah merupakan ajang pergumulan eksistensinya. Katakanlah, GPM melakukan tugas pelayanannya dan hal itu ia lakukan dalam konteksnya. Bagaimanapun juga ia tidak dapat, tidak acuh terhadap konteks itu. GPM akan fungsional bila ia tetap mengacu dan bersikap serius, tetapi selalu kreatif terhadap konteks itu.

Jika ia bersikap serius secara kreatif terhadap konteksnya itu maka serentak pula berubah sikap dan konsepsinya, bukan saja sikap dan konsepsinya, tetapi juga pola dan struktur organisasi atau kelembagaan gereja mengalami perubahan besar dan mendasar, misalnya, yang terjadi pada sinode 78 dan sinode 83 tentang pola organisasi Gereja Protestan Maluku (CF. Tap Sinode No. 1 Tahun 78 dan Tap Sinode No. 2 Tahun 83).

Kebutuhan merelevansikan pola dan struktur organisasi gereja bukan saja terjadi di GPM saja, tetapi juga merupakan suatu kecendrungan yang terjadi pada gereja-gereja Kristen. Gereja-gereja Kristen cenderung menciptakan struktur organisasi yang kadang-kadang lebih bersifat hierarkis atau dapat lebih bersifat demokratis dalam menghadapi konteks permasalahannya, seperti kata Mehl berikut.

"Gereja-gereja Kristen yang berada dalam kekuatan organisasi dan lembaga-lembaga besar atau yang berada di dalam konteks permasalahan masyarakat cenderung, menciptakan kekuatan organisasi yang lebih struktural untuk mempertahankan otoritasnya. Namun, serentak pada pihak lain, gereja atau kekristenan secara hakikatnya sebagai agama secara keharusannya menciptakan spesifikasi struktur

organisasinya yang sesuai dengan sifat dan hakikatnya dalam rangka membedakakan kolektivitas Kristen itu dari masyarakat civil". (Mehl, 1970, p. 143). Dalam hubungan itu, lebih jauh Mehl menulis sebagai berikut: 'struktur organisasi gereja dalam perkembangannya berada pada dua kutub vang kontradiktif, tetapi saling tarik-menarik. Pada satu sisi keberadaan gereja pada hakikatnya terikat secara keras pada peranan Roh Kudus dan karisma yang diberikan roh. Peranan Roh Kudus itu adalah peranan yang bebas. Itu berarti, gereja harus melonggarkan strukturnya, artinya tidak dapat diciptakan secara ketat. Namun, pada sisi lain gereja berada di dalam masyarakat dengan bentuk-bentuk dan struktur sosial, berada dengan permasalahan kemasyarakatan, gereja cenderung menciptakan konstitusi dan struktur organisasi vang kadang-kadang lebih bersifat hierarkhis atau dapat lebih bersifat demokratis." (Mehl, 1970, p.138).

Memahami pikiran Mehl di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya selalu ada ketegangan dalam rangka penciptaan struktur organisasi gereja. Ketegangan dalam artian, apakah struktur organisasi gereja itu lebih terarah pada bentuk-bentuk dan struktur sosial atau permasalahan kemasyarakatan, ataukah lebih terarah pada hakikat gereja itu sendiri. Sebab bahaya mungkin terjadi di mana struktur itu lebih cenderung pada konteks permasalahan ketimbang pada hakikat gereja itu sendiri, misalnya seperti yang ditulis oleh Niebuhr berikut ini.

"Gerakan-gerakan oikumene dewasa ini berusaha mengembangkan dan mengutamakan institusi-institusi yang besar dan luas ketimbang aspek-aspek spiritual, psikologis, intelektual, serta kehidupan moral bersama. Keanggotaan dalam gereja secara umum diperhatikan, terutama sebagai orang-orang yang terikat oleh bentuk dan tindakan institusi atau organisasi ketimbang sebagai kehidupan dan ibadah bersama" (Niebuhr, 1956, p. 21-23).

Kenyataan di atas ditemui, misalnya pada *union* baptisan dan gerakan pentakostalis di Swedia. Di mana pada suatu pihak *union* baptisan telah menjadi satu gereja yang sangat institusional sehubungan dengan konteks permasalahan yang dihadapai, sedangkan pada pihak lain pentakostalis telah menjadi lebih terisolasi dari lembaga-lembaga sosial dan konteks permasalahan yang ada, dan secara keras bereaksi serta menentang semua proses institusionalisasi yang inpersonal.

Permasalahan tentang kecenderungan keterarahan dari struktur organisasi gereja, apakah ia harus terarah pada konteks permasalahan ataukah pada hakikat gereja itu, atau mana di antara kedua kutub itu yang harus didahulukan, membawa penulis pada pertanyaan yang lebih mendasar, yakni "apakah gereja itu? Apakah ia terutama sebuah komunitas ataukah ia sebuah institusi? Apakah ia salah satu dari keduanya yang harus didahulukan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas membutuhkan pengkajian yang memadai. Sebab memahami gereja hanya sebagai institusi atau lembaga dapat merusak gereja sebagai komunitas, dan sebaliknya memahami gereja sebagai komunitas dapat bermakna, tetapi juga dapat meniadakan gereja sebagai institusi. Bagaimanapun juga keduanya harus dipahami secara mendasar.

Gereja secara hakiki bukanlah institusi, bukan juga organisasi, namun ia mempunyai dan memiliki sisi institusi, ia membutuhkan organisasi. Ia membutuhkan organisasi untuk memberi bentuk pada komunitas, keterikatan, disiplin, serta kemungkinan-kemungkinan bagi pengungkapan dan ekspresi iman bersama, seperti yang dituliskan Troeltsch berikut ini.

"Kebutuhan untuk memanifestasikan iman Kristen keluar, di dalam konteks yang aktual, membutuhkan suatu pusat organisasi yang independen. Aspek iman Kristen (individu dan kolektif) membutuhkan pusat organisasi yang independen, di mana ada aturan-aturan agar orang Kristen memperoleh kesadaran serta bentuk-bentuk pengungkapan yang vital dan yang diperlengkapi dengan suatu standar baru di mana landasan keagamaan itu tetap teguh terpelihara. Standar di mana organisasi itu dibangun adalah iman kepada Yesus Kristus atau kepada Roh Kudus." (Troeltsch, Vol. 1, p.89-90).

Mehl menuliskan kebutuhan organisasi itu sebagai berikut:

"Kebutuhan organisasi tidak berarti mematikan kebebasan, bahkan organisasi adalah sarana untuk kebebasan. Sarana itu perlu, sebab tanpa sarana itu, kebebasan akan berubah menjadi bentuk anarki dan individualis yang mematikan persekutuan". (Mehl, 1970, p. 144).

Gereja membutuhkan organisasi. Namun, organisasi sebagai realitas atau katakanlah acuan sosiologis mempunyai independensi. Independensi itu mengasumsikan adanya presuposisi teologis tertentu yang mendasar. Presuposisi itu lingkungan di mana organisasi atau struktur organisasi itu dibangun. Karena secara hakiki organisasi gereja memiliki wataknya yang khas dan watak yang khas itulah yang membedakan gereja sebagai organisasi dengan organisasi sosial lainnya. Perbedaan itu ditentukan oleh presuposisi itu.

Gereja membutuhkan organisasi, namun organisasi itu tidak akan pernah menjadi gereja. Organisasi atau struktur organisasi adalah "sarana". Sebagai sarana ia sangat dinamis dan kreatif, ia bukan sarana yang mati. Oleh karena itu, ia harus dapat melakukan fungsinya. Organisasi atau struktur itu tidak hanya diperuntukkan untuk pelayanan, tetapi pada fungsi organisasi atau struktur itu, apakah memang ia melakukan pelayanan atau tidak.



B. Rumusan Permasalahan

Bertolak dari konteks permasalahan di atas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut.

- 1. Gereja Protestan Maluku sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dibentuk dan ditantang oleh kenyataan tindakan Allah, karena itu Ia kudus dan oikumenis. GPM sebagai gereja menyatakan eksistensi keterpanggilannya dalam rangka karya penyelamatan Allah untuk mendirikan tanda-tanda sejahtera bagi dunia dan umat manusia melalui pemberitaan dan tindakan pemasyhuran, segala kebaikan dan kasih setia Allah dalam Yesus Kristus. Tugas pelayanan GPM itu melakukan pergumulannya secara konkret. Konteks sebagai ajang pergumulan pelayanannya itu bersifat sangat pluralistik.
- 2. Dalam hubungan itulah GPM membutuhkan penatan-penataan, baik penataan sikap, kasih, konsep, tetapi juga penataan kelembagaan. GPM secara hakiki merupakan "gereja" ia bukanlah organisasi atau institut, namun ia mempunyai sisi institusi. Ia membutuhkan organisasi. Organisasi sebagai realitas atau acuan sosiologis di tempatkan secara fungsional sebagai "sarana" yang memadai dalam rangka melakukan pelayanan. Sebagai organisasi yang memiliki watak keagamaan maka organisasi atau struktur organisasi itu memiliki independensi. Independensi itu mengasumsikan presuposisi teologis di mana struktur itu dibangun.
- 3. Penataan organisasi meliputi berbagai aspek, antara lain struktur organisasi. Struktur organisasi dalam perkembangannya berada dalam ketegangan. Itu artinya apakah penciptaan struktur itu hanya terarah pada konteks permasalahhan ketimbang kepada hakikat gereja itu, ataukah



sebaliknya, mana di antara kedua kutub itu yang harus di dahulukan, dalam rangka melakukan pelayanan.

C. Tujuan Penulisan

Berusaha memahami menganalisis dan mengevaluasi struktur organisasi GPM dalam rangka melakukan tugas pelayanan atau misinya. Tujuan di atas tentu mempunyai signifikansi, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penulisan ini mencoba mengembangkan pemikiran mengenai sosiologi gereja, yaitu memahami aspek-aspek sosiologis dari gereja dengan mengunakan presuposisi teologis. Itu berarti, bukanlah sociology of religion, tetapi religious sociology. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran secara khusus bagi GPM dalam rangka tugas pelayanannya. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi umpan balik ke arah tanggung jawab kita bersama.

D. Batasan Permasalahan

1. Struktur

Kompleks unsur-unsur yang terkait secara struktural dan fungsional harus bergerak dalam kesatuan sistem yang seimbang dan harmonis, serta yang tercakup di dalamnya kompleksitas aktivitas. (cf. Bouman, 1982, P. 36).

2. Organisasi

Ada beberapa definisi yang diberikan parah ahli, misalnya:

a. Benrad, melihat organisasi sebagai suatu sistem kordinasi aktivitas secara sadar atau kekuatan-kekuatan dari dua orang atau lebih. (cf. Bernad, 1938, p. 73).

- b. Selznick, melihat organisasi sebagai ekspresi struktural dari tindakan-tindakan yang rasional. (Selznick, 1961, p. 19).
- c. Blau and Sccot melihat organisasi sebagai suatu koordinasi aktivitas anggota-anggotanya. (Blau and Sccot, 1962, p. 7).

Memahami definisi-definisi di atas, ada penekanan yang menonjol pada watak atau sifat organisasi itu. Watak atau sifat itu, antara lain "kesadaran kolektif yang diorganisasikan untuk tujuan-tujuan khusus atau tujuan-tujuan tertentu sesuai apakah organisasi itu". Secara teknis, pengertian di atas mengasumsikan kedudukan dan fungsi organisasi itu, secara fungsional organisasi adalah suatu sub sistem dari masyarakat yang menjalankan suatu fungsi dari kebutuhan masyarakat, atau ia melakukan fungsinya atas nama masyarakat. Organisasi merupakan suatu sistem dalam skopa yang lebih kecil dari masyarakat sebagai kompleksitas sistem untuk tujuan-tujuan tertentu atas nama masyarakat. (cf. Parson in Martindale, 1965, p. 129-139)

3. Struktur Organisasi

Adalah salah satu variabel organisasi, yang meliputi kompleks unsur-unsur aktivitas terkait secara fungsional dan struktural yang terus-menerus bergerak di dalam satu kesatuan serta keseimbangan organisasi itu. Kompleks unsur-unsur di dalam struktur organisasi itu merupakan variabel-variabel dari struktur organisasi itu. Variabel-variabel itu meliputi:

- a. ukuran.
- b. kompleksitas atau diferensiasi,
- c. formalitas (Champion, 1975, Bab IV).



<u>Ukuran</u>

Menyatakan besarnya organisasi itu. Secara umum, biasanya dipertimbangkan berdasar jumlah personal yang terlibat atau terdaftar di dalam organisasi itu.

Kompleksitas atau diferensiasi

Menunjukkan pada pola-pola di dalam organisasi baik secara vertical maupun horisiontal, serta yang mengambarkan diferensiasi fungsi-funsi secara resmi yang dapat di lihat dalam semua tingkatan otoritas di dalam organisasi itu.

Formalitas

Meliputi serangkaian komponen, yaitu:

- Peranan menunjuk pada level-level posisi di dalam organisasi yang secara konkret di tentukan oleh job di buku.
- Relasi otoritas, yang meliputi struktur organisasi secara hierarkis dan dinyatakan secara tertulis.
- Komunikasi, menunjuk pada komunikasi secara tertulis serta saluran dalam proses komunikasi.
- Norma dan sanksi, meliputi peranan dan polis-polis yang tertulis.
- Prosedur, yang meliputi tingkat formalitas dari orientasi program atau aktivitas yang ditentukan secara jelas.

4. Gereja

Dalam konteks penulisan ini, gereja dirumuskan sebagai "kolektivitas umat Allah, yang di bentuk oleh kenyataan tindakan Allah, karena itu ia kudus dan am. Ia dilibatkan dalam karya penyalamatan Allah di mana Kristus adalah sentral, serta yang mengaku Roh Kudus sebagai yang memimpin dalam rangka melakukan aktivitas atau pelayanan, atau misinya untuk mewujudkan karya penyelamatan Allah

di bumi/dunia supaya dunia dan orang lain mencicipinya". Rumusan di atas, tentu memiliki penalaran teologis yang akan dibahas kemudian, tetapi retak dengan itu memiliki penalaran sosiologis, penalaran mana menunjuk kepada kebutuhan akan organisasi dari gereja itu. Terkait dengan hubungan itu, ada tiga unsur utama.

a. Kolektivitas

Mengasumsikan bentuk kehadiran kolektif secara nyata. Itu berarti, komunitas manusia berinteraksi satu dengan yang lain, memengaruhi dan saling memberikan pengaruh perasaan, pikiran satu terhadap yang lain, serta terkonfrontasi dengan lingkungan. Interaksi itu terjadi di dalam kolektivitas itu, juga di antara kolektivitas itu dengan lingkungan dan struktur sosial, dengan institusi lain di dalam masyarakat, serta dalam rangka memanifestasikan iman Kristen itu dalam situasi dan kondisi aktual.

b. Mempunyai aktivitas

Katakanlah itu meliputi tri panggilan gereja. Ini menyatakan fungsi dan peran gereja, fungsi dan peranan yang harus dilakukan dan diamankan itu mengasumsikan adanya pembagian posisi atau peranan. Dengaan kata lain, mengasumsikan adanya penataan struktur organisasi.

c. Tujuan atau amanat tertentu

Katakanlah tujuan itu adalah "mewujudkan karya penyelamatan Allah atau *Syalom* Allah di dunuia agar dunia dan orang lain mencicipinya".

5. Dalam Rangka Pelaksanaan

Menekan fungsi struktur organisasi. Ia tidak hanya diperuntukkan untuk pelayanan, tetapi apakah memang ia dapat melakukan pelayanan. Itu berarti, sangat dinamis dan kreatif.

6. Misi

Ada dua arah penekanan tentang misi dan apakah tujuannya. *Pertama*, arah yang menekan pada "ujian akhir" dari misi itu, yaitu apakah menghasilkan atau tidak menghasilkan murid Yesus. Boleh semua aktivitas dilakukan, tetapi semua terletak pada ujian akhir itu. Tepatnya arah yang pertama ini "menjadikan orang menjadi murid Kristus". Kedua, arah yang menekan apada tanggung jawab misioner gereja dan orang Kristen untuk membebaskan umat manusia yang menderita, miskin, tertindas, sebagai akibat dari kekuatan demonis. Boleh membaptis orang atau menjadikan orang menjadi Kristen, tetapi itu bukanlah misi. Di sini yang pokok ialah ikut melaksanakan apa yang sedang dilaksanakan Allah, yaitu: menyatakan kebenaran, keadilan, dan lain-lain. Tepatnya arah yang kedua ia menekan "perjuangan kemanusiaan", memahami kedua arah penekanan di atas, sangat menarik. Tetapi pesoalannya, mana di antara kedua arah itu yang lebih setia terhadap amanat Kristus, "menjadikan orang menjadi Kristen, tetapi tetap tertindas, ataukah melepaskan orang dari penindasan, tetapi tidak menjadi Kristen". Keduanya dengan penalaran masingmasing, dalam konteks penulisan ini misi dirumuskan seperti yang dikatakan oleh DGI yang juga dikutip oleh GPM: "Berita Kesukaan mengenai pertobatan dan pembaruan yang tersedia bagi manusia (Mrk. 1: 15), serta kebebasan,



kebenaran dan kesejahteraan yang dikehendaki Tuhan untuk dunia (Luk. 4: 18-21, Siantar, 1971, p. 93, cf Tap Sinode GPM No 1/83 Bab I).

7. Dewasa Ini

Menunjuk kepada konteks pergumulan, waktu, dan ruang yang menyatu.

E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan pada penulisan ini, yaitu metode "Studi Kasus". Dengan demikian, penulisan ini diharapkan akan setia pada prinsip-prinsip studi kasus, seperti:

- 1. pendekatan tindaklah bersifat menayeluruh;
- 2. mengandalkan pendekatan secara deskriptif;
- 3. hanya menyangkut satu organisasi;
- 4. berdasar pada prinsip-prinsip di atas maka kasus yang dipilih ialah struktur organisasi Gereja Protestan Maluku. Khusus mengenai kasus ini pendekatan yang dilakukan, yaitu secara deskriptif, meliputi:
 - a. Peraturan-peraturan Gereja Protestan Maluku yang sedang berlaku (yang diterbitkan oleh klasis Pulau Ambon).
 - b. Pola induk pelayanan Gereja Protestan Maluku tahun 1983-1993 (Tap Sinode No 1 Tahun 1983).
 - c. Himpunan ketetapan-ketetapan sinode Gereja Protestan Maluku (Sinode ke XXX Tahun 1983).
 - d. Keputusan-keputusan sinode Gereja Protestan Maluku (Sinode ke XXX Tahun 1978).
 - e. Kumpulan-kumpulan keputusan Sinode Gereja Protestan Maluku (Periode Tahun 1933-1974).



PEMAHAMAN SOSIOLOGIS DAN TEOLOGIS TENTANG GEREJA SEBAGAI ORGANISASI KEAGAMAAN

A. Sosiologis

1. Masyarakat dan Organisasi

Ada keragaman definisi mengenai apakah dan bagaimana masyarakat itu. Keragaman definisi-definisi itu tentu didasarkan pada pijakan-pijakan tertentu serta dari titik tolak mana masyarakat itu dipandang. Dua di antaranya keragaman pemahaman itu disebutkan di bawah ini.

ISIUS

- a. Spencer melihat masyarakat sebagai pikiran-pikiran yang dibentuk dari unit-unit. Unit-unit itu merupakan satu kesatuan yang dirupakan oleh ikatan-ikatan yang berlaku secara umum, serta yang diciptakan oleh kesepakatan masyarakat. Dengan perkataan lain, "society as a system" dari unit-unit. (Spencer in Marcello, 1971, p. 73).
- b. Mac Iver melihat masyarakat sebagai suatu sistem dari kebiasaan-kebaiasaan, dari prosedur-prosedur, dari otoritasotoritas, hubungan-hubungan kelompok, dan dari kontrolkontrol mengenai pola tingkah laku dan kebiasan di dalam sistem itu. Masyarakat merupakan klompleksitas sistem

yang merupakan jaringan dari hubungan-hubungan sosial yang selalu dinamis dan hubungan sosial itu ditentukan oleh kesadaran anggota masyarakat (Mac Iver, 1975, p. 5-6).

Mencoba mengkaji dan memahami kedua definisi di atas, dapatlah dikatakan bahwa ada satu penekanan yang menonjol di mana secara teknis masyarakat dilihat dan dipahami sebagai satu kesatuan komplesitas sistem yang bebeda di dalam proses keseimbangan dari unit-unit atau pranata-pranata sosial, dari aktivitas manusia yang berpola, saling berpengaruh, dan mengikat masyarakat itu. Kompleksitas sistem itu merupakan kesatuan yang seimbang, di mana setiap bagian dari pranata-pranata itu berkaitan satu dengan yang lainnya. itu berarti, satu perubahan pada satu bagian akan sangat memengaruhi bagian yang lainya. Dalam hubungan itu maka kebudayaan dalam arti aturan-aturan, nilai-nilai, larangan-larangan, perintah mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak merupakan unsur yang menyatu di dalam kompleksitas sistem sosial itu.

Kebudayaan diciptakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan kehidupannya. Itu berarti, kebudayaan itu tertanam dan teranyam, serta terjaring dalam pikiran dan perasaan manusia yang menjadi sentral bagi pola-pola hubungan social dan aktivitas perbuatan manusia. Dengan demikian, perbuatan manusia secara induvidu sebetulnya mengasumsikan manifestasi dari nilai-nilai kebudayaan anutannya. Itu berarti, keberadaan manusia secara individu merupakan satu sistem yang berpola, yang belajar mengenai kebudayaan di dalam sistem atau struktur sosial itu. Proses belajar yang terus-menerus itu melahirkan apa yang disebut sebagai sistem kepribadian. Sistem kepribadian itulah yang melahirkan peri kelakuan manusia yang berpola. Sampai di sini dapatlah dikatakan bahwa antara masyarakat, kebudayaan, sistem

kepribadian dan pola tingkah laku merupakan suatu "Ongoing equilibrium" (cf. O'Dea, 1966, Bab I).

Jika demikian, masyarakat itu merupakan kompleksitas pranata yang merupakan kesatuan sistem sosial yang seimbang. Lalu, pertanyaan yang muncul ialah, apakah kontribusi pranata-pranata sosial itu dalam rangka pemeliharaan sistem sosial? Secara metodis, pertanyaan itu perlu didekati dengan menjawab apakah pranata sosial itu. Secara sosiologis, ada keragaman pemahaman mengenai apakah pranata sosial itu dan dari titik tolak mana pranata sosial itu dipahami. Berikut pengertian pranata sosial menurut para ahli.

- a. Koentjarninggrat mengemukakan, pranata sosial itu untuk "Social Institution" dengan penekanan adanya unsurunsur yang mengatur perlakuan anggota masyarakat (Koentjarninggrat, 1965, p. 113).
- Soejono soekanto mengemukakan, istilah pranata sosial untuk "Social institution" dengan penekanan pada "bentuk" sekaligus mengandung pergantian-pergantian yang abstrak, perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari lembaga atau pranata tersebut (Soekanto, 1969 p.75)

Keragaman mengenai pengertian "pranata sosial" juga dipahami oleh Mobreg. Dalam hubungan itu, Mobreg mengadakan atau melakukan sistematisasi secara umum mengenai pranata sosial. Bagi Mobreg, ada tiga pengertian dan pemahaman umum apabila orang berbicara mengenai "social institution" (Mobreg, 1962, p. 19-20). Ketiga pengertian itu, antara lain sebagai berikut.

a. Suatu wilayah penting di dalam kehidupan suatu kelompok, seperti pemerintahan, hukum, agama, dan lain-lain.

- b. Pranata sosial dilihat sebagai kompleks sistem yang mengatur hubungan sosial, norma-norma sosial seperti perkawian, dan lain-lain.
- c. Pranata sosial dilihat sebagai suatu bentuk, suatu organisasi yang berfungsi. Misalnya sekolah, (UKSW) yang melakuakan suatu fungsi secar nyata, yaitu fungsi pendidikan.

Lebih jauh, Moberg mengatakan bahwa secara umum dalam rangka kepentingan analisis sosiologis, dua pengertian terakhir (butir terkhir 2,3) yang selalu dipergunakan. (cf. dua pengertian itu dengan pengertian-pengertian yang di kemukakan oleh koentjaraninggartdan soekanto di atas). Pengertian pranata sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Adanya stabilitas, yang berarti pranata sosial pada umunya cenderung pada stabilitas. Cenderung pada aturan-aturan atau kewajiban-kewajban. Itu berarti, pranata sosial itu mengatur perlakuan anggota masyarakat.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan manusia, misalnya saja kebutuhan pendidikan.
- c. Sifatnya universal, artinya pranata sosial itu terdapat di mana-mana, misalnya perkawinan.
- d. Ada variasi-variasi di dalam pranata sosial, misalnya dalam satu masyarakat maju, perkawian itu ada dasar hukumya, hal ini berbeda dengan masyarakat.
- e. Adanya keterhubungan antara pranata yang satu dengan pranata yang lainnya. Itu berarti, perubahan pada pranata yang satu dipengaruhi juga oleh pranata yang lain.
- f. Dalam pranata ada pembagian posisi atau penetapan tempat, artinya ada orang yang harus memimpin, ada yang dipimpin, untuk itu ada aturan-aturan dan norma-norma yang harus mengatur.

Mengkaji dan memahami ciri-ciri pranata sosial di atas, secara implisit sebetulnya telah terkandung sejauh mana kontribusi pranata-pranata sosial itu bagi masyarakat sebagai kesatuan sistem sosial, namun untuk membantu pemahaman yang lebih konkret, dikemukakan dua contoh mengenai pranata sosial sebagai berikut.

- Agama sebagai suatu pranata. Di sini yang dimaksudkan a. ialah suatu bentuk tingkah laku yang dilembagakan, yang meliputi kompleks sistem yang berisikan norma-norma. Jika kebudayaan itu diciptakan oleh manusia untuk tujuantujuan kehidupannya, sehingga ia menjadi sentral bagi pola hubungan sosial dan perbuatan manusia, dan kebudayaan itu menyatu dengan sistem sosial itu maka agama dengan transendensinya merupakan satu aspek dari fenomena kebudayaan. Tetapi, pertanyaan mendasar ialah, apakah kontribusi agama itu sebagai pranata sosial bagi manusia di dalam konteks sosial itu. Secara fungsionalistik, kontribusi agama bagi manusia didasarkan pada hakikat agama, yaitu "Transendensi"-nya. Mengapa manusia membutuhkan pengalaman yang transenden atau "Transendental of reference" sesuatu yang di luar pengalaman empiris? Menurut O. Dea, kebutuhan manusia itu diakibatkan oleh 3 sifat fundamental eksistensi mansuia sebagai berikut.
 - Contingency (ketidakpastian). Manusia hidup dalam kondisi yang tidak pasti, karena itu terjadi hal-hal di luar kontrol dan tidak terkendali.
 - 2) Powerlesness (ketidakpercayaan). Manusia dilingkupi oleh kekuatan-kekuatan besar dan manusia sadar akan kemampuannya. Manusia berada dalam konflik antara keinginan dan ketidakberdayaan.

3) Scarsity (Kelangkaa). Manusia hidup di dalam masyarakat dengan aturan-aturan, fasilitas-fasilitas. Manusia merasa dunia ini semakin langka dalam memenuhi kebutuhan manusia. Manusia merasa tidak mampu untuk mengatasi kebutuhan hidupnya sehingga mengakibatkan frustrasi, dan lain-lain (O. Dea, 1966, Bab. I).

b. Tingkah laku organisasi

Di sini yang dimaksudkan dengan tingkah laku organisasi, bukanlah sebagai akumulasi tindakan individu di dalam organisasi, tetapi ekspresi tingkah aku organisasi sangat luas. Barangkali ekspresi tingkah laku organisasi itu dapat diilustrasikan, misalnya Universitas itu sangat intoleran dengan sikap liberal dari anggota Fakultas atau Gereja itu sangat intoleran dengan sikap pemerintah yang mengabaikan hak-hak asasi manusia. Ilustrasi ini sebetulnya memperlihatkan bahwa Organisasi itu dipersonifikasikan secara ekstensif dengan manusia yang hidup, walaupun ia tidak mempunyai kualitas sebagai manusia yang hidup.

- c. Perubahan organisasi, antara lain meliputi berikut.
 - 1) Konflik organisasi, yang menyatakan ketegangan di dalam sistem organisasi, yang dapat memengaruhi efektivitas organisasi. Konflik itu dapat bersifat intra, tetapi juga interorganisasi atau dengan masyarakat.
 - 2) Fleksibilitas, menunjuk kepada perubahan-perubahan, baik secara internal, seperti hubungan antardepartemen atau unit, hierarki status juga secara eksternal, misalnya karena kompleksitas permasalanan yang dihadapi.
 - 3) Pertumbuhan organisasi. Hal ini mengarah pada perluasan jaringan aktivitas, perluasan unit, spesialisasi pekerjaan, dan lain-lain. Semua ini juga memengaruhi komponen-komponen administrasi. Teknologi menyang-



kut sejauh mana efek teknologi pada Struktur Organisasi, relasi interpersonal, dan tingkah laku individu. Selain itu, juga menyatakan kepada mekanisme atau proses di mana organisasi itu menghasilkan pelayanannya.

Di samping variabel-variabel yang telah disebutkan di atas, ada juga variabel-variabel lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami, antara lain sebagai berikut.

- 1. Iklim organisasi, yang dimaksud ialah sejauh mana iklim seseorang mengenai iklim organsasi atau bagaimana persepsi seseorang mengenal iklim organisasi. Sebab persepsi itu akan menghasilkan *image* orang itu tentang bagaimana efisiensi atau proses, atau pula bagaimana hakikat organisasi itu. *Image* ini juga dipengaruhi oleh kepemimpinan di dalam organisasi itu. Tidak semua orang mempunyai *image* yang sama mengenai iklim organisasi. Ada yang mungkin menganggap lingkungan organisasi itu otoriter, tetapi yang lain mungkin menganggap lingkungan itu demokratis.
- 2. Tujuan organisasi. Secara umum, tujuan organisasi dimengerti sebagi suatu keadaan dari organisasi secara keseluruhan yang bergerak dan ditandai dengan aktivitasaktivitas yang dikerjakan. Dalam hal ini berarti unit-unit atau departemen secara keharusan melihat tujuan dalam konteks unit itu sebagai tujuan keseluruhan organisasi itu sebab sering terjadi eksistensi unit itu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri dengan mengabaikan tujuan organisasi itu sacara keseluruhan.
- 3. Efektivitas organisasi, menentukan efektivitas organisasi sangat bergantung pada apakah model atau tipe organisas itu, misalnya model Beurokrasi oleh Weber, efektivitas dalam model ini ditentukan pada unsur-unsur, seperti: relasi sosial

yang impersonal hak istimewa yang inheren pada posisi dan bukan pada individu, suatu hierarki otoritas, peranan yang abstrak dari hukum yang melindungi tugas-tugas dan keputusan, serta spesialisasi posisi. Hal ini berbeda dengan *Scientific Management* oleh Tylor, efektivitas dalam model ini menekankan efektivitas atau efisiensi organisasi itu pada sejauh mana managemen organisasi itu.

Dalam kepentingan analisis, secara sosiologis organisasi secara normal membutuhkan pemahaman mendasar tentang variabel-variabel itu. Itu artinya, untuk kepentingan analisis orang harus dapat menentukan secara pasti apakah suatu variabel itu independen ataukah variabel itu dependent. Misalnya, efektivitas organisasi sebagai variabel dependent. Variabel ini sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang lain, seperti struktur otoritas pola komunikasi, moral manusia, dan lain-lain. Untuk menentukan suatu variabel itu independen atau dependent sangat tergantung pada tujuan daripada penelitian terhadap organisasi itu.

Di samping variabel-variabel di atas yang harus diketahui dalam rangka memahami dan menganalisis organisasi itu juga penting untuk memahami faktor-faktor lain, seperti: hubungan faktor-faktor psikologis, sejauh mana kekuatan organisasi itu memengaruhi moral individu atau manusia. Di samping itu, sejauh mana faktor-faktor yang bersifat motivasi turut menstimulasi individu untuk terlibat dan melakukan peran kerjanya. Sejauh mana kohesi dan relasi-relasi informal yang tercipta di dalam organisasi itu, bukan hanya faktor individu, tetapi juga organisasi itu sendiri. Lalu, apa karakteristik atau watak dari organisasi itu? Karena setiap organisasi memiliki kualitas dan karakteristik yang unik dan khas. Dengan pemahaman akan karakteristik organisasi

ini dalam upaya memahani bagaimana hubungan organisasi itu dengan fenomena-fenomena sosial, atau hubungannya dengan institusi-institusi lain, atau pula hubunganya dengan lingkungan sosial yang aktual dan menyatu, serta sejauh mana dampak organisasi itu bagi tingkah laku individu secara sosial.

Jika organisasi itu diciptakan secara sadar dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya yang telah ditetapkan secara pasti, berarti ia mempunyai kedudukan fungsional strategis atas nama masyarakat sebagai suatu sistem sosial, yang berarti pula mengasumsikan variabel-variabel yang mengarahkan organisasi itu melakukan dan mencapai tujuannya sehingga beralasan untuk dapat dilakukan pemahaman tentang Organisasi Keagamaan sebagai suatu pranata sosial di dalam masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Kemudian, dari pemahaman itu dapat dilakukan pemahaman mengenai gereja sebagai suatu tipe organisasi keagamaan, yang tentu memiliki perbedaan-perbedaan dengan tipe organisasi keagamaan yang lainnya.

2. Organisasi Keagamaan

Di depan telah dikatakan bahwa secara fungsional, masyarakat merupakan kompleksitas sistem sosial serta yang selalu berada dalam "ongoing equilibrium" dari pranata-pranata, aktivitas manusia yang berpola, yang saling berpengaruh dan yang mengikat masyarakat itu di dalam suatu kesatuan sistem sosial. Dalam konteks itulah maka organisasi (dengan variabelvariabelnya) sebagai pranata sosial adalah fungsional strategis atas nama masyarakat. Itu berarti, pranata agama dalam artian kompleks sistem dan norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia juga fungsional. Apabila kompleks sistem dan/atau norma-norma agama itu diwujudkan dalam relasi antarmanusia maka kompleks pranata itu disebut sebagai organisasi atau lembaga (telah memiliki bentuk) yang mempunyai spesifikasi

yang khas sesuai hakikat dan karakteristik organisasi itu sebagai organisasi keagamaan atau "Religious Organization". Organisasi itu diciptakan secara sadar dan khas di dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atas nama masyarakat. Itu berarti, ia juga fungsional strategis. Dalam hubungan itulah dapat ditemui variabel-variabel atau prosedur-prosedur yang khas untuk mengarahkan organisasi itu melakukan dan mencapai tujuan-tujuannya. Dengan demikian, dapat dirumuskan organisasi keagamaan itu sebagai berikut: "Himpunan atau kompleks sistem yang berisikan norma-norma, pranata-pranata, prosedur-prosedur yang diwujudkan dalam relasi antarmanusia sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku dengan yang dianggap supernatural (hakikat agama)".

Dimensi supernatural atau spiritual (hakikat agama) itu mengasumsikan watak atau karakteristik yang khas, sekaligus mencirikan organisasi keagamaan itu dengan organisasi yang iainnya. Dengan perkataan lain, organisasi-organisasi yang lain itu juga memiliki prosedur-prosedur untuk mengatur tingkah laku manusia atau anggta-angotanya, namun prosedur-prosedur itu tidak berhubungan dengan dimensi spiritual atau supernatural. Dimensi spiritual atau supernatural itu menunjukkan bahwa secara keharusan segala prosedur organisatoris, fungsi, dan kegiatan organisasi keagamaan itu harus senantiasa dibangun dan ditegakkan di atas presuposisi spiritual atau supernatural, atau teologis. Tanpa presuposisi maka organisasi keagamaan itu akan menjadi sama dengan organisasi iain. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa proses sistematisasi dan institusionalisasi di dalam organisasi keagamaan tidak dapat bebas menilai atau berdiri netral dari acuan teologis atau spiritual itu.

3. Bentuk Organisasi Keagamaan

Kebudayaan diciptakan, diperkenalkan, dan diintegrasikan di dalam aktivitas dari suatu masyarakat, itu berarti apabila orang ingin memahami peradaban manusia pada masyarakat itu, tidak bisa tidak, namun haruslah dilihat di dalam struktur masyarakat yang dihasilkan oleh kebudayaan masyarakat itu. Oleh karena itu, dapat dimengerti dan dipahami karakteristik masyarakat yang sebetulnya inheren dan bersama elemen-elemen struktur masyarakat itu.

Biasanya suatu atau setiap masyarakat terdiri atas kelompokkelompok, ada kelompok yang sifatnya sementara ada juga yang permanen. Ada juga kelompok yang sifatnya heterogen, ada pula yang homogen. Kelompok-kelompok itu berada di dalam strukturnya masing-masing. Ada kelompok yang disatukan oleh ikatan secara alamiah, misalnya oleh katan-ikatan kindship, tetapi ada pula kelompok yang disatukan oleh kekuatan-kekuatan indvidu atau oleh deal-deal dan tujuan-tujuan tertentu, tetapi ada juga kelompok yang disatukan atau diorganisasikan oleh motivasi keagamaan. Kelompok semacam ini kohesinya sangat kuat, barangkali oleh dorongan-dorongan pengalanan keagamaan. Dalam hubungan ini, pengembangan dari konsep-konsep keagamaan, ritus, dan institusi-institusi senantiasa bergantung pada kehendak dan ideal-ideal dari kelompok itu sendiri. Pada kelompok seperti ini refleksi keagamaan sering ka1i lebih kuat daripada refleksi hubungan-hubungan sosial.

Secara sosiologis, dalam perkembangan sejarah dapat ditemui adanya pengalaman-pengalaman keagamaan dari orang-orang yang mempunyai keistimewaan atau katakanlah "Charismatic Personalities" dengan para pengikut-pengikutnya. Mereka-mereka ini kemudian mengadakan perubahan-perubahan di dalam kelompok-kelompok yang sudah ada. Dalam perkembangan

semacam ini, dapatlah dijumpai tipe-tipe baru dari kelompok keagamaan atau kelompok sosial. Kenyataan ini memprihatinkan bahwa ternyata secara sosiologis ada perkembangan dari kelompok-kelompok secara alamiah dan kelompok-kelompok yang diciptakan secara khas di dalam masyarakat. Itu berarti, ada perbedaan-perbedaan antara kelompok-kelompok secara alamiah dan kelompok-kelompok yang diciptakan secara khas di dalam masyarakat.

Bertitiktolak dari kecenderungan perkembangan secara demikian, maka J. Wach secara umum membedakan dua bentuk kelompok keagamaan. Kedua bentuk kelompok keagamaan yang dimaksudkan itu, antara lain sebagai berikut.

- Natural Religious Organization.
- Specific Raligious Organization (Wach, 1944, Bab. IV, V).

a. Natural religious organization

Pada umumnya, terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana, di mana kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan kegiatan-kagiatan kemasyarakatan. Kohesi di antara mereka sangat kuat. Dalam rangka itu maka faktor agama atau religius merupakan faktor penting dalam tingkat kohesi. Kohesi yang kuat memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosial dan religius menciptakan suatu ikatan secara sempurna. Sikap keagamaan dari suatu kelompok secara alamiah ditentukan oleh hal-hal berikut.

- 1) adanya suatu pengalanan mengenai yang kudus,
- 2) aturan-aturan tradisi.

Semua fungsi sosial merupakan ekspresi dari loyalitas terhadap nilai-nilal. Dalam hubungan itu maka ibadah, ritus konsep-konsep agama merupakan faktor-faktor pengikat. Dalam masyarakat semacam itu, peminpin agama itu sangat penting. Tetapi, apabila belum ada pemimpin agama maka pemimpin masyarakat itu adalah pemimpin keagamaan. Prosedur-prosedur yang berlangsung di dalam masyarakat itu juga prosedur-prosedur yang berhubungan dengan supernatural atau yang kudus.

b. Specific religious organization

Kelompok ini merupakan kelompok keagamaan yang berbada secara khas di dalam suatu masyarakat tertentu. Kelompok itu berada secara khas sebagai suatu pranata keagamaan. Ia berbeda dari kelompok secara alamiah bukan hanya dalam tipe organisasi atau ritus atau keyakinan kepercayaan, tetapi juga terutama berbeda dari apa yang disebut sebagai "new spirit of unity", yaitu suatu keadaan di mana ada keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan secara alamiah. Solidaritas dan keterikatan keanggotaaan kelompok ini paling intim. Sebagai kelompok keagamaan yang berada secara khas di dalam masyarakat, kelompok ini juga merupakan bagian integral dari masyarakat. Dalam Specific Religious Organization, terdapat 3 tipe organisasi keagamaan, antara lain sebagai berikut.

1) The Secret Society merupakan suatu kelompok keagamaan yang terjadi karena persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya orang-orang yang memiliki bakatbakat atau roh-roh tertentu sehingga dasar untuk mengelompok adalah pengalaman individu. Selain itu, misalnya mereka yang dibatasi oleh umur atau seks tertentu. Kerohanian mereka berdasarkan pada persyaratan-persyaratan itu sehingga tingkah laku keagamaan mereka ditampakkan ketika mereka melakukan upacara-upacara tertentu.

- 2) The Mystery Society. Kelompok ini amat dekat dengan kelompok yang pertama, namun mereka mempunyai perbedaan-perbedaan pokok, dalam kelompok ini telah dikembangkan konsep-konsep teoretis dalam hal ritus, doktrin, teologi. Upacara-upacara lebih terperinci serta perasaan solidaritas sangat dalam. Kelompok ini biasanya ada dalam masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang kompleks. Misalnya, kelompok kultus Romawi. Kelompok ini ada yang lebih religius sifatnya, tetapi ada pula yang memasukkan soal-soal ekonomi/ politis sebagai bagian dari kegiatannya. Kadang-kadang kelompok ini merupakan pelarian dari agama-agama resmi.
- 3) The Founded Religion, yaitu agama-agama yang muncul karena tokoh-tokoh karismatik tertentu, seperti: Kristen, Islam, Budha, dan lain-lain. Dalam hubungan ini maka peranan person itu sangat kuat dan paling menentukan. Pengaruh founder dalam kelompok atau masyarakat itu sangat luar biasa. Pengalaman keagamaan yang baru dari founder itu diterjemahkan ke dalam pikiran dan perbuatan serta konsepsi-konsepsi baru dari kelompok itu. Founder itu menjadi sentral dari ide-ide persekutuan dan yang dikonkretkan di dalam struktur dan organisasi kelompok itu. Sikap keagamaan kelompok itu terpusat pada figur sentral founder. Dalam kelompok keagamaan semacam ini, hubungan-hubungan keagamaan terbagi atas beberapa tingkatan, berikut:
 - a. The circle of disciples
 Adalah orang yang mengikuti founder. Baik itu karena karier tertentu, karena umur tertentu, atau karena panggilan, atau secara spontan. Secara sosiologis

lingkaran lingkaran murid-murid yang mengikuti founder itu mempunyai temperamen yang berbeda. Mereka juga berasal dari lata belakang budaya, sosial, intelektual yang berbeda. Mereka mempunyai hubungan secara khusus dengan founder tersebut dan founder itu adalah sentral. Biasanya founder itu menceritakan semuanya kepada kelompok itu. Dalam kelompok ini, ketika founder itu masih hidup, kelompok itu tidak diorganisir secara baik sehingga bayangan ke depan pun tidak jelas. Ketika founder itu mati maka lingkaran murid-murid itu menjadi lingkaran persaudaraan.

b. The brotherhood

Ketika founder itu masih hidup, ia berada di atas kelompok itu. Namun ketika ia mati, kelompok itu menjadi lingkaran persaudaran. Tingkah laku dari kelompok ini selalu dihubungkan dengan pengalaman serta sikap pada saat masih bersama tokoh atau founder itu. Tokoh itu menjadi sentral kelompok, menjadi obyek dari ibadah kelompok itu. Dalam hubungan ini, prinsip misi yang mau dikerjakan oleh founder itu menjadi kriteria bagi orang yang hendak masuk ke dalam kelompok itu. Karena prinsipprinsip inilah maka muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai founder itu. Karenanya, orang yang masuk cenderung membuat kelompokkelompok tertentu. Dalam perkembangan kehidupan persaudaraan itu mereka mengembangkan disiplindisiplin tertentu yang terarah pada tokoh atau founder itu, dan di atas prinsip itulah kelompk itu berkembang.

Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok ini menjadi tipe organisasi yang baru, yaitu The Ecclesical Body. Badanbadan kegerejaan yang dimaksudkan, yaitu dalam artian sudah membangun ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku. Pada tahap ini kelompok-kelompok keagamaan itu mulai menyesuaikan dirinya dengan kondisi-kondisi lokal. Dalam hubungan itu, kelompok-kelompok itu mulai meminjam pranatapranata secara lokal, bentuk-bentuknya, dan menjadikannya bagian dari kelompok keagamaan itu. Karena semakin jauh kelompok itu dari *founder*, serta dalam rangka mempertahankan dan membenarkan eksistensi kelompok itu, dan untuk menyatakan kehendaknya maka dirumuskan secara sistematis, doktrin-doktrin, ketentuan mengenai iman, teologi yang sistematis, standardisasi peribadahan serta konstitusi-konstitusi yang mapan dalam rangka memberikan landasan bagi organisasi yang stabil. Sehubungan dengan itu, diferensiasi fungsi dan fungsionaris menjadi penting dan perlu.

Meniti dan mengkaji pendekatan Wach secara di atas, maka secara simplikasi dapatlah dikatakan bahwa secara sosiologis Wach memberikan suatu pendekatan secara "sosiohistoris" mengenai tipe atau bentuk organisasi keagamaan. Khususnya, mengenai badan-badan kegerejaan, dapatlah disimpulkan bahwa badan-badan itu lahir dari *Founder Religion*. Di mana pada badan-badan ini ada proses sistematisasi, proses konstitusionalisasi. Katakanlah secara eksklusif, badan-badan ini memiliki otoritas-otoritas doktrin dan aturan-aturan.

Berbeda dengan Wach dengan pendapatnya secara sosiohistoris, Troeltsch memberikan suatu klasifikasi ideal mengenai tipe organisasi keagamaan secara khusus dalam konteks kekristenan dari perspektif secara teologis. Troeltsch mendasarkan pandangannya pada apa yang disebut sebagai "Etika Injil" atau "Etika Keagamaan".

Etika Injil atau Etika Keagamaan itu merupakan sumber seluruh perkembangan di dalam kekristenan. Sejauh mana etik itu diberlakukan di dalam organisasi sosial. Dalam etika Injili itu, ia melihat adanya suatu dorongan yang kuat terhadap hubungan yang mendalam akan pentingnya persekutuan spiritual bersama, tanpa adanya tendensi bagi organisasi, atau tanpa tendensi bagi penciptaan suatu masyarakat agama. Namun, ketika iman dalam kristus itu dibangun, di mana Tuhan sebagai sentral disembah di dalam suatu komunitas keagamaan yang baru maka hal ini membutuhkan organisasi yang indepanden (Troeltsch, 1931, Vol. 2, P. 933).

Dalam hubungan itu, ia melihat adanya dua komplementasi tendensi di dalam kekristenan. Pada satu pihak ada antara egonisme yang kuat dan radikal terhadap aturan-aturan sosial dalam rangka mengaktualkan ideal-ideal kasih Kristen itu di dalam kelompok-kelompok kecil, namun pada pihak lain ada suatu kecenderungan perkembangan yang konservatif, di mana ketaklukan akan kehendak Allah telah dirangkaikan dengan suatu independen yang kuat akan kebutuhan suatu masyarakat, diorganisir, mengatur urusan-urusannya sendiri, serta tidak dapat tidak acuh terhadap institusi-institusi yang sekuler sifatnya (Troeltsch, 1931, Vol. 1, P. 82).

Ideal yang pertama, sumber dari pembaruan di dalam perencanaan sosial bagi kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat. Sementara itu, ideal yang kedua, memperkenalkan prinsip-prinsip mengenai adanya peraturan-peraturan di dalam orang-orang Kristen menggunakan peraturan-peraturan itu untuk yang universal pada tipe-tipe organisasi keagamaan yang berdunia, yang dikehendaki oleh Allah, serta yang memungkinkan

tujuan-tujuan benar. Kedua tendensi itu mendapat wujudnya yang universal pada tipe-tipe organisasi keagamaan yang berbeda (cf. Hill, 1976, p. 52-53). Dalam hubungan itulah, Troeltsch memberikan dikotomi antara dua tipe utama secara ideal mengenai organisasi keagamaan, yaitu Tipe Gereja dan Tipe sekte.

"Gereja merupakan institusi di mana Anugerah dan Penebusan Karya Penyelamatan Allah diberlakukan. Dalam terang ini, gereja mampu dan secara konservatif menyesuaikan dirinya terhadap dunia, terhadap aturan-aturan sekuler tanpa menodai kesuciannya yang subyektif dalam rangka penghargaan yang obyektif terhadap anugerah penyelamatan itu melalui pujian, firman, dan sakramen. Dengan Sikap positif terdadap dunia, gereja melihat negara secara positif, juga *the ruling class* sebagai bagian dari aturan -aturan sosial, dalam rangka melaksanakan tujuan gereja itu. Gereja memahami Kristus sebagai Penebus, yang di dalam-Nya karya Penyelamatan Allah telah terpancar untuk semua manusia. Kristus bekerja dalam gereja melalui firman dan sakramen. Gereja percaya banwa Karya Penyelamatan Allah telah terjadi dengan penderitaan, kematian dan kebangkitan, serta telah menganugerankan kuasa bagi gereja untuk memproklamasikan pengampunan Allah pada dunia (Troelstch, 199 Vol. 2.P-993, Ct. Moberg, 1962, p. 71).

"Sekte merupakan kelompok sukarela yang anggotaanggotanya terdiri dari orang-orang yang secara bebas masuk di dalamnya. Pada umumnya, mereka menjadi anggota karena kesadaran pertobatan. Meraka hidup terbatas pada kelompok-kelompok kecil dan menekan kaum yang lebih daripada anugerah, serta aturan-aturan kekristenan pada kasih. Segala yang mereka lakukan dalam rangka menyongsong kedatangan kerajaan Allah. Sekte lebih kecil dan bersikap negatif terhadap dunia dan masyarakat serta keanggotaannya lebih banyak dikaitkan dengan masyarakat kelas bawah. Kristus bagi sekte adalah Tuhan dan Pemberi hukum. Kedaulatan Tuhan menyelamatkan orang-orang berdosa melalui pertobatan. Penebusan yang nyata akan ada dalam kedatangan Kristus pada kegenapan kerajaan Allah. Bahwa seluruh proses sejarah yang luas ini, hanya persiapan untuk penggenapan kesempurnaan itu."

Di samping kedua *ideal types* di atas, Troeltsch juga memberikan katagori tipe ketiga, yaitu Mistik. Mistik dilukiskan sebagai pertumbuhan individu dengan penekanan pada kepentingan kebebasan. Keterisolasian individu menjadi yang utama. Organisasi mistik tidaklah permanen. Mistik itu bukan gereja juga bukan Sekte, "Neither Church nor Sect" (Troeltsch, 1931, Vol 1, P. 381). Kristus bagi mistik merupakan suatu prinsip spirtual batin yang dipenuhi dalam setiap gerak hati dan perasaan keagamaan. Secara Mistik Kristus adalah inkarnasi yang bersifat Tuhan di dalam Kristus, serta yang dapat disadari dalam pengalaman spiritual. Penebusan adalah suatu proses yang secara kontinu diulangi serta mencapai puncak dalam kesatuan jiwa dengan Allah. Dalam pengalaman ini Yesus hanya sebagai pemberi penyelamat atau simbol.

Meniti dan memahami pendekatan Troeltsch di atas, secara simplifikasi dapatlah dikatakan bahwa secara esensi, Troletsch memberikan tipe ideal secara konsepsional tentang Organisasi Keagamaan di dalam konteks kekristenan. Secara ideal, perbedaan secara konsepsional itu penting dalam rangka mengadakan analisis terhadap tipe-tipe itu. Dalam kaitanya dengan kebutuhan serta fungsi organisasi di antara ketiga tipe di atas, Troeltsch melihat tipe gereja lebih positif. Kepositifan itu, antara lain dapat dikatakan bahwa pada tipe gereja unsur unsur anuggerah dan penebusan Allah itu tetap dipelihara dan dilindungi. Dengan unsurunsur itu pula dapat memungkinkan dan membedakan gereja yang dibentuk karena anugerah Tuhan dan usaha manusia, serta gereja

sanggup, mampu untuk memelihara, dan mendewasakan orangorang Kristen, atau gereja dapat mempertahankan dan menjaga kemurnian kekristenan di dalam kehadiran dan penyesuaian di dalam dunia di mana kekristenan itu ada di dalamnya. Katakanlah dengan anugerah dan penebusan itu, gereja mampu menyatakan eksistensinya.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa secara esensi kehidupan spiritual agama, serta kebutuhan untuk menyatakan Iman Kristen itu dalam konteks yang aktual membutuhkan suatu Organisasi yang independen, di mana orang-orang kristen memperoleh kekuatan dan energi untuk bertumbuh dan berkembang. Dalam kaitan itulah maka fungsi organisasi pada tipe gereja lebih positif dibanding Sekte dan Mistik. Berbeda dengan Troeltsch, Weber melihat perbedaan antara Gereja dan Sekte pada kualifikasi anggota. Keanggotaan sekte didasarkan pada suatu kualifikasi moral. Hanya pada mereka yang memiliki kualifikasi religiuslah diterima di dalam keanggotaan sukarela itu. Hal ini berbeda dengan gereja, yang keanggotaannya secara prinsip didasarkan atas kelahiran ketimbang kualitas moral anggota (Weber dalam Hill, 1976, p. 47-50).

Jika Troeltsch secara konsepsional melihat oposisi dialektis antara Gereja dan Sekte, dan Weber melihat perbedaan itu pada kualifikasi keanggotaan maka Richard Niebuhr melihat adanya pekembangan Sekte menjadi Gereja karena perubahan sosial atau faktor lingkungan sosial. Niebuhr menulis bahwa watak sosiologis dari paham sektarian, yaitu apa yang disebut sebagai "almost always" yang dimodifikasikan di dalam perjalanan waktu oleh proses kelahiran dan kematian. Dalam proses itu, ia melihat perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada wilayah doktrin dan etik sektarian. Dalam hubungan ini ternayata ada proses transformasi sektarian sebagai tipe yang terbuka. Ia mengatakan

bahwa organisasi sektarian hanya valid untuk satu generasi. Itu artinya, anak yang lahir dan masuk sekte secara sukarela, sebelum ia dewasa ia membutuhkan pendidikan.

Dalam kerangka itu sekte mengambil wadah suatu institusi yang berfungsi mendidik dengan tujuan membawa generasi baru itu pada ideal-ideal yang telah menjada tradisi. Karena perubahan sosial atau 1 ingkungan sosal sekte semakin sulit untuk mempertahankan keterasingan masyarakatnya dari dunia luar. Itu berarti, harus terjadi kompromi secara etik, yang berarti sekte mulai menjadi suatu konsepsi yang borsifat ke gerejaan. Hal ini menghasilkan spesialisasi pelayanan, di mana ada kepemimpinan. Bertitik tolak dari pikiran itu ia berkesimpulan bahwa sekte menjadi gereja" (Niebuhr dalam Hill, 1976, p. 58).

Pendekatan Niebuhr di atas, sebenarnya bertitik tolak pada pijakan pikirannya bahwa premis-premis secara teologis mempunyai akar-akarnya di dalam kehidupan kegamaan untuk kondisi-kondisi kultural, politik, dalam suatu kelompok orang Kristen. Dalam kaitan itulah maka formulasi teologis itu perlu untuk mengerti bagaimana suatu dasar dari premis-premis teologis itu diintograsikan di dalam suatu organisasi keagamaan melalui interaksi dengan perubahan-perubahan sosial di mana organisasi itu membangun dirinya.

Seperti Niebuhr, Backer melihat adanya pengaruh-pengaruh lingkungan sosial. Dalam hubungan itu, Backer mensistematisasi dan mengklasifikasikan secara sosiologis tipe-tipe organisasi keagamaan ke dalam empat subtipe berikut.

a. Ecclesia. Pranata yang bersifat konservatif. Positif terhadap dunia dan masyarakat. Keanggotaan berdasarkan kelahiran ketimbang kesadaran-kesadaran. Karena itu, gereja adalah suatu institusi bagi pendidikan serta menjadi tempat bagi kebebasaan anugerah. Ajaran, tata tertib, sistem doktrin bersifat terbuka terhadap dunia dan masyarakat dalam rangka memproklamasikan etikanya bagi dunia. Misalnya, Roma Katolik, Lutheran, dan lain-lain.

- b. Sekte berbeda dengan gereja. Ia relatif kecil, ia berusaha memenangkan dunia dengan doktrin-doktrinnya. Sekte menekankan pengalanan keagamaan. Keanggotaannya sukarela dan berwatak eksklusif. Kualifikasi keagamaan harus dapat ditunjukkan sebelum menjadi anggota, misalnya Anabaptis, Menonait, dan lain-lain.
- c. Denominasi merupakan sekte-sekte yang dinaikkan tingkatnya dalam perkembangan, serta adanya penyesuaian satu terhadap yang lain juga terhadap dunia dan masyarakat. Dengan satu kata, Backer menyimpulkan perubahan dari sekte pada denominasi sebagai *age inevitably brings* compromise. Misalnya, sekte mothadist dan baptist yang telah menjalin hubungan dengan dunia sekuler.
- d. Kultus. Tipe organisasi ini merupakan hasil akhir dari kecenderungan yang bersifat individualistik di dalam sekte. Tujuannya karena pengalaman individu yang murni, penyelamatan, penghiburan, dan penyembuhan. Kultus sebetulnya hanya merupakan perkumpulan yang abstrak dan hanya merupakan sumber dari kepuasan emosional dengan penekanan pada kermunian personal (Backer dalam Moberg, 1962, P78-80).

Memahami pendekatan Backer di atas, secara esensi dapat dikatakan bahwa Backer sebetulnya bertitik tolak dari apa yang ia sebut sebagai "Dilema Gereja". Pada satu pihak ada konstelasi nilai yang berasal dari sumber keagamaan dan pada pihak lain ada konstelasi nilai yang berasal dari 1 ingkungan sosial. Perangkat nilai-nilai ini merupakan pertentangan satu dengan yang lainnya

dan yang sering secara langsung saling menekan antara nilainilai yang satu dengah nilai-nilai yang lainnya. Dalam hubungan itu maka gereja perlu merangkaikan atau menjalin suatu bentuk sehingga tidak akan mengabaikan salah satu dari nilai-nilai itu, yaitu: "the water of the religious and the oil of the social" (Backer dalam Hill, 1975, p. 60).

Ketegangan di antara perangkat nilai-nilai yang berbeda itu tidak dapat diselesaikan. Itu artinya, tidak ada satu tipe organisasi yang dapat secara lengkap menetralisir pertentangan atau ketegangan nilai-nilai itu. Bagi Backer, pertumbuhan organisasi keagamaan dikarenakan oleh ketegangan nilai-nilai itu: pada suatu saat kolektif keagamaan akan terlibat di dalam suatu proses kompromi dengan nilai-nilai sosial dalam rangka mengatur dan mengorganisir tendensi-tendensinya yang sentrifugal. Di sinilah muncul ketegangan-ketegangan sejauh mana memberlakukan nilai-nilai keagamaan itu melalui organisasi sosial.

Berbeda dengan Backer, Yinger melakukan pengkajian tentang unsur-unsur etis dari gereja dan sekte. Yinger berpendapat sebagai berikut.

Sekte berkembang di luar aspek-aspek tertentu dari ajaranajaran gereja. Tetapi, apabila sekte telah menjadi *survive* dalam gerakan pertumbuhannya maka ia akan bertumbuh dan berkembang di dalam suatu gereja. Yinger pada dasarnya menekankan hubungan antara sekte dan gereja (Yinger, 1964, p. 19).

Kecenderungan paradoksal ini dari apa yang Yinger sebut sebagai "Dilema Gereja", yaitu adanya konflik antara ideal-ideal keagamaan dengan *interest-interest* sekuler. Ideal-ideal suatu agama sering kali membutuhkan kekuasaan dan kekuasaan itu diorganisir di dalam organisasi. Dalam hubungan ini, kenyataan yang sering terjadi bahwa kekuasaan itu akan dapat mengurangi

tujuan keagamaan secara orisinil melalui adaptasi terhadap metode-metode sekuler sehingga seolah-olah fungsi keagamaan itu menjadi senjata atau kekuatan dalam *interest-interest* sekuler dalam rangka kekuasaan. Dalam hubungan itu, Yinger secara etis melihat bahwa gereja itu sedang kompromi dengan atau terhadap aturan-aturan sekuler untuk mempertahankan posisinya, sementara sekte menolak dan melawan kolompok-kelompok serta aturan-aturan sekuler dan menarik diri dari partisipasi yang normal di dalam struktur sosial untuk mempertahankan ideal-idealnya dalam suatu masyarakat yang kecil.

Gereja memiliki kekuasaan yang lebih formal dari sekte serta gereja cenderung pada rulling class dan mempertahankan idealidealnya di dalam masyarakat. Dalam kaitan itu Yinger mengatakan bahwa kebanyakan pengaruh gereja bukanlah pengaruh secara religius, tetapi hanya pengaruh kekuasaan sekuler dalam pakaian keagamaan. Gereja membantu memperkecil kesulitan di dalam struktur sosial, tetapi gereja juga membantu melindung dan memelihara struktur sosial. Hal ini membuat gereja kehilangan kesempatan untuk memengaruhi perubahan-perubahan sosial dengan nilai-nilai dan ideal-ideal keagamaan itu, sementara sekte kehilangan pengaruhnya dengan mengisolir diri dari prinsip-prinsip suatu organisasi dan memelihara ideal-idealnya di dalam suatu masyarakat kecil yang akrab dengan pengaruh yang sangat terbatas. Bertitik tolak dari pendekatan etis di atas, Yinger mengklasifikasikan suatu barisan tipe ideal dari sekte yang secara teoretis menarik diri dari dunia, kemudian menuju kepada Sekte yang lebih mapan dan akhirnya menjadi gereja yang menerima dunia secara utuh. Bagi Yinger itu adalah "midpoint". Kkecenderungan gereja dan sekte merupakan kecenderungan hipotesis dalam perimbangan untuk mengontrol tingkah laku individu secara teoretis.

Charles dan Beegle, secara sosial melihat perbedaan antara gereja dan sekte dalam banyak pandangan dasar. Perbedaanperbedaan itu, antara lain sebagai berikut. Dalam sekte pemimpin keagamaan harus mempertahankan keakraban personal. Ia kurang profesional dibanding dengan Pendeta dalam gereja yang memiliki standar profesional secara mapan. Tanggung jawab protensional merupakan ciri dari pelayanan gereja. Pekerjaan pemimpin gereja memiliki suatu kelengkapan dogma untuk membimbing tingkah lakunya dan ia cenderung menjadi pemimpin secara legal rasional. Sementara itu, sekte kepemimpinannya adalah karismatik yang mungkin diperoleh karena anugerah daripada norma-norma secara formal. Status dan peranan petugas serta keanggotaan dalam sekte terbatas daripada gereja. Kualitas personal keanggotaan dalam sekte lebih penting daripada posisi formal dalam struktur organisasi seperti gereja. Kekuasaan dalam gereja lebih formal dan dilembagakan secara mapan dalam bentuk otoritas dan status peran yang pasti (Lomis and BeegLe, 1957, p.222-224).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian dan pemahanan mengenai organisasi keagamaan di atas, maka secara simplifikasi telah ditarik beberapa pemikiran dasar, khususnya tentang gereja sebagai tipe organisasi keagamaan.

a. Sumbangan pemikiran mengenai tipologi organisasi keagamaan dalam konteks Kekristenan secara demikian tentu tidak lepas dari kecenderungan para ahli dengan titik pandang. Tidak dapat disangkali akan adanya pengaruh nilai-nilai social, budaya, ekonomi, serta perkembangan politik tertentu di mana tipologi itu dibangun dan dikembangkan. Tepatnya di dalam konteks dan nuansa masyarakat-masyarakat Amerika

dan Eropa, di mana pada satu sisi Gereja-gereja telah menjadi sangat mapan, sementara sekte-sekte pada sisi lain muncul secara radikal dan bereaksi terhadap kemapanan itu.

- b. Secara ideal, setiap tipologi secara hakiki dibangun dan diarahkan dalam tujuan-tujuan yang berbeda. Ada tipologi yang tendensinya pada perspektif secara sosio historis, ada tendensi tipologi yang menekankan suatu perspektif gereja secara teologis, ada pula tipologi yang menekankan pada norma-norma dan perubahan-perubahan sosial serta polapola tindakan institusi dari pengaruh lingkungan sosial dan yang lain lagi memberikan penekanan pada aspek etis, dan bentuk-bentuk kontrol sosial mengenai organisasi, pola-pola otoritas, kekuasaan, serta orientasi tujuan-tujuan. Secara ideal setiap tipe berbeda jenis, berbeda pengaruh pada anggota, berbeda pengaruh tujuan-tujuannya secara praktis, berbeda fungsi organisasi, juga berbeda relasinya terhadap dunia dan masyarakat.
- c. Gereja dengan demikian memiliki watak/karakterteristik serta ideal-idealnya yang tentu berbeda, baik jenis pengaruh tujuan-tujuannya secara praktis, berbeda fungsi organisasi, juga berbeda relasinya terhadap dunia dengan tipe organisasi yang lain. Pernyataan bahwa tipe gereja itu berbeda dengan tipe organisasi yang lain, misal sekte, dapat diungkapkan sebagai berikut.
 - Secara organisasi atau dari fungsi organisasi, tipe gereja memiliki tingkat formalisasi yang lebih tinggi dari tipe sekte. Gereja memiliki kekuasaan yang lebih normal. Adanya proses institusionalisasi dan proses sistematisasi. Gereja memiliki otoritas doktrin dan aturanaturan secara formal. Kekuasaan di dalam gereja yang

lebih formal itu dilembagakan secara mapan dalam bentuk otoritas.

- 2) Pemimpin keagamaan di dalam gereja memililki standar profesional. Tanggung jawab profesional merupakan ciri dari pelayanan gereja. Pemimpin gereja memiliki suatu kelengkapan dogma untuk memimpin dan membimbing tingkah lakunya.
- 3) Gereja lebih bersifat positif terhadap dunia dan masyarakat. Dalam hubungan itu, ajaran-ajaran, sistem doktrin lebih bersifat terbuka untuk tujuan-tujuannya dalam rangka memproklamasikan dan mentransformasikan etik dan idealnya bagi dunia dan masyarakat di mana gereja itu ada dan hidup.
- 4) Keanggotaan di dalam gereja tidak berdasar pada kualitas moral, tetapi lebih pada kelahiran.
- 5) Gereja merupakan institusi di mana tindakan anugerah dan penebusan Allah itu diberlakukan. Unsur-unsur anugerah dan penebusan Allah itu dipelihara, serta dengan unsur-unsur ini gereja sanggup dan mampu memelihara dan menjaga kedewasaan orang Kristen, serta mampu mempertahankan kemurnian kekristenan di dalam penyesuaian terhadap dan di dalam dunia. Tegasnya dengan unsur-unsur itu, gereja sanggup mempertahankan, melestarikan, dan menyatakan eksistensinya.

Ciri-ciri atau watak gereja sebagai organisasi keagamaan di atas berbeda dengan tipe sakte, yaitu sebagai berikut.

a. Sekte relatif kecil dan merupakan kelompok sukarela. Keanggotaannya berdasar pada kesadaran pertobatan, di mana kualifikasi keanggotaan sangat penting secara moral. Sekte bersikap negatif terhadap dunia. Menekan hukum 1ebih daripada anugerah.

- b. Pemimpin keagamaan di dalam sekte harus mempertahankan keakraban personal serta ia kurang profesional. Kepemimpinan di dalam sekte adalah karismatik daripada berdasar pada norma-norma secara formal. Kekuasaan di dalam sekte tidaklah formal serta tidak dilembagakan secara mapan dalam bentuk otoritas. Katakanlah organisasi sekte tidaklah parmenen seperti gereja.
- c. Dengan memahami ciri-ciri atau unsur-unsur demikian, dapatlah ditegaskan bahwa tipe gereja sebagai organisasi keagamaan mempunyai banyak perbedaan dalam banyak hal dengan tipe organisasi keagamaan yang lain.
- d. Tetapi, memahami gereja secara demikian dari pendekan sosiologis saja rasanya belum selesai. Lalu, apakah gereja itu secara hakiki adalah usaha yang sangat serius? Untuk itu, dibutuhkan pemahaman secara teologis. Hal ini penting dalam rangka memahami apakah gereja itu sebagai organisasi yang memiliki watak dan ciri seperti di atas.

B. PEMAHAMAN TEOLOGIS

Dengan pemahaman teologis, apakah visi Alkitabiah mengenal gereja itu? Dalam hubungan itu diperlukan titik-tolak. Untuk itu, titik tolak yang dipakai ialah karya penyelamatan Allah. Kristus adalah fakta Karya Penyelamatan Allah di dalam Sejarah. Dengan perkataan lain, Karya Penyelamatan Allah itu mencapai puncak realisasinya di dalam dan melalui Kristus sebagai sentral. Fakta Kristus itu adalah Fakta Kasih Allah yang utama untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia yang di dalamnya gereja dan manusia itu hidup. Kasih itu bukanlah untuk membinasakan dunia dan manusia, tetapi untuk membarui dan membebaskan

dunia ini. Allah menjadi manusia dan masuk di dalam sejarah manusia. Itu berarti, Allah bersikap sangat serius untuk dunia ini, Allah mengasihi dunia ini. Seluruh perwujudan Kasih Allah atau *Misio Dei* adalah Kasih Allah bagi dunia ini.

Dalam konteks Karya Penyelamatan itulah, dipahami fungsi dan kedudukan Gereja. Kalau demikian, pertanyaan mendasar yang harus dijawab ialah, apa artinya bila gereja itu berada di dalam Karya Penyelamatan Allah itu, atau katakanlah berada di dalam *God 's master plan* itu? Sadar atau tidak, sering kecenderungan Gereja memahami dirinya sebagai benteng perlindungan. Sebagai benteng, ia membentengi dan melindungi orang percaya dari dunia di luar gereja. Membentengi dan melindungi orang percaya dari dunia yang dianggap jahat dan menakutkan. Jika ini benar, misi gereja juga dipahami sebagai usaha mempertebal tembok yang membentengi dan melinndungi itu.

Wiliean Fraizer memberikan suatu gambaran kontras antara ganbaran gereja sebagai benteng dan gambaran gereja sebagai tanda. Ia menulis sebagai berikut.

"Tidak seperti sebuah benteng, sebuah tanda itu dimasudkan bagi orang-orang di luar dirinya. Ia tidak menutup jalan, tetapi membuka lalan, ia tidak mengisi ke dalam tetapi mengomunikasikan keluar. Sebuah tanda memberikan kesan kesederhanaan, sebuah benteng memberi kesan kemegahan. Sebuah tanda bersifat melayani, sebuah benteng memisahkan satu dari yang lain. Sebuah tanda mengundang kooperasi, sebuah benteng mengundang kompetisi." (Fraizer Dalam Anderson, 1974, No 1, P. 27).

Singkatnya, sebuah tanda menyatakan keterbukaan gereja terhadap Allah, tetapi juga keterbukaannya terhadap dunia. Apakah gereja itu? Apakah ia sebagai benteng ataukah ia sebuah tanda di dalam Karya Penyelamatan Allah? Jika fungsi dan

kedudukan gereja berada di dalam Karya Penyelamatan Allah, itu berarti gereja adalah "alat". Alat di dalam God's master plan. Ia dapat dikatakan sebagai gereja kalau ia menyatakan dan melakukan fungsinya atau tugas dan panggilannya. Katakanlah ia dapat disebut sebagai gereja, sejauh ia merelakan dirinya dipakai di dalam Karya Penyelamatan Allah bagi dunia dan manusia. Dunia yang telah dikasih Allah, yang telah dikalahkan di dalam kasih-Nya serta yang menjadi tempat bibit Karya Penyelamatan Allah itu. (Mt. 1338). Sebagai alat di dalam Karya Penyelamatan Allah di dalam dan melalui Kristus, gereja berada di bawah Kristus. Paulus berbicara mengenai fakta gereja secara genetif - fakta Gereja dari Allah, dan Gereja berada di dalam proses Karya Penyelamatan Allah di dalam Kristus. Gereja dikuduskan menjadi unat Allah di dalam Kristus. Dalam rangka itu, Kristus berada di atas Gereja. Gereja bergantung kepada kristus, apa yang ada pada persekutuan Kristus dengan gereja diciptakan dan dipertahankan oleh Kristus (cf. Eps,5: 25-32).

Sementara itu, Niebuhr menulis sebagai berikut.

"Gereja pertama-tama dilihat sebagai kutub subyektif dari pemerintahan Allah yang obyektif. Gereja adalah subyek yang harus mengerti obyeknya. Sebagai subyek *counterpart* dalam karya Penyelamatan Allah maka ia merupakan Kesatuan. Obyek dan subyek saling berkaitan. Gereja sebagai subyek tidak akan menjadi nyata tanpa obyek itu. Keunikannya justru terletak pada relasinya yang istimewa kepada obyek itu. Gereja dihubungkan kepada Allah melalui Kristus, itu berarti Kristus adalah sentral bagi Gereja. (Niebuhr 1956, p. 19-20).

Jika demikian, secara hakiki apa yang dibuat oleh Kristus secara keharusan juga di buat oleh Gereja. Hal ini mengasumsikan bahwa Misi Eklesia secara keharusan berada dalam kerangka *Misio Dei*. Misi Eklesia bergantung pada misi Allah, bukan Allah bergantung pada gereja. Allah yang pertama bekerja. Tugas gereja ialah menyatakan kepada dunia misteri Karya Penyelamatan Allan itu. Itu berarti gereja mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada bukan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada.

Misteri itu tidak lain dari tindakan Penyelamatan Allah di dalam Kristus yang nyata di dalam sejarah. Misteri itu tidak hanya terbatas pada orang Yahudi dan Yunani (Eps 3: 4-6, 8-11) yang dipersatukan dengan kuasa Allah menjadi satu tubuh, tetapi justru Misteri itu universal yang terarah kepada dunia. Inilah fungsi dan kedudukan Gereja itu. Dalam kaitan itulah, hemat saya, gambaran Gereja sebagai "Tanda" seperti yang ditulis oleh Fraizer itu sangat penting untuk dipertimbangkan. Tetapi, memahami semua itu belum selesai persoalannya. Karena persoalan serius yang harus dijawab ialah bagaimanakah gereja dimengerti atau apakan gereja itu?

Alkitab memberikan gambaran yang banyak mengenai gereja, seperti: Kawanan Domba Allah (1 Ptr. 5: 2), Keluarga Allah (1 Tim. 3: 15), Gereja adalah Pengantin Wanita dari Kristus (Why. 21: 9), Gereja adalah Tubuh Kristus 1 Kor. 12: 12-31). Gambarangambaran ini secara mendasar sebetulnya menekankan suatu esensi, suatu kehidupan, suatu relasi kasih antara Kristus dengan Gereja. Gambaran ini penting untuk memahami bagaimana gereja itu berada di dalam Karya Penyelamatan Allah itu. Gereja itu Tubuh Kristus, diri dari Yesus Kristus. Itu berarti, gereja adalah bagian yang tidak dapat berdiri sendiri dari Yesus Kristus. Itu berarti, eklesiologi tidak dapat dipisahkan dari soteriologi. Snyder, memberikan tiga pengertian gereja dari perspektif Alkitabiah, yakni sebagai berikut.

- Alkitab melihat Gereja dalam perepektif sejarah.
- Alkitab nelihat Gereja dalam pengertian karismatik.
- Alkitab melihat Gereja sebagai komunitas umat Allah (Snyder,1977, Bab II, Pasal 4).

1. Alkitab Melihat Gereja dari Perspektif Sejarah

Allah oleh dan di dalam Kristus telah bertindak di dalam sejarah. Dalam kerangka itu memilih Gereja sebagai umat Allah untuk penyelamatan Allah bagi dunia, untuk mendamaikan dunia dengan Allah. (Eps. 1: 20-23). Dengan demikian, misi gereja berarti memproklamasikan kabar baik dari Allah di dalam dunia, di mana karya Penyelamatan Allah itu dimulai (Mat. 5: 16). Gereja hadir di dalam sejarah untuk memproklamasikan kabar kesukaan bagi orang-orang miskin, memberitakan kebebasan, membebaskan orang-orang tertindas (cf. Luk. 4: 18-19).

2. Alkitab Melihat Gereja dalam Pengertian Karismatik Lebih daripada Pengertian Institusional

Gereja secara fundamental adalah suatu komunitas yang bersifat karismatik. Gereja ada dan dibentuk oleh anugerah (charis) dan Gereja dibangun oleh Gifts of Grace atau karisma yang dianugerahkan oleh Roh. Khrismatik yang dimaksudkan di sini ialah Karya dan Kuasa anugerah dari Allah. Dalam artian, Gereja bukanlah struktur seperti katakanlah UKSW, tetapi Struktur dalam pengertian "the body", yang berarti pada basis kehidupan. Secara mendasar gereja adalah suatu komunitas bukan suatu hierarki. Gereja adalah suatu organisme bukan suatu organisasi (cf. 1 Kor. 12, Rm. 12: 5-8, Eps. 4:1-16, Mat. 18: 20, 1 Pet, 4: 10-11).

3. Alkitab Melihat Gereja sebagai Komunitas Umat Allah

Dalam artian ini, gereja dilihat sebagai kedua-duanya. Gereja sebagai umat Allah, berarti ia meliputi seluruh umat manusia.

Inilah universalitas atau katolisitas gereja itu, yang mengatasi dan melewati batas-batas kewilayahan, ideologi tertentu. Tetapi, umat Allah tidak hanya universal, umat Allah juga mempunyai bentuk yang nyata, mempunyai ekspresi-ekspresi secara kultural, mempunyai ekspresi secara lokal. Inilah gereja merupakan "Community of the holy".

Sanyel menulis sebagai berikut.

"Allah memanggil manusia menjadi umat-Nya, menjadi bagian dari komunitas. Kemanusiaan yang baru yang Kristus Ciptakan menjadi nyata di dalam komunitas serta kenyataan, kemanusiaan yang baru itu harus memiliki suatu kualitas kehidupan yang merefleksikan teladan Kristus". (Samuel dalam Snyder, 1977, p. 57).

Gereja menemukan identitasnya dalam kesatuan irama yang bersifat lengkap dari wujud sebagai suatu umat dan sebagai suatu komunitas. Kedua wujud ini menjadi nyata di dalam suatu tempat atau lokal tertentu atau suatu kebudayaan, atau konteks dunia yang luas. Snyder menulis sebagai berikut: "Peopie and community together constitute what the New Testament means by Ecclesia and called together Church of God. Snyder" (Snyder, 1977, p. 57).

Memahami Gereja sebagai Komunitas Umat Allah, ada dua elemen yang terkandung di dalamnya. Elenen-elemen itu, antara lain sebagai berikut.

- a. Gereja sebagai suatu umat, suatu kemanusiaan yang baru.
- b. Gereja sebagai suatu komunitas atau suatu persekutuan atau pula sebagai suatu koinonia *of the holy* (cf. Kung, 1964, p. 10, 11).

Pada elemen yang pertama, tekanannya bahwa gereja bukan hanya koleksi dari individu-individu yang terisoler, tetapi gereja memiliki hakikat komunal untuk menyatakan wujudnya yang benar. Kebenaran umat atau komunitas itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah melalui Kristus. Realitas anugerah di dalam Kristus itulah merupakan "pintu" bagi kebenaran komunitas. Dalam hubungan ini maka figur Tubuh mendapat penekanan dan figur Tubuh itulah yang menekankan fakta umat serta fakta komunitas.

Umat adalah konsep Perjanjian Lama yang mengasumsikan fakta obyektaf dari tindakan Allah melalui sejarah dalam rangka memanggil dan mempersiapkan suatu bangsa yang kudus, atau suatu umat milik Allah (1 Ptr. 2: 9, Ex.19: 5-6). Semenatra itu, perkataan Yunani untuk umat atau people itu adalah "Laos" atau "Laity" (ing). Itu berarti, people mengasumsikan "the whole church" yang merupakan suatu umat. Gereja sebagai umat Allan itu universal. Itulah katolisitas gereja.

Elemen yang kedua, berhubungan dengan pengalaman pantekosta di dalam perjanjian baru. Jika konsep people dalam perjanjian lama menunjuk kepada tindakan penyelamatan Allah yang berarti umat yang panggil untuk perjanjian baru, maka hal ini secara teologis menunjuk kepada tindakan Allah yang Ia lakukan di dalam dan melalui Kristus dalam baptisan pada pantekosta. Kenyataan ini menekankan dimensi secara "lokal" dari gereja. Dimensi atau aspek lokal ini mengasumsikan interaksi kehidupan bersama. Sebagai komunitas atau persekutuan maka ia menekankan kehidupan secara lokal, kehidupan secara temporal dalam suatu konteks kultural dengan nilai-nilai dan norma-norna. Itu berarti, kehidupan bersama itu berada di dalam interaksi sosial. sharing bersama, dan dalam hubungan itu ada aturan-aturan ada prosedur-prosedur. Semua aturan dan prosedur itu secara keharusan merefleksikan atau memanifestasikan suatu fakta komunitas yang benar secara hakiki dalam rangka kesaksiannya yang efektif.

Dengan demikian, persoalan serius yang dihadapi, yakni apa yang oleh Snyder sebut sebagai "wineskins" yang dibedakan dari "wine". Wineskines ini mengarah pada adanya kebutuhan-kebutuhan aturan, prosedur-prosedur secara praktis, teta tertibteta tertib untuk memungkinkan dan memberi kekuatan serta vitalitas dan kesegaran kepada komunitas itu menjadi komunitas yang benar serta dalam rangka menyatakan imannya itu di dalam masyarakat di mana adonan Injil itu diteburkan. Dalam hubungan itu menurut hemat penulis, komunitas harus menjadi bagian yang tidak terkunci, serta aturan-aturan, dan prosedur-prosedur itu haruslah fungsional. Sebab bila tidak demikian, komunitas itu akan menjadi "benteng" dan adonan itu akan menjadi tidak efektif dan menjadi seperti garam yang kehilangan asinnya. Dalam kaitan itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Troeltsch tentang organisasi.

"Bahwa kebutuhan dalam rangka memanifestasikan iman itu keluar di dalam konteks yang aktual, membutuhkan suatu pusat organisasi yang independen. Bahwa aspekaspek iman Kristen (individu dan kolektif) membutuhkan pusat organisasi yang independent, di mana ada aturanaturan, prosedur-prosedur agar orang kristen memperoleh kesegaran serta bentuk-bentuk pengungkapan yang vital, yang diperlengkapi dengan surat standar yang baru di mana landasan keagamaan itu tetap terpelihara. Standar di mana organisasi itu dibangun ialah iman kepada Kristus atau kepada Roh Kristus" Troeltsch, 1931,Vol. 1, p. 9-90).

Berdasar pada pengkajian di atas, secara asasi harus dikatakan bahwa gereja adalah komunitas umat Allah. Ia bukan organisasi atau institusi. Dengan demikian, gereja adalah suatu realitas spiritual dan realitas. Spiritual inilah yang membedakan komunitas gereja itu dengan komunitas yang lainnya. Institusi atau organisasi kegerejaan, prosedur- prosedur, aturan-aturan,

diciptakan oleh manusia sebagai "sarana" yang kreatif untuk melayani gereja dalam kehidupan dan misinya. Sebagai yang demikian, organisasi itu merupakan ikatan-ikatan secara sosio-kultural yang dapat dimenngerti dan evaluasi secara sosiologis, dan ia bukanlan gereja serta tidak akan pernah menjadi gereja secara hakiki. Tetapi, apakah gereja itu suatu organisasi atau institusi?

Sebagai komunitas umat Allah, gereja bukanlah organisasi yang sama seperti organisasi-organisasi sekuler lain. Karena secara asasi gereja sebagai organisasi keagamaan itu memiliki watak dan kualitas yang sangat berbeda dengan organisasi lain. Organisasi gereja itu secara kualitas memiliki suatu landasan spiritual atau katakanlah memiliki premis atau presuposisi teologis yang secara kaharusan *inherent* pada organisasi itu. Presuposisi itulah mengasumsikan "Independensi organisasi" itu.

Walaupun secara hakiki, gereja bukanlah organisasi atau institusi, namun ia mempunyai sisi institusional secara sosiologis. Suatu pola tingkah laku kolektivitas yang telah menjadi kebiasaan suatu institusi, misalnya perjamuan kudus atau suatu kelompok PA yang bertemu secara kontinu dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang pasti untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Dengan demikian, secara sosiologis, institusionalisasi bagaimana pun juga tidak dapat dielakkan. Gereja membutuhkan organisasi. Kebutuhan ini memperlihatkan bahwa komunitas umat Allah itu hidup di dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai dan konteks kehidupan secara sosial yang aktual. Dalam kaitan itulah, organisasi secara keharusan adalah fungsional dalam usaha menciptakan, mempertahankan, dan melestarikan kestabilan, baik di dalam komunitas maupun di luar komunitas. Moberg menulis sebagai berikut.

"Setiap organisasi keagamaan mempunyai tingkat formalisasi atau institusionalisasi. Hal ini terdapat pada kelompok-kelompok keagamaan yang mengklaim sebagai suatu persekutuan, sangat informal, dan tidak terikat formal secara organisasi. Kunci bagi organsasi adalah kebersamaan. Untuk mengerti suatu agama yang tidak dinstitusionalisasikan atau diorganisasikan, bagi manusia modern secara sosiologis adalah hal yang tidak dapat diterima, serta yang menjadi ancaman bagi rasionalisasi dan stabilitas etik mereka. Agama tidak dapat menyebar tanpa pengembangan bentuk-bentuk itu, cenderung bagi perubahan-perubahan. Dan inilah esensi dari institusionalisasi itu" (Moberg, 1962, p. 6).

Dalam Perjanjian baru misalnya, secara khusus dalam gereja-gereja awal dapat dicatat adanya pertemuan-pertemuan rumah, pola-pola kepemimpinan, perayaan perjamuan kudus, dan lain-lain. Semua ini mau mengatakan bahwa sebenarnya ada peraturan-peraturan, prosedur-prosedur yang merupakan elemenelemen dari organisasi itu. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa gereja tidak dapat mengelakkan manifestasi pola-pola institusi. Tetapi ini tidak berarti gereja akan menjadi institusi atau organisasi. Memahami gereja hanya sebagai organisasi akan membuat gereja itu haus kekuasaan, *introvert*, dan terperangkap dalam orientasi eksklusivisme dan aktivisme yang menonjol daripada dimensi-dimensi kebersamaan, spiritual, psikologis. Gereja membutuhkan organisasi, namun organisasi hanya sebagai "sarana" yang kreatif dinamis. Oleh karena itu, organisasi itu harus memadai dalam kehidupan dan misi gereja.

Bertitik tolak pada pengkajian-pengkajian di depan, maka secara simplifikasi dapatlah dikatakan bahwa memahami dan mengatakan gereja itu sebagai organisasi menunjuk kepada komunitas gereja (agama) yang diatur atau dilembagakan. Itu berarti, ada proses institusionalisasi, proses sistematisasi,

ada aturan-aturan, dan prosedur-prosedur secara formal yang mengatur tingkah laku individu dan kolektif. Sebagai kolektif berarti ada interaksi antara individu, juga interaksi dengan lingkungan sosial, interaksi dengan dunia di mana gereja itu berada. Interaksi dengan dunia itu, pada satu pihak dalam rangka memanifestasikan iman itu dalam dunia, juga pada pihak lain serentak memperlihatkan keterikatan gereja itu dengan ruang dan waktu tertentu. Keterikatan dengan ruang itu menunjuk kepada adanya suatu orientasi di dalam sistem kultural tertentu. Di samping itu, adanya peranan individu. Hal ini mengasumsikan bahwa gereja merupakan kesadaran individu yang secara keharusan memainkan peranan di dalamnya. Kenyataan ini menyatakan dua hal, yaitu menunjuk kepada adanya aktivitas gereja yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga memperlihatkan adanya pembagian dan penetapan posisi serta kedudukan. Katakanlah, ada pengaturan-pengaturan struktur secara formal. Semua ini mengarah pada adanya veriabelveriabel yang dibutuhkan oleh organisasi itu sendiri.

Gereja sebagai organisasi seperti di atas, secara sadar diciptakan secara khas berada di dalam masyarakat untuk tujuan-tujuan sesuai hakikat organisasi itu sebagai gereja, maka organisasi itu merupakan suatu sistem dalam skopa yang lebih kecil (sub sistem) dari masyarakat sebagai kompleksitas sistem yang selalu bergerak dalam keseimbangan sistem yang harmonis. Sebagai yang demikian, suatu pranata sosial memiliki makna yang fungsional strategik. Itu artinya, ia melakukan fungsinya di dalam masyarakat sesuai watak dan karakteristik atau hakikat organisasi itu. Ia punya kontribusi secara sosial di dalam masyarakat, baik fungsinya maupun kegiatan-kegiatannya.

Dari fungsinya secara sosial, barangkali dapat disebutkan seperti, sejauh mana sebagai suatu pranata sosial gereja dapat

memengaruhi pranata-pranata sosial yang lain di dalam masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Sejauh mana gereja dapat menjadi agen sosialisasi nilai-nilai dari manusia secara individu di dalam masyarakat, misalnya melalui sekolah minggu, dan lainlain. Atau katakanlah sejauh mana gereja dapat menjadi pencipta stabilitas sosial, menjadi agen kontrol sosial, dan menunjang tercapainya solidaritas sosial.

Dari fungsi kegiatannya barangkali dapat disebutkan, seperti sejauh mana kegiatan-kegiatan itu manusia atau anggota gereja dapat menemukan hakikat dan kehendak Allah, atau pula sejauh mana kagiatan itu memberi kepada anggota gereja persekutuan dengan Allah, atau sejauh mana kegiatan-kegiatan itu menolong anggota gereja mengembangkan kepribadiannya serta mengembangkan kualitas hidupnya yang kreatif di dalam dunia. Namun, satu hal yang sangat penting, baik fungsinya secara sosial atau kegiatan-kegiatannya itu tidak dapat berdiri netral atau tidak dapat bebas nilai dari apakah hakikat gereja itu secara hakiki sebagai suatu realitas spiritual. Dimensi spiritual atau transendental, atau teologis yang secara keharusan harus diberlakukan dan dioperasionalkan. Dimensi itulah yang harus menjadi kerangka dasar atau presuposisi bagi organisasi itu. Sebab tanpa dimensi itu, gereja sebagai suatu organisasi akan menjadi sama dengan organisasi-organisasi lainnya, yang berarti ia kehilangan independensinya yang khas.

Dengan demikian, semua aturan, prosedur, atau proses sistematisasi dan institusionalisasi, atau semua variabel organisasi seperti struktur dalam rangka mengarahkan organisasi itu agar mencapai tujuannya harus dibangun dan ditegakkan secara kokoh di atas presuposisi spiritual atau teologis. Dalam hubungan ini maka persoalan serius yang harus dihadapi dan diselesaikan ialah



apakah presuposisi itu? Bagaimana presuposisi itu? Tentang hal ini akan dipahami kemudian.

C. KESIMPULAN

- Usaha memahami dan mengatakan gereja itu sebagai suatu organisasi yang memiliki watak dan cirinya khas tidak dapat dilakukan tanpa berusaha untuk menanamkan gereja itu secara teologis. Dengan pemahaman teologis itu dimaksudkan untuk menemukan visi Alkitabiah tentang gereja secara hakiki.
- 2. Gereja secara hakiki bukanlah institusi atau oganisasi. Namun, ia mempunyai sisi institusional, tidak dapat mengelakkan manifestasi pola-pola institusi. Gereja membutuhkan organisasi, tetapi secara hakiki organisasi tidak akan pernah menjadi gereja. Organisasi adalah suatu rea1itas atau katakanlah acuan sosiologis-kultural yang dapat dianalisis dan dievaluasi secara sosiologis. Dengan demikian, organisasi hanya "sarana" yang kreeatif dan dinamis, yang diciptakan secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan serta membantu gereja dalam kehidupan dan misi gereja. Oleh karena itu, organisasi gereja itu membutuhkan variabel-variabel, seperti struktur organisasi dalam rangka mengarahkan organisasi itu mencapai tujuannya.
- 3. Sebagai suatu organisasi yang memiliki watak atau cirinya yang khas dan unik, baik fungsi atau kegiatan, serta aturan dan prosedur-prosedur atau struktur organisasi secara keharusan harus dibangun di atas presuposisi spiritual atau teologis. Presuposisi ini yang membedakan gereja itu sebagai suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Tanpa presuposisi ini, gereja sebagai organissasi itu akan menjadi sama dengan

- organisasi-organisasi yang lainnya. Itu berarti gereja sebagai organisasi kehilangan independensinya.
- 4. Sebagai suatu organisasi yang mengasumsikan adanya serangkaian variabel yang mengarahkan organisasi itu mencapai tujuannya, secara keseluruhan organisasi itu merupakan suatu sistem yang selalu bergerak di dalam keseimbangan sistem organisasi, ada interaksi antara variabel dengan variabel yang lainnya. Dalam hubungan itu, perubahan pada variabel yang satu akan sangat memengaruhi variabel yang lainnya, itu berarti akan memengaruhi organisasi itu secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang utuh.
- 5. Memahami dan mengatakan gereja sebagai organisasi menunjuk kepada komunitas gereja (agama) yang diatur dan dilembagakan. Ada proses institusionalisasi dan proses sistematisasi. Ada interaksi di dalam kolektivitas antarindividu dan interaksi dengan lingkungan yang aktual. Ada peranan individu yang menunjuk kepada adanya pengaturan struktur, serta adanya aktivitas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.



STRUKTUR ORGANISASI GEREJA PROTESTAN MALUKU (GPM)

Dalam rangka memberikan kerangka acuan untuk mengerti dan memahami struktur organisasi GPM, barangkali penting secara simplifikasi dilakukan pemahaman mengenai bagaimana Gereja Protestan Maluku mengerti dan memahami gereja. Di dalam Tata Gereja Bab I, Pasal 1, dikatakan sebagai berikut.

"Gereja Protestan Maluku sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang dibentuk dan ditantang oleh kenyataan tindakan Allah di dalam dunia, karena itu Ia Kudus dan oikumenis".

Meniti dan mengkaji rumusan di atas, dapatlah dilakukan beberapa penalaran berikut.

1. Gereja Protestan Maluku hidup dan berkarya karena tindakan Allah. GPM dibentuk oleh Allah sendiri. GPM adalah fakta yang subyektif dari fakta yang obyektif, yaitu Allah sendiri. Fakta Allah sebagai yang obyektif menimbulkan adanya fakta Gereja (GPM). Dalam hubungan itulah, Gereja (GPM) bergantung kepada Allah, bukanlah Allah bergantung kepada Gereja (GPM).

- 2. Gereja Protestan Maluku itu Kudus. Kekudusannya bukan karena anggota-anggotanya kudus, tetapi karena pembenaran dan pengudusan dari pihak Allah sendiri. Kekudusan itu juga terletak dalam keterpilihannya sebagai umat Allah. Sebagai umat yang dipilih dan dikuduskan, GPM (Gereja) bukan saja diselamatkan, tetapi ia juga dilibatkan di dalam Karya Penyelamatan Allah. Katakanlah ia ditugaskan untuk bertanggung jawab. Ditugaskan dan bertanggung jawab untuk meneruskan Karya Penyelamatan Allah di dunia dan masyarakat.
- 3. Gereja Protestan Maluku itu oikumenis. Ini adalah pengakuan Iman GPM bahwa persekutuan orang percaya itu menembusi batas-batas kewilayahan dan ideologi tertentu. Itu berarti, pengakuan akan universalitas atau katolisitas Gereja. Dalam hubungan itulah, GPM bersama gereja-gereja lain di Indonesia dan di seluruh dunia menyatakan tugas pelayanan dalam dunia, serta yang menampakkan keesaan tubuh Kristus.

Akan tetapi, GPM tidak hanya universal, tidak hanya merupakan fakta umat yang universal, namun ia juga merupakan persekutuan orang-orang percaya atau "Community of the holy". GPM merupakan bentuk persekutuan orang percaya yang nyata, yang dikuduskan menjadi orang-orang kudus. Persekutuan atau komunitas GPM itulah mengasumsikan GPM itu secara lokal. Itu berarti, persekutuan dalam interaksi kehidupan bersama, kehidupan secara temporal dalam suatu konteks kultural tertentu.

Dalam hubungan ini, GPM dengan demikian menemukan identitasnya yang lengkap dan utuh di dalam suatu irama sebagai suatu umat dan sebagai suatu persekutuan atau komunitas di dalam suatu tempat, suatu konteks kultural, dan/atau dalam konteks dunia yang luas. Sebagai komunitas, di mana ada interaksi

kehidupan bersama, kehidupan secara temporal dalam suatu konteks kultural tertentu, GPM tidak dapat mengelakkan polapola institusi. Itu berarti, GPM membutuhkan organisasi untuk mengatur dan mengarahkan komunitas itu serta untuk melayani kehidupan dan misi gereja itu.

Dengan bertitik pada acuan di atas, dapat dilakukan pemahaman mengenai struktur organisasi GPM sebagai salah satu variabel organisasi untuk mengarahkan organisasi itu melakukan dan mencapai tujuannya. Tetapi, secara metodis sangatlah tepat bila sebelum memahami struktur GPM itu perlu dilakukan pembahasan umum tentang struktur organisasi gereja itu secara umum. Sebagai organisasi yang memiliki watak dan karakteristik yang khas, struktur organisasi gereja secara keharusan mesti memperlihatkan harmonisasi dengan pengertian- pengertian Alkitabiah. Sebab itulah presuposisinya yang mengasumsi independensi organisasi. Hal ini tidak berarti bahwa tanpa landasan-landasan Alkitabiah, gereja itu tidak akan berkembang. Gereja-gereja yang hidup dalam struktur-struktur sosial yang kompleks juga mengalami perkembangan-perkembangan yang pesat dan maju. Namun, menurut hemat penulis gereja yang mengembangkan strukturnya tanpa suatu landasan yang sesuai dengan hakikat atau kualitas spiritual gereja atau tanpa memperlihatkan harmonisasi dengan visi-visi Alkitabiah maka gereja itu tidak akan pernah mencapai kualitas pertumbuhan dan perkembangannya secara autentisitas dari keistimewaan relasinya yang unik dengan kehendak Allah atau dengan kuasa dan kekuatan Roh Allah.

Perkembangan struktur organisasi gereja selalu berada pada dua kutub yang kontradiktif, tetapi saling tarik-menarik antara kutub yang satu dengan kutub lainnya. Pada kutub sisi yang satu, keberadaan gereja secara hakiki terikat keras pada peranan Roh Kudus dan Karisma yang diberikan olen Roh itu. Peranan Roh itu adalah peranan yang sangat bebas dan penuh kreatif. Dalam hubungan itulah maka gereja tidak dapat menciptakan atau membangun organisasi atau struktur organisasinya secara ketat dan terkunci. Itu berarti, secara keharusan gereja harus melonggarkan strukturnya. Namun, pada kutub sisi yang lain, gereja itu berada dan hidup bersamaan dengan bentuk-bentuk struktur sosial, berada bersamaan dengan konteks persoalan yang sangat majemuk. Dalam kondisi dan situasi ini, gereja cenderung menciptakan struktur organisasinya yang kadang-kadang lebih bersifat sangat hierarkis atau kadang-kadang lebih bersifat demokratis (cf. Mehl, 1970, p. 138).

Dalam hubungan itu maka bahaya yang dapat saja muncul, yaitu struktur gereja itu akan lebih terarah pada struktur sosial dan konteks permasalahan yang mengitari gereja katimbang terarah pada hakikat gereja itu sendiri yang mesti mewataki dan menciri kekhasan atau independensi struktur. Apabila kecenderungan itu benar-benar terjadi, organisasi gereja itu tidak beda dengan organisasi lainnya. Kalau demikian, pertanyaan seriusnya, apakah jenis struktur yang baik, yang melayani gereja dalam kehidupan dan pelayanannya? Dalam kaitan itulah, secara metodis perlu melakukan pendekatan historis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai kecenderungan-kecenderungan yang ada pada gereja-gereja dalam konteks waktu dan ruang tertentu.

A. Gereja-gereja Awal

Komunitas awal memperlihatkan keragaman di dalam organisasi mereka. Namun satu hal, yaitu karakteristik yang khas, mereka merupakan masyarakat secara lokal. Seluruh realitas gereja dimanifestasikan di dalam masyarakat lokal. Itu sebabnya,

mengapa Paulus berbicara mengenai gereja di Korintus sebagai bentuk kehadiran kolektivitas secara nyata pada waktu dan ruang tertentu. Dalam hubungan itu, Mehl mencatat adanya perbedaan-perbedaan antara gereja-gereja tipe Paulus dan tipe Yerusalem.

Tipe Paulus, tidak ada gereja ibu. Tiap jemaat lokal memiliki hak yang sama, wewenang yang sama dalam pemberlakuan pemberitaan-pemberitaan. Mereka dibedakan satu dari yang lain hanya mungkin karena tingkat kesetiaan pada ajaran-ajaran Rasul, tingkat kesatuan, atau juga tingkat strategi dari masing-masing jemaat. Organisasi internal dari tipe Paulus sangat fleksibel. Otoritas tidak berdasar pada pengalaman sejarah, tetapi pada karisma dan ukuran untuk ini hanyalah orang yang dipanggil oleh Roh, itulah yang punya otoritas. Dengan perkataan lain, hanya panggilan dari Roh Tuhanlah yang mengkualifikasikan seseorang untuk melaksanakan otoritas, misalnya Paulus sendiri. Komunitas adalah suatu manifestasi dari anugerah, yang berarti kehidupan komunitas itu dilandasi oleh anugerah, juga otoritas Rasul itu didasarkan pada anugerah itu.

Di samping Rasul, Nabi, Guru yang memiliki karisma yang diberi oleh Roh, muncul juga para tua-tua, diaken. Mereka ini ada yang diangkat oleh komunitas, tetapi juga ada yang dianggap memiliki karisma. Struktur organisasi tidak dibangun dengan anggapan atau dalam arti secara konstitusional, tetapi lebih berhubungan dengan kebutuhan spiritual dalam hubungan dengan ketaatan terhadap Roh. Menurut hemat penulis, walaupun kelihatan ada struktur sederhana secara demikian, tetapi ini tidak berarti ada kecenderungan struktural. Karena komunitas awal itu sangat memperhatikan dan menekankan Roh Kudus, bukan kebutuhan yuridis formal. Pada dasarnya komunitas awal melihat dan memahami dirinya sebagai suatu komunitas karismatik atau

sebagai suatu organisme bukan organisasi. Komunitas yang taat terhadap Roh.

Berbeda dengan tipe Paulus, tipe Yerusalem terasa adanya suatu organisasi yang ideal. Ada jemaat induk di Yerusalem serta ada jemaat (kelompok-kelompok) yang tersebar, tetapi berhubungan dengan Yerusalem. Dalam pemahaman orang-orang Kriten awal, Yerusalem itu dilihat sebagai pusat semua orang kudus sampai degan Parusia atau kedatangan manusia. Apabila Yerusalem baru itu turun dari surga, ia akan menjadi tempat tinggal orang orang yang tertindas dan juga bagi orang-orang yang berada di luar komunitas itu (cf. Listzmann dalam Mehl, 1970, P.140). Kelompok-kelompok atau jemaat-jemaat itu tersebar di Yudea, Samaria, dan lain-lain. Di mana ada kelompok itu maka di situ ada perwakilan dari jemaat induk yang bertugas mengatur tingkah laku keagamaan saudara-saudaranya.

Namun hal yang perlu diperhatikan ialah, bila ada perwakilan di setiap jemaat itu bukan dalam arti hierarkis, tetapi dalam arti menanti Parusia. Itu artinya, menjaga para pengikut itu hingga Parusia itu datang. Organisasi internal dari tipe Yerusalem diatur oleh 12 murid. Kedua belas murid itulah yang memegang peranan. Mereka dipilih oleh Yesus dan mereka mempunyai pengalaman langsung dengan tokoh Yesus.

Berbeda dengan Mehl yang mencoba memberikan perbedaan antara tipe Paulus dan tipe Yerusalem, Snyder mencoba melakukan sistematisasi secara umum gambaran struktur gereja awal. Dalam hubungan itu ada bebarapa unsur yang dikemukaka oleh Snyder, unsur-unsur itu, antara lain sebagai berikut.

1. Ibadah. Komunitas awal tidak mengabaikan doa dan ibadah bersama (Kis. 2: 46; 5: 42). Mereka memuji Allah dan mereka disenangi oleh semua orang (Kis: 47).

- 2. Komunitas. Mereka merupakan suatu persekutuan, suatu koinonia. Mereka mempersembahkan diri untuk persekutuan (Kis. 2: 42). Mereka bertemu sebagai kelompok di dalam rumah-rumah (Ks. 2: 46; 5: 42) serta saling melayani satu terhadap yang lain. Ada solidaritas di antara mereka (Kis. 3: 34-35).
- 3. Kepemimpinan. Gereja mula-mula sangat setia kepada ajaran para Rasul (Kis. 4: 32-35), walaupun kemudian ada juga kepemimpinan yang dipilih. Otoritas Rasul itu didasarkan atas anugerah/karisma.
- Kesaksian. Komunitas awal memiliki semangat kesaksian melalui proklamasi Rasul-rasul (Kis. 4: 33, 5: 42), serta teladan/melalui teladan dan kesaksian orang percaya (Kis. 8: 1-4). Kuasa Injil dan kuasa kasih diproklamasikan dan didemonstrasikan di dalam komunitas (Kis. 2: 47) baik secara verbal, juga melalui koinonia (Snyder,1977, p. 143-144).

Dengan beberapa pendekatan di atas, dapat dibuat beberapa pertimbangan mengenai struktur gereja-gereja awal sebagai berikut.

- 1. Pada dasarnya, gereja awal melihat komunitasnya sebagai komunitas secara karismatik. Sebagai suatu organisme bukan sebagai suatu organisasi. Mereka sangat memperhatikan dan menekankan Roh Kudus. Tidak ada kecenderungan struktural. Tidak ada eksposisi mengenai struktur. Katakanlah gereja awal tidak bermaksud mengembangkan suatu struktur pemerintahan gereja yang baku.
- 2. Walaupun demikian, tampaknya ada indikator yang dapat dipertimbangkan mengenai struktur itu, antara lain:
 - a. Ada kepemimpinan, entah itu karena karisma atau karena dipilih.



- b. Ada pola-pola pertemuan bersama.
- c. Ada keputusan-keputusan yang dibuat.
- d. Ada aktivitas.

Kenyataan-kenyataan itu menyatakan bahwa gereja sangat mudah, masih mengonsolidasikan dirinya. Tampaknya telah mengembangkan bentuk-bentuk secara fungsional dalam kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan konkret.

3. Ada perbedaan-perbedaan di dalam struktur, dalam keadaan, dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itu adalah hal-hal yang biasanya terjadi.

B. Struktur Kekristenan Modern

Berbeda dengan kekristenan awal yang minoritas serta sedang berada pada tahap konsolidasi diri dan kehidupannya, pengertian dan ketaatan terhadap Roh Kudus, kekristenan modern berada di dalam struktur-struktur sosial yang kompleks, berada di dalam organisasi-organisasi yang mapan telah membuat kekristenan itu menjadi suatu kekuatan yang cukup ampuh dan besar dalam rangka mempertahankan otoritas, serta mempertanankan relasinya dengan otoritas-otoritas yang lain. Kecenderungan serta kenyataan secara demikian itu telah memperlihatkan secara jelas adanya organisasi yang lebih struktural. Kecenderungan untuk menciptakan organisasi yang lebih struktural itu pada satu pihak dalam rangka kekristenan itu membentengi imannya, menciptakan disiplin-disiplin yang mapan, namun serentak dengan itu kecenderungan itu juga dalam rangka mengimbangi institusi-institusi besar yang lain, di mana kekristenan itu ada dan hidup. Misalnya, yang terjadi pada gereja Katolik, yang memelihara kekuasaan formal secara kuat serta hierarki organisasi yang lebih luas dan mapan.

Kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat modern mengakibatkan gereja-gereja diperhadapkan dengan dua masalah, yaitu sebagai berikut.

- 1. Gereja berada di dalam ketegangan untuk menjadi sangat institusional. Sebab memang institusional adalah kecenderungan masyarakat modern.
- 2. Adanya persekutuan-persekutuan pribadi yang ingin kebebasan.

Suatu organisasi di dalam masyarakat (katakanlah gereja) apabilah sudah sangat mapan, maka dengan sendirinya, tujuantujuan organsasi itu akan menjadi sangat steril, sehangga yang pa1ing utama aalah bagaimana memelihara dan mempertahankan ketentuan-ketentuan organisasi itu. Dalam usaha memelihara dan mempertahankan ketentuan-ketentuan itu, maka sering atau pun juga selalu mancul usaha-usaha pembaruan. Muncul usaha-usaha individu atau kelompok-kelompok untuk menentang setiap struktur yang menekan dan membatasi kebebasan gerak. Misalnya, gerakan-gerakan keagamaan dari gereja yang secara tegas menyatakan protes bagi *getho* institusi. Kelompok-kelompok itu biasanya lahir di dalam institusi, namun bila institusi itu sudah sangat mapan dan kuat, mereka keluar dari institusi itu dan menentangnya. Mereka merekonstruksi diri di dalam institusi baru dan mengklaimnya sebagai yang benar.

Dalam proses institusionalisasi yang sangat mapan itu mengakibatkan organisasi gereja menghadapi persoalan yang serius antara masalah koinonia dan organisasi itu sendiri. Itu artinya, dapat saja terjadi struktur organisasi gereja itu tidak dapat mencapai tujuan-tujuan koinonia. Sebab apabila gereja terlalu mementingkan dan mendahulukan segi-segi struktural (mengutamakan peraturan-peraturan formal) maka orang akan

hidup di bawah ketaatan terhadap peraturan-peraturan secara struktural itu. Menjadikan peraturan-peraturan itu hukum, itulah legalisme. Itulah yang diresahkan oleh Niebuhr.

"Bahwa gerakan-gerekan oikumene dewasa ini berusaha untuk mendahulukan institusi-institusi yang besar dan luas serta mapan, ketimbang aspek-aspek spiritual, psikologis, intelektual, serta kehidupan moral bersama. Keanggotaan di dalam gereja secara umum terutama diperhatikan sebagai orang-orang yang terikat dalam bentuk-bentuk dan tindakan-tindakan institusi, ketimbang sebagai kehidupan dan ibadah bersama" (Niebuhr 1965, p. 21-23).

Menurut hemat penulis, secara keharusan organisasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa koinonia. Organisasi adalah sarana yang kreatif dan dinamis di mana anugerah itu dapat diberlakukan. Organisasi itu harus dapat menyalurkan anugerah itu. Dalam kenyataan, kebanyakan struktur-struktur yang diciptakan sering diklaim sebagai struktur yang melayani dan menyalurkan anugerah, namun dalam kenyataannya menjadi handicap untuk tujuan-tujuan gereja. Memahami struktur organisasi dalam konteks Protestan dan Roma Katolik memperlihatkan adanya perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok.

Dalam Roma Katolik, memperlihatkan adanya suatu hierarkis yang mempunyai kekuatan efektif. Suatu struktur yang lebih yuridis, di mana ada sentralisasi yang sangat kuat. Gereja Katolik merupakan komunitas orang percaya yang diorganisasikan di bawah otoritas Paus. Otoritas gereja tidak seperti perkumpulan-perkunpulan agama yang lain. Otoritas gereja lebih menekankan basis supernatural. (Fliche dalam Macmilan, 1957, p. 246). Prinsip fundamental dari konstitusi gereja Katolik adalah suatu monarki yang dipimpin oleh Paus, dan monarki ini absolut serta otoritas ini semata-mata diperoleh dari Kristus.

Dalam konteks Protestan, struktur ke-gerejaan tidak dapat dikatakan memiliki suatu karakteristik yang definitif. Itu artinya, tidak ada suatu pola organisasi yang secara umum berlaku kepada semua gereja Protestan (Niebuhr dalam Macnilan, 1957, p. 267). Protestan kurang memusatkan atau kurang menekankan pada lembaga-lembaga kegerejaan yang mapan. Dalam artian, selalu ada penyesuaian-penyesuaian struktur dengan konteks struktur sosial masyarakat modern di mana kekristenan itu ada.

Struktur dalam gereja protestan memperlihatkan adanya kepelbagaian yang menyolok. Kepelbagaian ini, antara lain diakibatkan oleh perbedaan hakikat gereja yang diletakkan oleh reformator pada tempat-tempat yang berbeda. Misalnya, pada tempat-tempat di mana penetrasi reformasi secara perlahan, seperti di Inggris atau di mana ide-ide baru telah ditanamkan seperti di Scandinafia, struktur gereja berubah sangat sedikit. Hanya pemberitaan-pemberitaan dan ajaranajaran memperlihatkan perubahan-perubahan secara drastis. Namun, ini tidak berarti bahwa reformasi tidak memiliki prinsip kegerejaan sendiri, tetapi tampaknya dalam kenyataan telah penyesuaian-penyesuaian struktur dengan terjadi struktur sosial serta konteks permasalahan yang konkret. Misalnya, saja pengaruh sosial politk sangat memengaruhi struktur kegerejaan di dalam Protestan. Struktur Presbiterial Sinodal misalnya, contoh di mana pengaruh sosial politik negara Barat sangat kuat menekankan demokrasi. Gereja dalam konteks yang demikian itu berusaha menampakkan aspek demokrasi di dalam kehidupan gereja, yang dimanifestasikan di dalam struktur organisasi gereja. Menurut hemat penulis, Sinodal dalam artian persidangan sinode, sebetulnya adalah refleksi dari diperkenalkannya lembagalembaga parlemen dalam pemerintahan civil. Bukankah, sinodesinode kita lebih bersifat sangat legislatif, membuat keputusan-keputusan, dan lain-lain.

Dalam konteks gereja Protestan, secara umum dapat dibedakan tiga tipe umum struktur organisasi gereja, antara lain sebagai berikut.

- 1. Struktur tipe Episkopal.
- 2. Struktur tipe Presbiterial-Sinodal.
- 3. Struktur tipe Konggregasional (Mehl,1970, p. 154-157).

Barangkali secara singkat saja perlu dijelaskan masingmasing tipe serta sejauh mana tekanan yang diletakkan oleh masing masing tipe itu sebagai berikut.

1. Tipe Episkopal

Pada intinya, tipe ini menekankan kontinutas hierarkis dengan para Rasul. Episkopal terutama mempertahankan struktur di dalam gereja dan menghilangkan atau meniadakan otonomi dari gerakan-gerekan pemerintah. Lembaga Episkopal terdiri dari para Dishop dan para Bishop, tidak bergantung kepada *council*. Itu artinya, posisinya de-fakto. Dalam praktik kerohanian biasanya ada pada tingkat jemaat, kota, serta pada tingkat provinsi. Tipe Episkopal ini misalnya pada gereja-gereja Anglikan dan gereja Lutheran di Swedia, yang tentunya ada variasi-variasi tertentu.

2. Tipe Presbiterial Sinodal

Tipe ini berkembang untuk menentang tipe Episkopal. Katakanlah memberikan suatu suasana demokrasi pada Episkopal. Tipe ini ditandai dengan adanya organisasi yang berdasar atas hierarki sidang-sidang yang bersumber pada jemaat. Jemaat adalah gereja itu dan merupakan wujud dari komunitas, pada komunitas itulah firman diproklamasikan

dan sakramen dilayani. Jemaat itu diatur oleh dewan Presbiter yang kadang-kadang dalam kenyataannya memiliki otoritas yang sangat luar biasa. Di atas jemaat ada rapat-rapat gereja yang terdiri dari anggota jemaat dan klerus. Biasanya persidangan mendelegasikan kuasa kepada suatu dewan. Dewan ini dipimpin oleh satu atau seorang Presbiter yang dipilih dari dewan itu. Seorang Presbiter memiliki otoritas spiritual dan bertanggung jawab atas kehidupan gereja, kehidupan sosial gereja, dan lain-lain. Tipe ini dikatakan bersifat demokratis karena keputusan itu berada pada jemaat. Umat atau jemaat yang memberikan otoritas atau mandat itu, itu tidak berarti Presbiter tidak memiliki peranan apa-apa. Dalam tipe ini Presbiter juga mempunyai peranan dan partisipasi yang besar.

3. Tipe Konggregasional

Tipe ini menekankan suatu konggregasi secara lokal dalam hubungan jemaat yang satu dengan yang lain berada di dalam hubungan bebas. Di sini yang namanya gereja adalah apa yang tampak dalam jemaat lokal. Konggregasional ini menekankan individualisme yang sangat menonjol. Titik tolak dari pemahaman kekristenan modern di atas, dapat ditarik beberapa hal mengenai struktur organisasi dalam kekristenan modern sebagai berikut.

a. Pengaruh konteks permasalahan dan struktur sosial yang semakin kompleks dari dunia modern telah menyebabkan kekristenan modern menjadi sangat struktural dalam struktur organisasinya. Sebab itulah, kecenderungan masyarakat modern. Kekristenan menjadi sangat struktural, baik pada satu pihak untuk membentengi imannya, menciptakan disiplin-disiplin yang mapan, tetapi juga pada pihak lain mengimbangi

- secara institusional institusi-institusi besar di dalam masyarakat.
- b. Dalam hubungan dengan proses institusionalisasi dan kecenderungan struktural yang sangat kuat itu maka persoalan serius yang dihadapi di dalam organsasi ialah koinonia dan organisasi itu sendiri. Itu artinya, sejauh mana struktur organisasi atau kelembagaan gereja dapat mencapai tujuan-tujuan koinonia itu ataukah justru sebaliknya tujuan-tujuan koinonia atau tujuan-tujuan gereja itu di hambat dan terhambat dengan struktur kelembagaan gereja itu sendiri. Dalam hubungan ini, yang harus mendapat pengkajian serius ialah, bagaimana memahami dan memberlakukan prsesuposisi spiritual atau teologis bagi organisasi atau struktur kelembagaan gereja.
- c. Secara hakiki, ternyata ada perbedaan yang sangat menyolok di dalam struktur organisasi gereja antara gereja Roma Katolik dan gereja Protestan. Ada hierarkis yang lebih yuridis serta sentralisasi yang sangat kuat di dalam gereja Katolik. Berbeda dengan Protestan yang kurang memiliki suatu karakteristik yang pasti, artinya tidak ada suatu pola atau struktur organisasi yang secara umum berlaku bagi semua gereja Protestan. Katakanlah ada penyesuaian-penyesuaian struktur organisasi dengan konteks struktural masyarakat modern.

Telah dikatakan di depan bahwa gereja atau organisasi gereja mempunyai watak serta cirinya yang khas. Watak serta cirinya yang khas itu mengasumsikan realitas gereja itu sendiri sebagai realitas spiritual. Realitas spiritual inilah yang secara keharusan menjadi presuposisi bagi organisasi gereja itu sebagai suatu kerangka sosiologis. Itu berarti, baik dibangun dan ditegakkan di atas presuposisi spiritual atau presuposisi teologis. Presuposisi inilah yang menyatakan independensi organisasi gereja berbeda dengan organisasi yang lain. Tetapi, persoalannya, apakah itu nilainilai serta norma-norma teologis yang secara keharusan mesti diberlakukan sebagai presuposisi standar, serta sejauh mana nilainilai dan norma-norma teologis itu diberlakukan secara konkret di dalam struktur organisasi? Memang, hal ini tidaklah terlalu mudah, namun paling tidak dalam konteks penulisan ini, saya mencoba mengusulkan jalan ke arah itu. Dalam kaitan itulah, ada beberapa pertimbangan pokok.

- a. Struktur organisasi yang diciptakan, dibangun, dan dikembangkan tidak hanya diperuntukkan untuk pelayanan, tetapi seharusnya juga pada fungsi struktur. Apakah struktur itu dapat melakukan pelayanan atau tidak? *Statement* demikian ini melihat dan memahami struktur itu bukan sekadar alat, tetapi ia harus menjadi "sarana". Sebagai sarana, struktur itu sangatlah dinamis, tidaklah statis. Struktur itu memiliki daya kreatif yang menciptakan. Sebagai yang dinamis, struktur itu menciptakan, memelihara, mengembangkan dan melestarikan suatu nuansa kehidupan bagi organisasi itu, yang di dalamnya terkandung nilai-nilal spiritual atau teologis pada satu pihak dan nilai-nilai konteks permasalahan pada pihak lain.
- b. Nilai-nilai spiritual atau teologis secara asasi mengasumsikan keterikatan struktur itu dengan hakikat gereja itu sendiri. Itu berarti, keterikatan dan ketaatan terhadap Injil. Keterikatan serta ketaatan itu secara asasi mengasumsikan "kualitas gereja itu". Gereja yang mempertahankan kualitasnya, berarti gereja mempertahankan kebenaran Injil (Cf. Galatia 5: 2-6). Ini berarti, kualitas gereja adalah kebenaran. Kebenaran sebagai kualitas gereja itu harus dipertahankan,

dikembangkan, dipelihara, serta dilestarikan oleh gereja. Karena secara asasi kebenaran itulah yang menjadi ciri bagi komunitas Kristen itu. Itu berarti, Sejauh mana struktur organisasi diciptakan mampu memelihara, mengembangkan, menumbuhkan, serta membawa komunitas Kristen itu pada pernyataan imannya yang benar. Dengan perkataan lain, sejauh mana struktur itu menolong gereja menjadi gereja yang benar. Apakah dengan struktur itu komunitas Kristen itu sungguh-sungguh dapat beribadah kepada Allah di dalam pelayanan gereja atau apakah struktur itu dapat hidup untuk koinonia atau misi gereja itu.

Struktur yang terkait serta terjaring dengan "kebenaran" sebagai kualitas gereja, mengasumsikan suatu keyakinan iman yang sungguh-sungguh bahwa gereja sebagai *Community of the holy* itu senantiasa terpelihara. Dalam hubungan itulah, sejauh mana gereja mengimani Roh Kudus itu sebagai kekuatan yang menjalankan dan mengorganisir. Roh Kudus itu secara keharusan mesti diimani sebagai yang mampu menciptakan etik baru, yang nyata dan diberlakukan di dalam komanitas Kristen. Sebab Roh Kudus yang menciptakan etik baru itulah yang telah dan sedang membenarkan komunitas orang percaya sehingga senantiasa orang percaya itu hidup di dalam kualitas hidup, yakni kebenaran.

Roh Kudus barangkali dapatlan dijadikan sebagai suatu sistem pembakaran yang menghidupkan dan memberi tenaga, tetapi juga sebagai motor yang menggerakkan dan mengarahkan untuk mendapat arah yang jelas agar senantiasa kualitas orang percaya itu tetap dipelihara dan ditegakkan, tetapi juga tetap lestari. Roh Kudus itu secara keharusan mesti dimanifestasikan di dalam kehidupan spiritual, teologi, tetapi juga di dalam aktivitas struktur organisasi agar kualitas komuntas Kristen itu tetap dicerminkan.

Dalam hubungan ini, komunitas Kristen itu harus dilihat sebagai pusat organisasi tu. Itu artinya, komunitas itu harus menjadi basis di mana Roh Kristus itu bekerja dan diberikan peluang untuk bekerja. Kalau Roh itu menciptakan etik yang baru di dalam komunitas maka komunitas itu secara keharusan harus dijadikan komunitas yang etis. Komunitas itu harus menjadi semacam laboratorium etik di mana prinsip-prinsip iman Kristen itu dibangun dan diberlakukan, karena di dalam komunitas itulah Kristus dan Roh-Nya hadir dan bekerja sebagai motor yang membarui komunitas itu.

Akan tetapi, komunitas Kristen itu tidak hanya terikat kepada Kristus, tetapi komunitas itu juga terikat pada tradisi gereja, tradisi yang bersifat otoritas. Misalnya, tradisi kerasulan, bentuk tradisi otoritas yang telah ditransformasikan sebagai kekuatan yang mampu dalam mengorganisir, namun berpusat pada Allah sendiri. Ini berarti otoritas tidak lagi bebas nilai, artinya otoritas itu tidak lagi didasarkan atas unsur kemanusiaan semata-mata, tetapi juga pada kuasa Tuhan yang diterima melalui tradisi. Apabila demikian, otoritas jabatan tidak menghilangkan komunitas sebagai kolektivitas Kristen yang secara keharusan mesti memberlakukan kualitasnya itu. Itu berarti, secara hakiki, otoritas jabatan itu tidak menempatkan manusia lain pada posisi superior di atas manusia lain, tetapi justru untuk memanifestasikan Roh Kristus di dalam kolektivitas itu, serta memanifestasikan kualitas kolektivitas itu.

Dengan demikian, secara simplifikasi dapatlah dikatakan bahwa semua struktur gereja akan berada dalam kenyataan membantu gereja menjadi gereja yang benar menjadi gereja yang memiliki kualitas, serta struktur yang membawa misi gereja. Struktur akan menjadi struktur yang memelihara komunitas, membangun umat, serta menopang kesaksian.

C. Fleksibilitas di dalam Struktur Gereja

Fleksibilitas ini mengasumsikan adanya nilai-nilai konteks permasalahan yang terkandung dan dikandung oleh struktur itu. Dalam artian, struktur itu harus terbuka bagi modifikasi-modafakasi, terbuka bagi perubahan-perubahan. Di sini sebetulnya struktur itu diperhadapkan dengan dimensi secara temporal, dengan konteks struktur sosial yang memang kompleks serta mengitari gereja itu sendiri. Di samping itu, fleksibelitas ini juga mengajak gereja untuk secara kritis kreatif terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan untuk hidup secara kultural di mana gereja itu berada dan hidup.

Setelah mencoba memberikan beberapa catatan, baik terstruktur organisasi pada gereja-gereja awal, kekristenan modern serta usaha mengusulkan pertimbangan tentang apakah presuposisi spiritual atau teologis yang secara keharusan mesti diberlakukan dan mendasari struktur organisasi itu maka jalur pembahasan berikut ini akan diarahkan pada pemahaman tentang struktur organisasi pada Gereja Protestan Maluku. Gereja Protestan Maluku yang bertumbuh, berkembang di tengah-tengah masyarakat dunia modern yang berubah ini juga merupakan bagian dari kekristenan modern dewasa ini. Di dalam konteks masyarakat dunia modern itu, GPM juga tidak luput dari kecenderungan-kecenderungan perkembangan masyarakat modern. GPM melakukan tugas keterpanggilannya dan tugas keterpanggilan itu ia lakukan di tengah-tengah konteks dunia masyarakat modern yang berubah itu. Itu berarti, ia selalu dan terus-menerus merelevansikan sikap dan konsepsi secara kritis, positif, realistis, tetapi selalu kreatif.

GPM tidak mungkin tenang-tenang saja samentara masyarakat dunia modern ini semakin cepat menyajikan perubahan-perubahan besar di tengah modernitas. Bagaimanapun juga GPM

tidak dapat tidak mengacuhkan proses institusionalisasi. Karena institusionalisasi adalah kecenderungan masyarakat modern, sadar atau tidak, suka atau tidak, tetapi struktur organisasi akan menjadi sangat mapan sehingga tanpa sadar keanggotaan gereja secara terutama diperhatikan sebagai orang-orang yang terikat dengan bentuk-bentuk institusi. Dalam hubungan itulah, senantiasa muncul ketegangan-ketegangan dihakikat keumatan dapat menjadi terhambat, sebagai akibat dari kecenderungan proses institusionalisasi yang terlalu ketat itu. Seperti yang dikatakan di Mukadimah Tap. Sinode GPM No 1/1983, poin, 7.p.3 berikut ini.

"Kami mengaku pula bahwa corak kelembagaan gereja kami sering terjebak dalam perangkap kebekuan dan yang keterarahan (introversi) organisasi pada satu pihak dan semangat selera umat yang non-Injili pada pihak lain, yang mengakibatkan kehadiran ke-umatan kami lebih menjadi penghalang daripada memperlancar tugas panggilan pemasyhuran Injil dan menunjang tertib hukum dalam hidup bergereja kami yang jelas terbaca oleh dunia di sekitar kami."

Pemahaman terhadap pola atau struktur organisasi GPM, seyogianya dilakukan sejak GPM itu terbentuk 6 September 1935. Sebab perjalanan panjang di kurun waktu 30 tahun (tahun persidangan Sinode) itu dapatlah dicatat kecenderungan-kecenderungan GPM dalam pemahaman dirinya selalu gereja dalam menyatakan tugas keterpanggilannya di ruang dan waktu yang berbeda, serta adanya tendensi-tendensi yang khas dalam kaitan dengan pemasalahan yang dihadapi, juga bersamaan dengan itu kepemimpinan gereja yang berbeda. Dari pendekatan itu juga, dapatlah dipahami bagaimana GPM sebagai gereja, sejak ia masih sangat muda tanpa pengorganisasian yang baik dan

mapan, berada dalam tahap konsolidasi diri dalam sikap, konsep dan institusi, hingga sekarang ini ia telah menjadi sebuah gereja, tetapi juga sebagai kekuatan yang mapan secara organisasi yang patut dipertimbangkan dan tidak dapat dianggap remeh.

Dalam konteks punulisan ini, penulis mencoba mengarahkan pembahasan secara khusus pada periode kepemimpinan Sinode, Persidangan Sinode periode 1978 dan 1985. Hal ini tentu mempunyai pertimbangan pokok sebagai berikut.

- Sinode XXIX tahun 1978 berhasil memberikan suatu keputusan yang sangat terkenal mengenai "Pola Organisasi Gereja Protestan Maluku". (Keputusan Sinode No 1 Tahun 1978).
- 2. Sinode GPM Tahun 1985 berhasil memberikan penambahan dan atau penyenpurnaan terhadap Tap Sinode No 1978. (Ketetapan No 2 Tahun 1983 tentang: Penyempurnaan dan/atau Perubahan Ketetapan Sinode No 1 Tahun 1978).

a. Ketetapan Sinode Gereja Protestan Maluku No 1 Tahun 1978 tentang: POLA ORGANISASI GEREJA PROTESTAN MALUKU.

MENIMBANG:

- Bahwa Peraturan-perdturan yang menyangkut bidang Organisasi Gereja Protestan Maluku yang sementara berlaku, khusus peraturan sinode perlu ditinjau kembali.
- 2) Perlu mengatur suatu Pola Organisasi yang sesuai dan dapat menampung usaha-usaha di dalam pekerjaan pelayanan gereja dewasa ini.

MENGINGAT:

Keputusan Sinode Gereja Protestan Maluku ke XXXVIII Tahun 1976 mengenai pemantapan Aparatur gereja.



MENPERHATIKAN:

Saran-Saran dan pendapat dalam Sidang Pleno

Memutuskan

MENETAPKAN:

"POLA ORGANISASI GEREJA PROTESTAN MALUKU"

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam rangka ketetapan ini, yang dimaksudkan dengan Gereja adalah (GPM), yang terbentuk sejak tanggal 6 September 1935 berdasarkan *Staatsblad* 1935 No. 687, oleh karena itu:

- a. Berhak, berwewenang dan berkewajiban menjalankan Kepemimpinan gerejawi dalam rangka pelaksanaan tugas gereja di seluruh wilayah kerja GPM sesuai dasar dan panggilannya, seperti tercantum pada Tata-Gereja GPM.
- b. Berhak, berwewenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus segala harta milik kepunyaan badan hukum Gereja Protestan Indonesia (GPI) *Vide staatblad* 1844 No 34 dalam batas kerja wilayah GPM (kep Dirjen Bimas Kristen Protestan No 28 Tahun 1974).

BAB II POLA ORGANISASI GPM

- a. Pola organisasi Kepengurusan GPM terdiri dari:
 - 1) Perangkat Kepengurusan Tingkat Sinodal.
 - 2) Perangkat Kepengurusan Tingkat Klasis.
 - 3) Perangkat kepengurusan Tingkat Jemaat.

- b. Perangkat Kepengurusan Tingkat Sinodal terdiri dari:
 - 1) Sinode.
 - 2) Badan Pekerja Lengkap (BPL).
 - 3) Badan Pekerja Harian (BPH).
 - 4) Badan Pertimbangan (BP).
 - 5) Sekretariat Umum.
 - 6) Departemen.
 - 7) Badan Pembantu.
- c. Perangkat Kepengurusan Tingikat Klasis terdiri dari:
 - 1) Sidang Klasis.
 - 2) Badan Pekerja Klasis.
 - 3) Sekretariat.
 - 4) Bagian Pelayanan.
- d. Perangkat Kepengurusan Tingkat Jemaat terdiri dari:
 - 1) Sidang jemaat.
 - 2) Majelis Jemaat.
 - 3) Unit Sektor.
 - 4) Unit Pelayanan.

b. Ketetapan Sinode GPM No. 2 Tahun 1983 tentang:

"Penyempurnaan dan/atau Perubahan Ketetapan Sinode GPM No. 1 Tahun 1978.

Sinode Gereja Protestan Maluku

MENIMBANG:

- 1. Bahwa menjadi tugas Sinode GPM untuk menetapkan, mengubah, atau menambahkan peraturan-peraturan pokok gereja dan ketetapan-ketetapan lain untuk seluruh gereja.
- 2. Bahwa Ketetapan Sinode GPM No. 1 Tahun 1978 tentang pola organisasi GPM, perlu disempurnakan serta diubah



sebagaimana mestinya, dan karena itu dianggap perlu di ditetapkan dengan suatu Ketetapan Sinode GPM.

MENGINGAT:

Ketetapan Sinode Gereja Protestan Maluku No 1 tahun 1978

MEMPERHATIKAN:

- Permusyawaratan di dalam Persidangan Sinode GPM XXX bulan April 1983 yang membahas materi Rancangan ketetapan Sinode GPM No 1 Tahun 1978.
- 2. Mufakat bulan Sidang Paripurna Sinode GPM XXX tanggal slus 12 April 1983.

MEMUTUSIKAN: MENETAPKAN

"PENYEMPURINAAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETETAPAN SINODE GPM No 1 TAHUN 1978".

Penyempurnaan dan atau Perubahan Ketetapan Sinode No 1 Tanun 1978, meliputi perubahan dan isi pasal-pasal dan babbab. Ketetapan Sinode GPM tersebut sebanyak 6 bab, yaitu:

Bab I Ketentuan Umun

Bab II Pola Organisasi GPM

Bab III Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Perangkat Kepengurusan Sinodal

Bab IV Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Perangkat Kepengurusan Tingkat Klasis

Bab V Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Perangkat Kepengurusan perangkat Jemaat

Bab VI Ketentuan Penutup

Barangkali penting untuk secara singkat disebutkan tentang inti memori penjelasan atas ketetapan tentang Penyempurnaan dan/atau Perubahan Ketetapan Sinode GPM No 1 Tahun 1978 itu.

- 1) Ketetapan Sinode No 1 Tahun 1978, belum sempat memuat ketentuan yang menyangkut pengaturan Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Perangkat Kepengurusan GPM di Tingkat Klasis dan Jemaat dalam bab-bab tersendiri, sama halnya dengan Bab III tentang Kepengurusan Tingkat Sinoda1. Dalam hubungan itu, kepada BPH/BPL ditugaskan untuk membentuk Panitia yang bertugas merumuskan pokok-pokok pemikiran tentang Pembaruan struktur GPM, i.c. Penyempurnaan, Pengaturan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi eseloneselon yang lain, yang belum diatur dalaam Ketetapan tersebut. Dalam hubungan itu perlu untuk mengadakan suatu pola organisasi yong mencakup tingkat klasis dan jemaat secara konkordan dengan struktur ditingkat sinodal, terlebih dahulu harus diadakan evaluasi terhadap Pola Organisasi baru ditingkat sinodal selama ini dalam praktik sehari-hari.
- 2) Dengan pengalaman selama 4 Tahun BPH sekarang yang dibentuk untuk pertama kali, serta 4 kali penyelenggaraan siding BPL, terasa ada kebutuhan untuk lebih meningkatkan pengaturan kedudukan dan hubungan tata kerja Sinode sebagai majelis tertinggi dalam hierarki kepemimpinan gereja dengan/atau antar1embagalembaga BPL, BPH, BP, baik secara struktural maupun secara fungsional. Dengan demikian, ketiga lembaga tersebut dapat dikembangkan peranannya sebagai satu kesatuan struktural yang serasi sesuai garis komando yang ada.

- 3) Pola Organisasi CPM (Ketatapan Sinode No 1 Tahun 1978 *juncto* Ketetapan Sinode No. 2 Tahun 1983), maka yang dimaksudkan dengan Gereja adalah Gereja Protestan Maluku yang dibentuk sejak tanggal 6 September 1935 berdasarkan *Staadtblad* 1935 No. 687. Dalam Bab I Ketentuan Umum, disebutkan bahwa GPM:
 - a) Berhak, berwewenang, dan berkewajiban menjalankan kepemimpinan Gereja dalam rangka pelaksanaan tugas gereja di seluruh wilayah kerja GPM sesuai dasar dan panggilannya seperti tercantum pada Tata Gereja GPM.
 - b) Berhak, berwewenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus segala harta milik kepunyaan Badan Hukum Gereja Protestan Indonesia (GPI) *vide Staatblad* 1844 No. 34 dalam batas 1ingkungan wilayah kerja GPM (Keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan No. 28 Tahun 1974).

Dalam perumusan esensialia-esensialia yang menyangkut pembakuan Pola Organisasi GPM itu, tetap dianut prinsip-prinsip yang telah diletakkan sejak semula ketika Sidang Sinode Ke-XXIX, yang telah menetapkan ketetapan-ketetapan standar nomor 1 tahun 1978 yang terkenal itu, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut keadaan wilayah pelayanan GPM sebagai suatu gereja kepulauan, yaitu:

1) Sederhana. Hierarki dan fungsi serta kepemimpinan gereja harus tetap bertumpu pada perwujudan asas Presbiterial Sinodal dengan garis-garis kerja (garis komando, garis hubungan fungsional, garis staf dan garis koordinasi) yang jelas.

- 2) Adanya garis kerja yang jelas. Penjabaran Putusan Sinode di tingkat sinodal melalui garis komando, dijabarkan secara fungsional oleh tiga lembaga penyelenggara yang berada di bawah Sinode, masing-masing berturut-turut BPL, BPH, dan BP yang berkedudukan setingkat. Ketiga lembaga tersebut memiliki kompetensi absolut sendirisendiri sesuai fungsi masing-masing di bidang legislatif (BPL), eksekutif (BPH), dan Badan Pertimbangan (BP). Itulah sebabnya ketiga lembaga itu dalam garis kerja sesuai kualitas masing-masing berada pada garis lembaga fungsional satu sama lain, tanpa yang satu membawahi yang lain.
- 3) Prinsip presbiterial-sinodal diarahkan secara dinamis dan efektif dalam wujud pelembagaan fungsi legislatif tertinggi (Sinode sebagai lembaga pembuat Peraturan Pokok Gerega) dan fungsi legislatif organik (BPL sebagai pembuat Peraturan organik Gereja dalam rangka penjabaran atas putusan Sinode).
- 4) Realistis, tetapi dinamis. Konstelasi perangkat kapemimpinan gereja yang ditetapkan sinode ke-XXIX itu tetap rea1istis terhadap kondisi wilayah, kemampuan, dan tenaga manusia yang ada dalam lingkungan gereja ini, tetapi lebih maju dari keadaan sebelumnya, di mana tertib hukum yang menyangkut hierarki pengaturan perundang-undangan gereja sering kali menjadi faktor penghambat.
- 5) Orientasi pada program. Adanya penegasan garisgaris kerja sekaligus mendukung tekad gereja ini sejak dasawarsa terakhir untuk mengarahkan tujuan apostolat gereja dalam mewujudkan serangkaian kegiatan yang berorientasi pada program yang sistematis berencana

dan dijabarkan secara operasional melalui sistem anggaran tahunan pada semua jajaran di tingkat Sinodal, Klasis, dan Jemaat.

6) Adanya fungsionalisasi perangkat kepengurusan secara tegas. Hal itu sejak Sinode ke-XXIX ditegaskan melalui mekanisme pengaturan Persidangan Sinode secara regular empat tahun sekali (Pasal 5 ayat 1 Ketetapan Sinode No 1 Tahun 1978) di samping kemungkinan penyelenggaraan Sinode Luar Biasa sewaktu-waktu (Pasal 5 ayat 2 ketentuan di atas). Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan tugas BPL seperti dimaksud pada pasal 7 ayat 2 yang bersidang sedikit-dikitnya sekali setahun (Pasal 10 ayat 1) adalah semata-mata demi menjamin kelancaran tugas-tugas gereja.

Klausul yang memungkinkan BPL mengambil keputusan antarwaktu antara dua masa persidangan Sinode harus ditafsirkan secara positif sesuai makna klausul pertama, yaitu menjamin kelancaran tugas-tugas gereja sematamata. Bukan dalam arti yang negatif, seolah-olah BPL bisa menggantikan Sinode dalam hubungan penyelenggaraan kompetensi absolutnya, seperti dimaksud Pasal 2 dan 3 seolah-olah suatu sinode mini.

7) Adanya kesatuan arah komando. Adanya penegasan garis komando adalah semata-mata demi penyederhanaan pengertian bahwa di lingkungan GPM hanya ada satu garis haluan gereja yang harus diwujudkan, baik secara fungsional pada pelbagai bidang pelayanan dan ditaati pada semua hierarki kepengurusan gereja di tingkat Sinodal, Klasis, dan Jemaat. Hal ini sudah tentu akan membantu ke arah penyeragaman kebijakan yang menyangkut hal-hal seperti:

- 1) Perwujudan kehadiran dan kewibawaan gereja dalam segala aspek yang nyata.
- 2) Tugas pengembangan pengakuan iman yang Injili dan sejalan dengan itu memimpin serta memberikan amanat kepada seluruh gereja mengenai pelaksanaan pelayanan gereja pada pelbagai bidang. Tegasnya, adanya penegasan perihal garis komando hendak menghilangkan kesan kesimpangsiuran struktural yang secara popoler disebut sebagai gereja dalam gereja.

"POLA ORCANISAST GPM". (Ketetapan Sinode No 1 Tahun 1978 juncto Ketetapan Sinode No. 2 Tahun 1983).

- a. Pola Organisasi Kopengurusan GPM terdiri dari:
 - 1) Perangkat Kepengurusan Tingkat Sinodal.
 - 2) Perangkat Kepengurusan Tingkat Klasis.
 - 3) Perangkat Kepengurusan Tingkat Jemaat.
- b. Perangkat Kepengurusan Tingkat Sinodal terdiri dari:
 - 1) Sinode.
 - 2) Badan Pekerja Lengkap (BPL).
 - 3) Dauan Pekerja Harian (BPH).
 - 4) Badan Pertimbangan (BP).
 - 5) Sekretariat Umum.
 - 6) Departenen.
 - 7) Biro.
 - 8) Badan non-Departemen.
- c. Perangkat Kepengurusan Tingkat Klasis terdiri dari:
 - 1) Sidang Klasis.
 - 2) Badan Pokerja Klasis.
 - 3) Sekretariat.
 - 4) Bidang Pelayanan.



- d. Perangkat Kepengurusan Tingkat Jemaat terdiri dari:
 - 1) Sidang Jemaat.
 - 2) Majelis Jemaat.
 - 3) Seksi Pelayanan.
 - 4) Sektor Pelayanan.
 - 5) Unit Pelayanan.





Pada pembahasan bab ini akan dilakukan usaha tentang bagaimana Gereja Protestan Maluku memahami misi atau tugas panggilannya, serta sejauh mana misi itu dimanifestasikan di dalam bentuk aktivitas programnya secara konkret. Namun, barangkali penting untuk secara singkat dan umum saja perlu melakukan pengkajian tentang misi itu dan dengan demikian apakah tujuannya. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam rangka pemahaman GPM tentang tugas panggilannya.

Apa misi dan tujuan GPM sekarang ini di dalam masyarakat yang berkembang merupakan pertanyaan-pertanyaan serius yang banyak menimbulkan keresahan-keresahan, baik di kalangan gereja maupun orang-orang Kristen, juga oleh para teolog? Seperti apa yang ditulis oleh Fraize berikut ini.

"Kalau waktu dahulu pertanyaan tentang misi itu berhubungan dengan taktik, teknik, maka dewasa ini kita bertanya apakah misi itu dan dengan demikian apakah tujuannya" (Fraizer dalam Anderson, 1974, No.1. p. 23).

Inilah yang dikatakan Freytag: "Dahulu misi itu mempunyai banyak persoalan, tetapi sekarang misi itu sendiri yang menjadi persoalan" (Freytag dalam Anderson, 1974, No. 1. p. 23).

Bukan saja keresahan-keresahan itu dirasakan oleh para teolog, tetapi juga dirasakan oleh para misionaris di lapangan.

"Bahwa tugas misi itu sendiri mungkin berada dalam bahaya. Kecemasan dan keresahan para misionaris bukan karena kesukaran dalam melakukan tugas mereka atau juga bukan karema tenaga, tetapi jauh lebih mendasar, apakah memang ada pekerjaan yang harus mereka kerjakan" (Fraizer dalam Anderson, 1974, No 1. p. 24).

Tetapi, bukan hanya itu masih banyak lagi persoalan-persoalan pokok. Sementara orang Kristen mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja, ada para teolog berteriak-berteriak menjadi anggota gereja belum tentu otomatis selamat. Untuk menjadi anggota gereja tidak otomatis memperoleh kartu keselamatan. Memang itulah krisis. Sementara kita mengatakan bahwa panggilan kita tetap berlaku. Sementara kita bertanya apakah panggilan itu dan dengan tujuan apa panggilan itu. Dalam keadaan semacam itu, tepatlah apa yang dikatakan oleh Miguez Bonino.

"Orang Kristen dewasa ini sementara dibingungkan dengan tugas di dalam dunia misi. Kita dibingungkan dengan krisis di dalam dunia misi Kristen. Apakah yang menjadi hakikat dari krisis itu, apa sebab dan apa pula yang dikehendaki dari Kristen". Tetapi, selanjutnya Bonino menulis: Krisis itu harus menjadi titik untuk kita berangkat. Kita jangan mencoba mengelulunginya atau pua melompatinya, tetapi kita harus berangkat melaluinya. Krisis itu panggilan Allah untuk pembaruan dan ketaatan. Krisis adalah jalan pembaruan bagi seluruh gereja. Krisis adalah kesempatan bagi pengertian yang dalam tentang Injil. Krisis adalah kesempatan membawa kepada kesetiaan terhadap Allah. Dengan satu kata krisis adalah kesempatan bagi suatu kelahiran baru bagi gereja" (Bonino dalam Andderson 1974, No. 1, p. 37, 39).

Secara umum, rumusan mengenai misi jatuh pada dua penekanan. Arah penekanan yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Arthur yang melihat misi itu meliputi solidaritas dengan mereka yang menderita ketidakadilan, namun yang pokok pada "ujian akhir dari misi itu", apakah memang misi itu menghasilkan murid Yesus. Itu artinya, menjadikan orang itu menjadi Kristen.

Arah penekanan yang kedua, antara lain seperti yang dikatakan oleh Tracy, yang melihat misi dalam artian menyaksikan kuasa Allah bahwa Allah telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan untuk membebaskan kekuatan-kekuatan demonis yang memengaruhi manusia. Orang Kristen secara individu dan sebagai gereja mempunyai tanggung jawab misioner untuk kepentingan umat manusia yang menderita. Pada dasarnya, misi adalah perjuangan kemanusiaan (Arthur dan Tracy dalam Anderson, 1974, No. 1, p. 5).

Penekanan yang pertama, didasarkan pada hakikat Injil itu sebagai fakta sejarah, di mana Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia untuk menjadi Tuhan dan penyelamat. Fakta itu mencapai puncak dalam karya Yesus Kristus, kematian, dan kebangkitan-Nya. Fakta ini tidak pernah berubah, yang berlaku sekali untuk selama-lamanya. Fakta karya penyelamatan berarti manusia diperdamaikan dengan Allah. Dalam lingkaran fakta itu misi gereja di tempatkan. Gereja diberi mandat untuk memproklamasikan kabar baik tentang pengampunan Allah dan yang berlaku bagi dunia. Inilah peranan rasuli Gereja. Stephen Nill menulis sebagai berikut.

"Hanya satu obat bagi pengampunan dan pertobatan, itulah Injil. Semua manusia membutuhkan Injil. Kalau gereja gagal memproklamasikan Injil, itu berarti gereja telah menggantikan Injil itu dengan sesuatu yang lain" (Nill dalam Anderson, 1974, No. 1, p. 6-7).

Jadikanlah semua bangsa itu murid-Ku berarti pertobatan seluruh manusia. Bukan hanya individu. Ini tidak berarti gereja tidak memerlukan solidaritas kemanusiaan. Gereja harus memproklamasikan dan memperjuangkan keadilan, kebebasan, namun yang paling pokok ialah "ujian akhir". Apakah menghasilkan atau tidak menghasilkan murid Yesus.

Arah penekanan yang kedua, berpijak pada Yesus. Allah yang telah mengidentifikasikan diri-Nya dengan manusia. Allah telah menjadi manusia dalam rangka membebaskan manusia dari kekuatan-kekuatan yang menekan, yang mengakibatkan kemiskinan, ketidakadilan, dan lain-lain. Dalam kuasa Allah yang telah menjadi manusia itu, gereja dan orang Kristen dipanggil untuk bersaksi mengenai kuasa Allah itu, yang berarti membebaskan manusia dari sistem-sistem yang menekan, yang melestarikan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan lainlain. Orang Kristen secara individu dan secara gereja harus menggunakan kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, politik untuk tindakan kebebasan manusia.

Memahami kedua arah penekanan secara demikian, pertanyaan yang muncul ialah mana di antara kedua penekanan itu yang lebih setia terhadap amanat Kristus: menjadikan orang menjadi Kristen, tetapi tetap tertindas ataukah melepaskan orang dari penindasan, tetapi tidak menjadi Kristen, inilah antara lain krisis itu. Itu artinya, seperti yang telah dikatakan tadi bahwa sementara kita mengatakan bahwa panggilan itu tetap berlaku, tetapi serentak pula kita bertanya apakah panggilan itu dan bagaimana panggilan itu, serta untuk apa panggilan itu. Namun, satu hal yang jelas misi itu mengalami krisis pada saat gereja dan orang Kristen bertindak benar. Kalau demikian, apakah panggilan itu dan bagaimana panggilan itu? Di depan (dalam pemahaman teologis tentang gereja) telah dikatakan bahwa

eklesiologi tidak dapat dipisahkan dari soteriologi, yaitu tindakan karya penyelamatan Allah bagi dunia unuk membarui dan membebaskan.

Jika eklesiologi tidak dapat dipisahkan dari soteriologi maka itu berarti bahwa misi gereja dengan demikian berada di dalam terang *missio dei*, artinya keterarahan terhadap dunia. Misi gereja bergantung pada misi Allah, bukan Allah bergantung pada gereja. Allah yang pertama bekerja. Tugas gereja ialah menyatakan kepada dunia misteri rahasia penyelamatan Allah itu. Itu berarti, gereja mengungkapkan sesuatu yang sudah ada, bukan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Misteri itu adalah tindakan karya penyelamatan Allah untuk membarui, membebaskan, dan menyelamatkan dunia ini, bukan untuk membinasakan dunia ini. Gereja harus menyatakan keluar misteri - karya penyelamatan Allah itu dan itulah gereja sebagai "tanda". Ia dapat dikatakan sebagai gereja kalau ia melakukan fungsinya. Katakanlah, ia dapat dikatakan sebagai gereja sejauh ia merelakan dirinya dipakai di dalam karya penyelamatan Allah untuk dunia. Dunia yang dikasihi Allah telah dikalahkan dalam kasihnya serta yang menjadi tempat bagi karya penyelamatan Allah. Menyatakan dan mengungkapkan misteri karya penyelamatan Allah, berarti gereja mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah/syalom Allah agar dunia dan orang lain mencicipinya dan percaya.

Dalam hubungan ini, benar apa yang dikatakan DGI yang merumuskan tugas panggilan gereja sebagai berikut.

"Berita kesukaan mengenai pertobatan dan pembaruan yang tersedia bagi manusia (Mrk. 1: 5) serta kebebasan. Kebenaran dan kesejahteraan yang dikehendaki Tuhan untuk dunia (Luk. 4: 18-21)" (Siantar, 1971, p. 93).

Allah yang telah menjadi manusia di dalam Kristus mengasumsikan bahwa Allah telah masuk di dalam sejaarah manusia yang paling konkret. Ia telah masuk di dalam ruang dan waktu di mana manusia itu hidup. Itu berarti, Allah mau menemui manusia di dalam konteks hidupnya, konteks sosial – kultural, politik – ekonomi. Tepatnya Allah mau menemui manusia masingmasing dalam konteks hidupnya. Dari konteks hidup itulah, Allah menantikan jawaban dari manusia. Jawaban yang penuh ketaatan terhadap Allah dan yang lahir dari konteks hidup yang paling konkret itu (Ekadarmaputra). Inilah juga yang dikatakan oleh DGI dalam rangka memahami tugas paggilan gereja-gereja di Indonesia. Di dalam konteks Indonesia yang sedang mencari dan menemukan modernitas itu, Allah menantikan jawaban manusia yang penuh ketaatan terhadap Allah.

Secara singkat dan umum, mengkaji apakah misi itu serta apakah tujuannya maka berikut akan dilakukan pengkajian tentang bagaimana Gereja Protestan Maluku (GPM) memahami tugas panggilannya (misi) serta sejauh mana misi itu diberlakukan di dalam aktivitas programnya secara konkret. Dalam kaitan itu, ingin ditegaskan bahwa pengkajian terhadap pemahaman GPM tentang misinya itu bukanlah suatu pengkajian atas sesuatu yang sebelumnya tidak ada, tetapi justru pengkajian atas sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Itu berarti, pengkajian ini hanyalah merupakan suatu usaha sistematisasi pemahaman atas pemahaman yang sudah ada. Sebagai suatu sistematisasi pemahaman maka memerlukan titik tolak yang jelas. Untuk itu, maka titik tolak yang dipakai, yakni "eklesiologi". Eklesiologi yang dimaksudkan, yaitu pemahaman Gereja Protestan Maluku sebagai "gereja" seperti yang terungkap di dalam Tata Gereja GPM Bab I Pasal I.

"Gereja Protestan Maluku sebagai persekutuan orangorang percaya kepada Yesus Kristus dibentuk dan ditantang oleh kenyataan tindakan Allah, karena itu ia Kudus dan Oikumenis."

Di depan telah dikatakan bahwa rumusan dan pemahaman gereja di atas secara teologis mempunyai penalaran-penalaran pokok dan mendasar. Penalaran-penalaran yang dimaksudkan itu dapatlah dikaji secara berikut. Gereja Protestan Maluku secara hakiki memahami dan menghayati keberadaanya sebagai (gereja) yang dibentuk dan dilahirkan hanya oleh dan melalui anugerah Allah. Di dalam kenyataan anugerah Allah itulah, Gereja Protestan Maluku telah dipilih menjadi umat Allah yang percaya kepada Yesus Krisstus sebagai Tuhan dan juruselamat dunia. Dalam kaitan itu maka GPM mengakui Yesus Kristus sebagai kepala Gereja dan juga adalah dasar dari Gereja Protestan Maluku. Dengan perkataan lain, fakta Kristus sebagai dasar itulah yang menimbulkan fakta adanya GPM sebagai gereja. Itu berarti, Gereja Protestan Maluku secara hakiki hidup dan berkarya bukan dari dan karena dirinya sendiri, tetapi dari Allah di dalam Kristus. Sebagai gereja maka GPM bergantung kepada Allah di dalam Kristus, bukan sebaliknya Allah bergantung kepada GPM (Gereja).

Dibentuk dan dilahirkan oleh anugerah Allah secara hakiki mengasumsikan kekudusannya sebagai gereja. Tetapi, kekudusan keberadaannya itu bukan karena kekudusan anggota-anggotanya, tetapi karena dikuduskan dan dibenarkan dari Alah. Dengan perkata lain, kekudusannya itu hanyalah karena pembenaran dan pengudusan dari pihak Allah sendiri. Kekudusannya itu juga terletak di dalam keterpilihannya sebagai umat Allah. Tetapi, sebagai suatu umat Allah yang dipilih oleh Allah di dalam Kristus, ia bukan hanya dikuduskan dan juga bukan hanya untuk diselamatkan. Secara eksistensial GPM juga ditugaskan untuk

bertanggung jawab. Ia ditugaskan dan bertanggung jawab untuk mengungkapkan dan meneruskan misteri karya penyelamatan Allah bagi dan untuk dunia. Dunia yang telah dikalahkan di dalam kasih Allah sendiri dan menjadi benih bagi bibit karya penyelamatan Allah. Allah memang bermaksud membarui dan menyelamatkan dunia ini. dalam konteks kasih Allah yang utama inilah maka GPM secara hakiki dipilih dan di tempatkan untuk bertugas dan bertanggung jawab. Katakanlah ia dapat diakatakan sebagai gereja bila ia merelakan dirinya dipakai oleh Allah. Merelakan dirinya melakukan tugas dan amanat keterpanggilan dan tanggung jawab itu.

Dalam penghayatan akan keberadaannya yang secara keharusan fungsional di dalam karya penyelamatan Allah maka dirumuskan tugas dan amanat keterpanggilan itu sebagai berikut.

"Untuk mendirikan tanda-tanda sejahtera bagi dunia dan umat manusia melalui pemberitaan dan tindakan pemasyhuran segala kebaikan dan kasih setia Allah dalam Yesus Kristus" (Tata Gereja Bab II, 3. 1).

Jika secara eksistensial GPM di tempatkan di dalam kerangka *Missio Dei*, yang berarti keterarahan kasih Allah bagi dunia, itu berarti tugas panggilan atau misinya itu senantiasa searah dan bergantung pada tindakkan Allah sendiri. Itu berarti, tugas dan panggilan atau misi yang dilakukan itu bukanlah sesuatu yang sebelumnya tidak ada, tetapi sesuatu yang sudah ada. Itu berarti, mengungkapkan kepada dunia misteri karya penyelamatan Allah bagi dunia untuk memperbarui, membebaskan, dan menyelamatkan dunia ini.

Sebagai "alat" di dalam *God's master plan* maka GPM senantiasa mengimani Roh Kudus melalui firman Allah dalam Alkitab tetap hadir dan memimpin gerejanya dalam melaksanakan panggilan atau misinya itu. Meniti dan mengkaji pemahaman

eklesiologi secara demikian, dapatlah dikatakan bahwa Gereja Protestan Maluku telah secara mendasar merumuskan pemahaman-pemahaman mendasar tentang misi atau tugas panggilannya itu yang menurut kesan penulis sangat erat kaitannya dengan pemahaman DGI tentang tugas panggilan gereja yang dirumuskan sebagai berikut.

"Berita kesukaan mengenai pertobatan dan pembaruan yang tersedia bagi manusia (Mrk. 1: 5), serta kebebasan, kebenaran, dan kesejahteraan yang dikehendaki Tuhan untuk dunia (Luk. 4: 18-21)" (Lih. Mukadimah, tap Sinode GPM No. 1/1983).

Setelah melakukan sistematisasi pemahaman secara demikian di atas, barangkali penting untuk mengungkapkan halhal pokok yang mempunyai kaitan erat dengan pemahaman eklesiologi dan misiologi yang di kaji dari dalam sejarah gumul Gereja Protestan Maluku itu sendiri. Sejak GPM diproklamirkan sebagai suatu institusi dengan pola presbiterial sinodal maka sejak saat itulah GPM melakukan pembaruan-pembaruan, baik sikap, konsepnya secara terus-menerus dalam rangka memahami eksistensi keterpanggilannya itu dalam berbagai aspek kehidupan gereja.

Masalah pembangunan jemaat dipahami sebagai sentral dalam kerangka menumbuhkan dan mengembangkan serta usaha mendewasakan seluruh kehidupan gereja. Bukan hanya itu, juga masalah-masalah, seperti evangelisasi, pelayanan kemanusiaan, usaha-usaha pendidikan, pembinaan, keterlibatan di dalam masalah kemasyarakatan. Semua aktivitas sebagai refleksi penghayatan eksistensial itu telah membawa GPM untuk melakukan pembangunan GPM dalam seluruh segi kehidupan GPM dalam penghayatan akan kepemimpinan Kristus yang tetap menyertai gerejanya, serta ketaatan terhadap firman dan roh Allah

untuk senantiasa membaharui panggilannya secara baru terusmenerus. Dari "batu pembatas" ini GPM secara sistematis melihat pentingnya berbagai usaha konsolidasi dan pembaruan berbagai aspekpelayanan dan perngkat pelayan gereja, katakanlah, pesan tobat 1960, itu bukanlah hanya "batu pemabatas" untuk melihat sudah berapa jauh ia berjalan, tetapi justru merupakan awal bagi suatu proses pembaruan GPM dalam perjalanan ke depan yang panjang. Proses pembaruan ke depan itu, dapatlah ditandai pada persidangan-persidangan sinode dari periode yang satu ke periode yang lainnya.

Dalam hubungan ini, dapat disebutkan beberapa hal: sinode 1965 antara lain, perumusan tentang jawatan pelayanan dan tata pelayanan GPM yang mengungkapkan tentang pengakuan Gereja Protestan Maluku kepada Kristus selaku/Tuhan Gereja dan Tuhan dunia. Sinode 1968, antara lain tentang tata pelayanan GPM yang merupakan suatu dialog konvensional dari realitas dunia, realita gereja, dan realita kepemimpinan Tuhan dengan berpijak pada pola kehadiran gereja sebagai hamba yang menghampakan dirinya. Sinode 1972, antara lain tentang pola dasar pembangunan apostolate jemaat dan pekabaran Injil, serta perumusan usahausaha kesaksian dan pelayanan gereja serta usaha merumuskan pemahaman dasar tentang tugas panggilan gereja. Sinode 1974, antara lain dapat dicatat tentang pembaruan gereja yang meliputi pelayanan dan kesaksian untuk pengabdian kepada firman dan konteks dunia yang nyata sebagai ajang pergumulan gereja yang konkret. Sinode 1978, antara lain panggilan gereja dalam rangka mewujudkan hidup sejahtera yang utuh. Persembahan hidup dalam pelaksanaan misi gereja juga persembahan struktur dan kepemimpinan. Sinode 1983, antara lain memuat pandanganpandangan dasar secara visioner tentang citra manusia GPM



sebagai sumber daya insani umat yang memiliki 3 kualitas, yaitu: ketahanan iman, ketahanan ilmiah, dan ketahanan sosial ekonomi.

Setelah memberikan hal-hal yang mempunyai kaitan dengan pemahaman eklesiologi dan misiologi yang bertumbuh di dalam sejarah-sejarah perjalanan GPM yang dinamis. Oleh karena itu, berikut ini akan dilakukan sistematisasi pemahaman tentang tugas panggilan atau misi GPM itu seperti yang telah dijabarkan di dalam aktivitas program yang secara konkret. Dalam hubungan ini, secara khusus akan dikaji aktivitas serta program itu seperti tertuang di dalam sinode ke-XXX (Tap Sinode No. 1/1983) tentang pola induk pelayanan GPM. Memilih Tap ini tentunya mempunyai kaitan dengan pola organisasi yang sedang berlaku.

Dalam Tap tersebut dikatakan bahwa segala perencanaan yang dilakukan adalaah dengan tujuan mengembangkan "pekerjaan pelayanan" "dan pembangunan tubuh Kristus" (Ef. 4: 12). Baik ke dalam (khususnya menyangkut konsolidasi pelayanan jemaat-jemaat) maupun keluar (dalam hubungan dengan penampilan kesaksian, pelayanan, persekutuan, dan peribadahan). Tujuan [perencanan secara demikiaan ini meliputi bidang-bidang pelayanan yang ada sekarang di GPM, yang telah ditetapkan sejak sinode ke-XXIX tahun 1978 dan merupakan penjabaran dari Tri Panggilan Gereja.

- 1. Bidang keesaan dan kesaksian (KEKES).
- 2. Bidang pelayanan, pendidikan, dan pembangunan (PELPEM).
- 3. Bidang keuangan dan ekonomi (FINEK).
- 4. Bidang pendidikan teologia (STT GPM).
- 5. Bidang pembangunan jemaat (LPJ) dan kerumahtanggaan.

Dalam kaitan dengan tujun perencanaan secara fungsional serta bidang-bidang pelayanan itu maka secara fungsional dipahami pentingnya berbagai komponen (faktor) perencaan dalam usaha pencapaian tujuan perencanaan itu. Komponen-komponen



itu secara fungsional mempunyai kompetensi dan peranan yang harus dimainkan, serta senantiasa terkait antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Itu berarti, secara fungsionalistis setiap komponen itu memiliki kualitas-kualitas tertentu yang sebetulnya dapat diukur dalam mencapai tujuan perencanaan itu. Komponen atau faktor-faktor perencanaan yang dimaksudkan itu meliputi berikut ini.

- warga jemaat; 1.
- 2. pejabat gereja;
- personalis; 3.
- pimpinan sinodal; 4.
- 5. pimpinan klasikal;
- ISIUS pimpinan presbiterial/jemaat; 6.
- 7. organisasi gereja;
- wadah oikumenis; 8.
- sarana dan prasarana; 9.
- logistik; 10.
- 11. dana.

Barangkali untuk membantu pengertian sejauh mana kualitas peranan yang harus dimainkan serta keterkaitan komponenkomponen itu, di bawah ini akan disebutkan dua contoh.

1. **Bidang Pembangunan Jemaat**

Komponen waarga jemaat, antara lain:

- Aktif mendukung program tabinakel. a.
- h. Giat dalam mencapai tujuan pembangunan jemaat dan apostolate gereja.
- Potensi di bidang ekonomi/wiraswasta, komunikasi C. masa, musik gereja.



Komponen pejabat gereja, antara lain:

- a. Menjadi pembina jemaat yang ulet dan berdedikasi.
- b. Mampu bertanggung jawab di dalam membina kehidupan berjemaat.
- c. Aktif di dalam membuat laporan dan evaluasi programprogram pembinaan jemaat.
- d. Aktif menggalang dana yang diperlukan.

Komponen personalia, antara lain:

- a. Paham, tahu, dan mengerti cakupan (aspek kepelbagaian) dan jangkauan bidang yang ditugasi.
- b. Peka dan terampil.
- c. Menguasai isu-isu gereja dan masyarakat.
- d. Mengenal dan menguasai kehidupan jemaat.

Komponen pimpinan sinodal, antara lain:

- a. Menguasai kehidupan jemaat.
- b. Terampil dan berpengalaman.
- c. Mampu berefleksi.

Komponen pimpinan klasikal, antara lain:

- a. Menguasai kehidupan berjemaat
- b. Mampu menganalisis persoalan-persoalan jemaat
- c. Mampu menggerakan Jemaat-jemaat dalam pembangunan jemaat.
- d. Mampu membina.

Komponen pimpinan presbiterial, antara lain:

- a. Menguasai kehidupan berjemaat.
- b. Mampu menganalisis persoalan-persoalan jemaat.
- c. Mampu menggerakan dinamika berjemaat.
- d. Mampu, bermutu, dan pembinaan jemaat.



Komponen organisasi gereja, antara lain:

- a. Sistem oganisasi dapat menunjang kepentingan pembangunan jemaat di atas segala kepentingan yang lainnya.
- b. Mengembangkan diri sendiri untuk mencapai taraf pertumbuhan iman dan pengharapan kepada Tuhan.

Komponen wadah oikumenis

 Mobilisasi seluruh warga gereja dalam kesadaran beroikumenis.

Komponen sarana/prasarana.

- a. Pusat informasi dan dokumentasi.
- b. Sentra-sentra pembinaan.
- c. Fasilitas eksperimentasi pembinaan jemaat.
- d. Areal tanah untuk sentra-sentra pembinaan.

Komponen logistik, antara lain:

• Penulisan buku-buku pembinaan.

Komponen dana, antara lain:

- a. perencanaan,
- b. program,
- c. maintenance,
- d. perpustakaan.

2. Program Bidang Pelayanan, Pendidikan, dan Pembangunan

Komponen warga jemaat, antara lain:

a. Paham, tahu, dan mengerti tentang diakonia, serta partisipasi gereja dalam pembangunan.



- b. Paham, tahu, dan mengerti tanggung jawab warga gereja atau jemaat dalam masalah kesehatan, kependudukan, dan pelestarian lingkungan hidup.
- c. Memungkinkan putra-putrinya yang terbaik menjadi input latihan non-formal dan informal. Menopang usaha-usaha konkret di segi pendataan.
- d. Aktif menggalang dana pelayanan, pendidikan, dan pembangunan.

Komponen pejabat gereja, antara lain:

- a. Paham, tahu, dan mengerti tentang diakonia serta partisipasi gereja dalam pembangunan.
- b. Paham, tahu, dan mengerti tentang tanggung jawab warga gereja atau jemaat dalam masalah pelayanan kesehatan, kependudukan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Komponen personalia, antara lain:

- a. Paham, tahu dan mengerti cakupan (aspek kepelbagaian), serta jangkauan (aspek ruang) bidang yang ditugasi.
- b. Terampil dan peka.
- c. Mengenai isu-isu gereja dan masyarakat.
- d. Mampu berefleksi.

Komponen pimpinan sinodal, antara lain:

- a. Terdidik dan berpengalaman.
- b. Mampu berteologia dan berefleksi.
- c. Peka dan terampil.
- d. Berjiwa diaconal-profetis.
- e. Sehat rohani jasmaniah.



Komponen pimpinan klasikal, antara lain:

- a. Terdidik dan berpengalaman.
- b. Mampu berteologia dan berefleksi.
- c. Berjiwa diaconal-profetis.
- d. Sehat rohani-jasmaniah.

Komponen pimpinan presbiterial/jemaat, antara lain:

- a. Terdidik dan berpengalaman.
- b. Mampu berteologia dan berefleksi.
- c. Mampu menerjemahkan itu dalam program berjemaat.
- d. Sehat rohani-jasmaniah.

Komponen organisasi gereja, antara lain:

- a. Sistem organisasi yang menekankan solidaritas yang kritis.
- b. Dapat membuat perencanaan dan mengembangkan diri sendiri untuk menghubung iman dan keadilan.
- c. Komponen wadah oikumenis, antara lain:
- d. Meningkatkan kemampuan menangani diri sendiri dari masalah-masalah yang dihadapi dan tidak bergantung pada orang lain.
- e. Mengembangkan rasa terima kasih, ketaatan, dan ibadah (Rm. 12: 1), demi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan (Mat. 23: 23).

Komponen sarana dan prasarana, antara lain:

- a. pusat latihan motivator/kader tani/kader nelayan,
- b. perpustakaan,
- c. publikasi.

Komponen logistik.

• Literature



Komponen dana, antara lain:

- a. Peningkatan program.
- b. Pengadaan/penambahan sarana-prasarana.
- c. Perpustakaan literatur.

Di samping tujuan perencanaan, komponen, atau faktorfaktor perencanaan yang berlaku bagi semua bidang pelayanan, juga strategi perencanaan.

Memahami medan atau ajang pergumulan GPM dapatlah dikatakan betapa sangat luas dan kompleks. Ajang pergumulan yang luas dan kompleks itu menantang keberadaan GPM, baik hidup, panggilan, serta pelayanannya. Aspek-aspek yang luas dan kompleks itu sangat memerlukan kejelian dan pengkajian secara sistematis maka diperlukan penerapan suatu strategi perencanaan, yang meliputi empat pokok berikut.

- 1. Orientasi konteks.
- 2. Problem pokok (tentang kedua hal ini akan dijelaskan pada BAB V tentang "GPM selayang pandang").
- 3. Perkiraan GPM di masa depan. Dalam hubungan dengan "perkiraan GPM di masa depan", ada beberapa hal pokok, antara lain dengan orientasi konteks dan problem pokok yang dihadapi telah menggambarkan suatu gejala perkembangan/perubahan yang cepat, serta menantang GPM untuk senantiasa dapat memasuki masa depan bangsa dan negara. Pada dasarnya, peran yang perlu diperjuangkan ialah bagaimana mengusahakan, membina, dan memantapkan daya insaniah umat ke arah terwujudnya "ketahanan iman, ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan ilmiah umat gereja". Di samping itu, masalah-masalah lain seperti perubahan sindrom polarisasi ke pola hidup yang kooperatif dan toleransi yang positif. Bagaimana GPM dapat hadir

sebagai suatu sarana dan wahana dalam masyarakat yang memiliki andil dalam membina masalah kesejahteraan umat. Bagaimana GPM dapat turut serta secara tepat guna dalam proses Maluku biru, serta mengembangkan sistem penataan lingkungan hidup. Bagaimana GPM dapat turut serta dalam masalah transmigrasi. Bagaimanaa GPM dapat turut serta secara intensif dalam menumbuhkan kesadaran oikumenis gereja/jemaat, baik tingkat jemaat, klasis, regional, dewan gereja se-Asia dan dewan gereja se-dunia.

Tahap perencanaan. Strategi perencanaan dapat diarahkan 4. secara baik, dirumuskan dua tahap perencanaan dengan tujuan-tujuannya yang jelas pada masing-masing tahap. Tahap pertama adalah "stabilisasi dan mutu" yang akan diperlukan sebagai modal dan titik berangkat untuk tahap yang kedua. Tahap ini berakhir pada tahun 1993. Tahap kedua adalah tahap sesudah tahun 1993 dan merupakan pertumbuhan yang dikendalikan dan dikerahkan pada peningkatan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas dalam usaha menembus segala macam hambatan selama ini yang mengganjal dinamika pertumbuhan gereja ke dunia. Dengan demikian, perencanan sekarang ini adalah perencanaan "stabilisasi dan mutu". Dalam kaitan ini maka lingkungan perencanaan dalam tahap ini sesuai tuntutan perencanaan yang memerlukan dukungan disiplin di dalam pengelolaannya maka lingkup perencanaan, meliputi jangka panjang (10 tahun) dan jangka pendek (2 tahun).



Dunia kita sedang berubah, bahkan berubah dengan cepatnya. Serentak dengan perubahan yang cepat itu, ilmu dan teknologi modern semakin kuat dan luas pengaruhnya, bahkan hampirhampir tidak ada sejengkal wilayah kehidupan manusia ini luput dari pengaruh ilmu dan teknologi modern. Sadar atau tidak, suka atau pun tidak, kita yang hidup di dunia yang berubah ini telah dan sedang berubah bahkan sangat drastis. Walaupun kadang-kadang perubahan menakutkan dan banyak membawa ketidakpastian serta kekhawatiran yang mencemaskan, namun karena begitu drastis arus perubahan, perubahan itu terasa sulit dibendung. Orang banyak mulai merasa cemas dan khawatir kalau-kalau arus perubahan itu labuhkan dirinya di sebuah dermaga yang asing dan baru bahkan yang berbeda dan bertentangan dengan harapannya.

Bukan saja dunia dan kita yang berubah. Gereja dan orang Kristen juga telah dan sedang berubah, malah cenderung mengimbangi perubahan-perubahan yang drastis itu, kalau bukan untuk memengaruhi dan menentukan arah perubahan itu. Perubahan-perubahan itu mungkin saja terjadi ketika gereja dan orang Kristen mengacuhkan realitas perubahan itu atau perubahan itu terjadi ketika gereja dan orang Kristen peka dan serius terhadap kenyataan perubahan yang memang mengitarinya.

Serentak dengan kepekaan dan keseriusan itu berubah pula sikap dan konsepsi gereja dan orang Kristen. Memang ideal-ideal Kristen tidak pernah statis, tetapi sangat dinamis dan kreatif. Dengan kedinamisan itulah gereja atau kekristenan itu berarti dan bermakna di dunia yang berubah itu, walaupun memang perubahan itu akan tetap berlangsung dengan atau tanpa ideal-ideal Kristen atau gereja itu.

Katakanlah, gereja tidak dapat tenang-tenang saja sementara dunia dan manusia yang mempunyai sejarah, mempunyai kebudayaan, mempunayi kemauan dan kehendak itu senantiasa berubah. Dunia dan manusia terhadap mana karya penyelamatan Allah itu diperuntukan bukanlah botol-botol kosong yang mati, tetapi yang mempunyai sejarah, mempunyai kebudayaan, mempunyai kemauan dan kehendak yang sedang berubah. Selain itu, juga misi itu bukanlah air yang mati tetapi justru Allah sendiri, Allah yang hidup dan yang berkarya.

Realitas perubahan yang drastis itu adalah juga realitas yang dihadapi dan dialami oleh GPM dalam melakukan amanat pelayanannya. Perubahan-perubahan keterpanggilan itulah "imperatif" bagi GPM untuk senantiasa memperbarui dan mengaktualkan sikap, konsepsi, tetapi juga pola organisasinya secara terus-menerus. Memang ideal-ideal GPM bukanlah ideal-ideal yang mati dan statis, tetapi selalu hidup dan dinamis serta kreatif. Mengkaji sejarah perjalan panjang Gereja Prostestan Maluku telah mengungkapkan sebetulnya nilai-nilai perjuangan keras dalam memahami keberadaannya sebagai "gereja" sejak ia lahir dari ex Indische Kerk, kemudian bertumbuh dengan kemudaannya, serta tanpa pengorganisasian yang mapan tetapi yang kini dan terus berusaha membenahi seluruh keberadaanya. Untuk menyatakan eksistensi keterpanggilannya secara baru terus-menerus di dalam konteksnya yang majemuk dari periode yang satu dengan kecenderungan ke periode lain, yang juga dengan kecenderungan, entah yang menghambat atau pun yang merupakan kesempatan dan peluang. Suatu realitas sejarah yang tidak dapat diingkari bahwa penghayatan eksistensial GPM telah menempatkannya di dalam pergumulan yang terus-menerus dengan eksistensinya, bergumul dengan persoalan-persoalan keumatan dan kemasyarakatan, juga bersama-sama dengan gereja-gereja lain di Indonesia dan diseluruh dunia bergumul dan berjuang menyatakan eksistensi keterpanggilannya di dalam persoalan-persoalan konkret keumatan dan kemasyarakatan.

Sejak GPM diresmikan pada 6 September 1935, secara administratif terjadi keterpisahan antara GPM dengan pemerintah Belanda. Pada saat itu pula digunakan struktur "presbiterial sinodal" sebagai struktur organisasi GPM. Pada saat itu pula GPM telah melihat betapa pentingnya usaha-usaha pembinaan umat dalam rangka mencapai kedewasaan gereja. Perjalanan terus GPM sejak diresmikan mengalami tantangan hebat, antara lain GPM harus berhadapan dengan situasi politik pemerintah Jepang, di mana gereja ditekan dan dilepaskan untuk menangani kebutuhan hidupnya sendiri, serta menyita seluruh harta milik gereja. Namun, tantangan dan hambatan yang dihadapi telah menempatkan tekad GPM dalam mewujudkan keberadaan GPM dalam aktivitas-aktivitas konkret, seperti dalam pelayanan-pelayan sosial, juga telah memahami pentingnya gerakan oikumene di Indonesia.

Dalam sinode tahun 1953 GPM telah melihat pentingnya masalah pembangunan jemaat sebagai bagian yang penting dalam proses penghayatan eksistensial GPM, selain itu juga dipahami pentingnya peranan pendidikan secara khusus pendidikan teologia. Dalam sinode 1956, GPM telah melihat secara mendasar permasalahan-permasalahan yang menyangkut Pekabaran Injil. Masalah peningkatan ekonomi jemaat. Dalam sinode 1960, dapat

dicatat, antara lain pesan tobat 1960 yang dapat dimengerti sebagai "batu pembatas" untuk pembangunan dan pembaruan GPM ke depan, dengan menekankan pada pengakuan atas kepemimpinan Kristus atas gereja, serta ketaatan kepada Kristus dalam realita firman dan Rohnya untuk pembaruan seluruh keberadaan gereja. Pesan tobat ini kemudian diwujudkan dalam bentuk-bentuknya secara konkret, seperti peningkatan sosial-ekonomi jemaat, penataan perangkat pelayanan gereja, dan lain-lain.

Dalam sinode 1964, dapat dicatat adanya usaha-usaha konkret dari realisasi pesan tobat itu. Dalam sinode 1965, dapat dicatat tentang piagam dasar jawatan pelayanan dan tata pelayanan Gereja Protestan Maluku serta pentinganya keterlibatan gereja dalam revolusi bangsa secara kreatif. Dalam sinode 1968, dapat dicatat misalnya, tata pelayanan gereja protestan maluku yang merupakan suatu dialog antara realita gereja, dunia, dan Tuhan dengan berpijak pada kehadiran gereja sebagai hamba yang menghampakan dirinya. Sinode tahun 1970, dapat dicatat antara lain, dirumuskan peratruran-peraturan gereja dalam rangka pembaruan terhadap jawatan pelayanan gereja. Dalam sinode 1972, dapat dicatat, misalnya Tata Gereja GPM dan peraturan disiplin GPM, juga dirumuskan tentang pemahaman dasar tentang misi. Perhatian GPM dalam berbagai masalah kemasyarakatan seperti pendidikan, generasi muda, kemiskinan, dan lain-lain. Dalam sinode tahun 1974, dapat dicatat antara lain tentang pembaruan gereja dalam kesaksian dan pelayanann yang bersumber pada firman. Di samping itu, juga masalah-masalah seperti dualisme kepercayaan, masalah pengembangan potensi pejabat gereja, serta masalah pengadaan dana.

Dalam sinode tahun 1978, dapat dicatat hal-hal, seperti: panggilan gereja untuk mewujudkan hidup sejahtera, Pola Dasar Organisasi Gereja, Lembaga Pembinaan Jemaat dan masalah persembahan hidup dalam kerangka Misi Gereja. Dalam sinode 1983, antara lain Pola Induk Pelayan dan Rencana Induk Pelayanan, yang sebetulnya mengungkapkan suatu kualitas manusia GPM dengan kadar ketahanan iman, ketahanan ilmiah, dan ketaatan sosial-ekonomi. Setelah mencoba memberikan cuplikan singkat pergumulan GPM di dalam sejarah pergumulannya yang panjang di atas, berikut ini akan dipahami tentang konteks atau ajang pergumulan GPM dalam melakukan panggilan pelayanan serta persoalan-persoalan pokok apa yang dihadapi oleh GPM.

1. GPM Berada pada Konteksnya yang Universal

Konteks ini mengasumsikan pengakuan GPM bahwa ia percaya pada adanya suatu gereja yang kudus dan universal. GPM percaya bahwa persekutuan orang percaya meliputi seluruh umat manusia di segala tempat, yang menembusi dimensi ruang dan waktu, ideologi, serta nilai-nilai budaya. Inilah yang disebut katolisitas atau universalitas gereja. Berdasarkan pengakuan ini, GPM bersama gereja-gereja lain di Indonesia dan di seluruh dunia melakukan amanat keterpanggilannya.

2. Konteks Negara-negara Dunia Ketiga

Konteks ini mau menyatakan suatu transformasi nilai yang luas dan kompleks, baik politik, ekonomi, sosial, kulttural. Konteks ini ditandai oleh apa yang disebut sebagai "peradaban dunia baru". Di mana ilmu dan teknologi modern memainkan peranan yang besar dan luas. Di dalam konteks inilah negara-negara dunia ketiga berusaha mencapai dan menemukan modernitas, serentak dengan itu kesadaran untuk menumbuhkan identitas. Tetapi, konteks ini juga tidak jarang melahirkan akses-akses yang mengancam keberadaan hidup manusia secara dahsyat, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan, pemerkosaan hak-

hak, penyalagunaan kekuasaan, sekularisme, individualisme, konsumerime, dan lain-lain. Memang perkembangan ilmu dan teknologi yang cukup berpengharapan tidak secepat kekhawatiran yang melaju dan menerpa umat manusia. Kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi yang kadang-kadang tidak manusiawi cukup mengkhawatirkan dan mencemaskan. Misalnya, kasus-kasus larangan gereja terhadap percobaan bayi tabung di Australia, dan lain-lain. Secara makro dapat dicatat kemungkinan situasi yang berbahaya atau *dangerous*, dapat disebut, antara lain: bahaya perang nuklir maupun peperangan di kawasan Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Amerika Tengah yang di dalangi maupun melibatkan negara-negara super power. Krisis pangan sebagian terjadi di belahan bumi, terutama Afrika dan negara-negara dunia ketiga lainnya. Di samping itu, malah ada yang memperkirakan secara global sekitar ¾ penduduk dunia diancam kelaparan dan kekurangan gizi, peledakan penduduk, dan krisis energi. Bahkan untuk kasus Afrika sedang dilanda "krisis pengharapan".

3. GPM Berada dalam Konteks Indonesia

Sebagai bagian dari negara-negara dunia ketiga, konteks ini mau menyatakan bahwa Indonesia sedang mencari dan menemukan modernitas dengan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serentak dengan itu kesadaran untuk tetap menumbuhkan identitas. Tetapi, juga konteks ini tidak jarang menemukan akses-akses kemanusiaan yang juga mengancam sebagian manusia, misalnya: kemiskinan, kebodohan, individualime, konsumerisme, dan lain-lain. Sebagai bangsa, kita sedang berada digerbang pelita IV dari rencana tahapan pembangunan dan modernitas itu. Pelita I, II, III dapat disebutkan sebagai tahapan kosolidasi pembangunan kita, sedangkan IV, V, VI mempunyai posisi tersendiri pada tahap berikutnya, di mana pelita

IV diharapkan dapat meletakkan kerangka landasan bagi persiapan lepas landas pada pelita VI. Pelita V hanya kelanjutan dari pelita IV. Menurut rencana pelita IV akan meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri. Pelita VI diharapkan secara ekonomis Indonesia telah lepas landas dari masyarakat agrarian yang tradisional menuju masyarakat industri modern. Sejauh mana Indonesia akan berhasil menciptakan kerangka landasan dan dapat lepas landas, nanti kita lihat. Sebab mungkin saja dapat terjadi Indonesia sudah stabil dan perekonomian, tetapi mungkin belum stabil dalam politik. Di samping itu, konteks ini juga hendak menyatakan konteksnya yang khas. Katakanlah konteks Indonesia yang khas itu "pluralitas", bukan saja secara fisik sebagai sebuah negara kepulauan, tetapi juga etnis-kultural. Kurang lebih ada 300 kelompok etnis dan lebih dari 250 bahasa daerah di Indonesia. Di samping sejumlah agama dan suku, agama besar juga ada di Indonesia, misalnya: Hindu, Budha, Islam, dan Kristen. Pluralitas ini juga tampak secara ekonomi, politik, dan sosial. Secara ekonomi penduduk mencari makan mulai dari berladang, berkebun kecil-kecilan, bersawah dengan irigasi, sampai perkebunan, dan pabrik-pabrik. Secara sosial, penduduk terorganisir mulai dari cara yang sederhana di desa-desa sampai ke struktur yang paling kompleks di kota-kota, terkoordinir dengan sistem yang paling sederhana sampai kepada republik yang modern dengan sistem yang paling sederhana sampai pada sistem yang paling kompleks. Secara politik mulai dari sub-suku, suku sampai kepada republik yang modern dengan sistem yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Secara kultural, Indonesia memiliki orientasi nilai budaya yang paling majemuk. Lapisan pribumi yang masih kuat dengan nilia-nilai budaya pribumi. Lapisan Hindhu dengan orientasi nilai-nilainya, juga Islam dan Kristen masing-masing dengan orientasi nilai-nilainya. Di samping pluralitas yang luar biasa itu, Indonesia juga sebuah negara kesatuan politik dengan Pncasila sebagai dasar negara. Apa pun orang menyatakan tentang Pancasila, namun suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah Pancasila telah berjasa mempertahankan kesatuan Indonesia di dalam pluralitasnya. Itu berarti, pluralitas Indonesia yang telah lama diterima, telah menjadi bagian yang integral dari kesatuan Indonesia ini. Tentu Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah Indonesia yang dicita-citakan adil dan makmur, kuat dan bersatu, cerdas modern, serta Indonesia yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Selain itu, juga Indonesai yang bebas dari ketakutan, Indonesia yang modern, tetapi senantiasa memiliki dan menumbuhkan identitasnya.

4. GPM Berada dalam Konteksnya yang Khas, yaitu Konteks "Maluku"

Sebutan yang tepat untuk konteks ini ialah "kepulauan" dengan sifatnya yang paling menonjol, yaitu "kedesaan". Konteks kepulauan itu tidak hanya menyatakan kondisinya secara fisik/ geografi yang memisahkan pulau yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga secara sosial, ekonomi, kultural yang sebetulnya memperlihatkan kemajemukan yang sangat bervariasi. Secara kultural, memperlihatkan orientasi sistem nilai budaya yang sangat kuat terhadap tradisi dan adat istiadat. Adanya keterikatan lama dengan tanah dan leluhur, ada kecendrungan dualisme kepercayaan yang sangat menonjol. Itu artinya, ketaatan terhadap otoritas adat, tetapi serentak dengan itu ketataan terhadap otoritas Injil. Barangkali itulah sikap ambivalen orang Kristen di Maluku. Di samping itu, dapat dicatat adanya sistem politik yang terorientasi pada emosi kelompok sehingga acap kali terjadi konflik antarnegeri, sub-suku, maupun antaragama, antargereja

dengan pemerintah negeri, dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, barangkali penting untuk disebutkan beberapa problem pokok yang dicanangkan oleh GPM dalam rencana induk pelayanan, yaitu aspek ekonomi, kesehatan dengan titik berat pada kesejahteraan umat seperti sistem ijon yang tidak memungkinkan manusia berkembang seutuhnya sehingga bergantung pada yang kuat. Sistem tersebut turut diakibatkan oleh faktor-faktor yang kurangnya motivasi serta modal keterampilan. Di samping itu, masalah kurangnya kesadaran akan pentingnya gizi/kesehatan. Aspek lingkungan hidup dengan titik berat pada ekologi yang meliputi masalah-masalah, seperti, destruksi lingkungan hidup di darat maupun di laut, terdesaknya nelayan tradisional juga mengenai kebudidayaan kelautan. Aspek ke-esaan dengan titik berat pada gerakan oikumenis. Masalah emosi keperasaan, kampung-isme, faktor pulauisme yang lompok, dapat menimbulkan perpecahan. Masalah keesaan jemaat yang ditunjang oleh paham eklesiologi yang sempit. Penataan hidup secara presbiterial yang berada dalam gejala presbiterialisme di mana pemerintahan gereja lebih bertumpu pada presbiter. Selain itu, masalah pembentukan Gereja Kristen yang esa di Indonesia adalah SR X di Ambon, di mana GPM ditantang untuk mengubah dan memperbarui komitmen oikumenisnya di tingkat jemaatjemaat lokal dalam ikatan sinodal maupun dalam kerja sama yang dinamis dengan gereja-gereja sewilayah (DGI dan Non-PGI). Aspek demografi dengan titik berat pada kependudukan, misalnya meningkatnya mobilitas penduduk dari daerah lain di Indonesia ke Maluku, arus transmigrasi nasional yang teratur dan berencana. Sementara, aspek penunjang dengan titik berat pada aparat logistik. Di sini yang dihadapi GPM ialah masalah mutu dan jumlah pejabat gereja dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang serba dinamis, masalah tidak luasnya struktur pelayanan gereja dan jemaat, dan masalah lemah/kurangnya segi logistik pelayanan gereja. Konteks Maluku yang bersifat kedesaan itu menyatakan sekurang-kurangnya tiga pengertian berikut.

- a. Desa merupakan tempat di mana berlangsungnya gumulangumulan hidup yang konkret yang dapat dicandra sebagai suatu situasi kemanusiaan yang mengandung relasi-relasi dan kondisi-kondisi alamiah dan manusiawi. Kelompok manusia di tempat tertentu itu memiliki masa lampau dan masa depan tertentu, tradisi, dan ekspetasi tertentu pula.
- b. Di dalam situasi kemanusiaan tertentu di tempat tertentu itu dapat ditemui pula nilai-nilai, nuansa, kondisi, tata ruang, tata hidup, norma dan pandangan hidup, sikap dan perilaku, peran dan sentimen, dan sebagainya. Jadi, situasi kemanusiaan itu selain merupakan suatu lingkungan hidup yang dirupakan oleh komponen-komponen fisik, juga dirupakan oleh komponen nilai-nilai.
- c. Di tempat itu sedang berlangsung transformasi nilai (Davidz, 1980, p. 4-5).

5. GPM Berada dalam Konteks Pengaruh Badan-badan Zending dan Para Pekabar Injil dari Barat yang Mengambil Bentuknya di Tengah-tengan Medan

Pengaruh-pengaruh yang tak terelakan dari realisme politik, ekonomi, sosial, budaya dari sejarah zaman itu dan yang telah turut menempa corak keumatan gereja dan struktur kelembagaan gereja tertentu pula. Itulah medan atau ajang pergumulan GPM yang sangat lebar dan luas. Ajang pergumulan itu mendorong dan memotivasi GPM untuk secara jeli memahami problemproble pokok yang menantang kehadiran GPM serta yang dapat menjadi hambatan, tetapi juga peluang bagi tugas panggilannya dan acuan kehidupan. Medan gumul yang majemuk itu senantiasa

menjadi pengkajian-pengkajian strategis dalam perencanaan-perencanaannya. Namun, satu hal, GPM dalam menyatakan tugas panggilannya itu senantiasa dan tetap percaya bahwa Roh Kudus senantiasa tetap hadir untuk memimpin gerejannya di sepanjang sejarah perjalanannya.





BEBERAPA CATATAN ANALISIS DAN EVALUASI

Meniti, mengkaji, dan memahami serangkaian pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, dapatlah diberikan beberapa catatan analisis dan evaluasi sebagai usaha menjawab tujuan penulisan buku ini, yaitu: "memahami, menganalisis, dan mengevaluasi struktur organisasi GPM dalam rangka pelaksanaan misi dewasa ini."

- 1. Sejak Gereja Protestan Maluku diresmikan dan diproklamirkan pada 6 September 1935, sejak saat itu pula telah ditegaskan dan dipergunakan struktur (presbiterial sinodal) sebagai struktur organisasi GPM. Di mana secara hakiki struktur ini bertolak dari kemimpinan majelis jemaat. Struktur ini secara tegas dibedakan dari struktur secara episkopal, juga dibedakan dari kepemimpinan kerkbestuur. Dalam struktur atau pola organisasi GPM seperti yang dimaksudkan pada ketetapan sinode No. 1 Tahun 1978 juncto Ketetatapan Sinode No 2 Tahun 1983, secara hakiki struktur presbiterial sinodal itu telah ditegaskan ulang dengan berdasar pada essensialia-essensialia berikut.
 - a. Sederhana, artinya hierarki dan fungsi kepemimpinan gereja tetap bertumpu pada perwujudan asas pres-

biterial sinodal dengan garis-garis kerja (garis komando, garis hubungan fungsional, garis staf, dan garis koordinasi) yang jelas.

b. Prinsip presbiterial sinodal diarahkan secara dinamis dan efektif dalam wujud pelembagaan fungsi legislatif tertinggi (sinode sebagai pembuat peraturan pokok gereja) dan fungsi *legislative organic* (BPL sebagai pembuat peraturan organik gereja dalam rangka penjabaran atas keputusan sinode).

Terhadap struktur presbiterial sinodal, maka persoalan yang harus dikaji ialah apakah memang struktur presbiterial sinodal itu tepat bagi gereja, serta apakah memang struktur presbiterial sinodal itu telah memiliki ciri atau watak presbiterial sinodal. Secara metodis, persoalan di atas tadi perlu dijawab dengan pertama-tama memahami apakah watak atau ciri struktur presbiterial sinodal serta sejauh mana keabsahan struktur presbiterial sinodal itu dalam kaitannya dengan pengertian gereja yang secara hakiki menerima dan mengakui pemerintahan gereja itu pada pemerintahan Kristus atau "Kristus sentris".

Secara sosio-politik, kontribusi presbiterial sinodal itu lahir di dalam suatu perkembangan politik liberal masyarakat barat sekitar tahun 1848, di mana pada saat itu telah terjadi perkembangan demokrasi politik yang sangat liberal. Dalam konstelasi politik itu, gereja mencoba menampakkan suasana demokratis di dalam kehidupan gereja. Sinodal dalam artian persidangan sinode, misalnya merupakan refleksi dari ide demokrasi yang diperkenalkan oleh parlemen di dalam pemerintah *civil* ke dalam kehidupan dan pemerintahan gereja. Dalam kaitan itulah karakteristik atau watak

konstitusi ini menekankan adanya suatu prinsip pemisahan kekuasaan secara legislatif dan kekuasaan secara eksekutif dari administrasi kegerejaan, (misalnya, sinode, legislatif, dan BPH itu eksekutif). Di samping itu, konstitusi ini sangat menekankan suatu konstitusi hukum dari gereja yang senantiasa menjamin "kebenaran" dari komunitas orangorang percaya atau gereja.

Struktur ini dibangun dengan berdasar pada suatu hierarki dewan-dewan yang berdasar pada jemaat. Jemaat atau umat itulah yang merupakan dasar dari gereja dan merupakan wujud nyata dari komunitas gereja ituserta menjadi tempat di mana firman Allah diproklamasikan dan sakramen dilayani. Jemaat atau umat itu diatur oleh suatu dewan presbiter yang mendapat mandat dari jemaat. Dewan presbiter itu tidak memiliki kekuasaan yang intrinsik dalam dirinya. Dikatakan tipe ini demokratis dari episkopalian oleh karena jemaatlah atau umatlah merupakan "dasar" yang mendelegasikan mandat kepada presbiter itu, yang menentukan status hierarki. Namun, ini tidak sama sekali berarti dewan presbiter itu tidak memiliki independensi secara internal dalam tugasnya sebagai katakanlah mandataris seorang presbiter itu juga memiliki otoritas spiritual yang kadang-kadang sangat luar biasa.

Dengan pemahaman singkat di atas, dapat ditarik beberapa ciri presbiterial sinodal sebagai berikut. Adanya hierarki status, yang berarti adanya hierarki otoritas secara yuridis – formal, serta adanya fungsionalisasi kekuasaan secara eksekutif dan legislatif.

a. Adanya konstitusi hukum dari gereja yang menjamin kewibawaan dan kebenaran komunitas orang percaya.

- Jemaat dipimpin oleh suatu dewan presbiter. Dewan presbiter ini melaksanakan mandat yang diberikan oleh jemaat. Jemaat atau umatlah yang menentukan ototritas. Umat atau jemaat itu adalah dasar dari pemerintahan kepemimpinan gereja.
- c. Adanya fungsionalisasi kepengurusan, yang berarti dewan eksekutif (persbiter) yang menjalankan mandat itu mempunyai tenggang waktu kepengurusan.

Ciri atau watak kepemimpinan dan pemerintahan gereja yang demokratis di mana "umat atau jemaat" itulah yang menentukan, maka persoalan serius yang dihadapi ialah bagaimana watak atau ciri demokratis itu diperhadapkan dengan kenyataan bahwa secara hakiki pemerintahan gereja itu bukan pada umat. Apakah dengan demikian konstitusi presbiterial sinodal itu harus ditolak? Hal ini tentu membutuhkan pengkajian yang memadai.

Secara hakiki, keistimewaan gereja itu justru terletak pada relasi yang istimewa dengan Kristus. Apabila gereja itu tubuh Kristus, berarti gereja tidak dapat berdiri tanpa Kristus, gereja bergantung pada Kristus. Dengan perkataan lain, apa yang ada pada Kristus dan gereja dipertahankan dan dipelihara oleh Yesus Kristus. Itu artinya, Kristuslah yang berkuasa dan memerintah atas gereja. Gereja itu dibenarkan dan dikuduskan karena anugerah Allah. Dalam hubungan itu, gereja itu dihubungkan kepada Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, secara hakiki di dalam gereja tidak ada pemerintahan pelayan atau umat, yang senantiasa ada ialah pemerintahan Kristus dan Roh-Nya. Otoritas Kristuslah yang harus berlaku atas dan di dalam gereja. Yesus Kristus dan Roh-Nya memberikan kuasa kepada gereja dalam rangka melakukan fungsi dan peranannya.

Bertolak dari pemahaman eklesiologi di atas, rasanya cukup beralasan untuk menolak watak demokrasi dari presbiterial sinodal itu. Tetapi, barangkali dapat ditempuh alternatif untuk paling tidak dapat menjembatani kesenjangan itu. Alternatif yang dimaksudkan ialah dimensi atau watak demokratis itu dipahami sebagai watak "tanggung jawab" dan kewajiban "umat" (individu dan kolektif) dalam kehidupan dan pemerintahan gereja. Tanggung jawab dan kewajiban gereja umat mempunyai tempat dalam kepemimpinan dan pemerintahan gereja yang Kristus sentris, yang dimaksudkan ialah sebagai tubuh Kristus maka umat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam rangka pembangunan tubuh Kristus itu. Kenyataan ini mengasumsikan bahwa gereja sebagai kolektif dan individu tidak hanya dikuduskan dan diselamatkan, tetapi juga punya kewajiban dan tanggung jawab dalam pembangunan gereja.

Dalam hubungan ini maka persoalan yang dihadapi ialah sejauh mana umat itu mempunyai peluang dan kesempatan untuk menyatakan tanggung jawab dan kewajibannya. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan pemahaman terhadap otoritas pelayan atau katakanlah presbiter itu. Hemat penulis, gereja sebagai komunitas orang percaya tidak hanya terikat kepada Kristus, tetapi juga terikat pada tradisi gereja. Terikat dengan tradisi yang bersifat otoritas. Katakanlah itu tradisi kerasulan sebagai kekuatan yang mampu mengoranisir, tetapi senantiasa tetap berpusat pada Allah dan yang diperoleh berdasarkan tradisi. Itu berarti, secara hakiki otoritas pelayanan presbiter secara keharusan mesti fungsional. Itu artinya, kewibawaan otoritas itu mempunyai fungsi untuk menyalurkan tanggung jawab dan keajiban umat itu. Itu artinya, kewibawaan otoritas tidaklah

menempatkan manusia dalam posisi superior di atas manusia lain, tetapi justru kewibawaan itu harus memanifestasikan pemerintahan Kristus dan Roh Kristus di dalam jemaat, serta mempunyai fungsi sedemikian rupa untuk memungkinkan umat berpartisipasi. Atau bila memungkinkan umat itu dapat menyalurkan karunia-karunia mereka sebagai anggota tubuh dalam rangka pembangunan tubuh itu sendiri.

Dalam hubungan ini, sejauh mana pelayanan atau presbiter itu memiliki kualitas dalam rangka memberikan kemungkinan bagi partisipasi itu. Sebab dapat saja terjadi pelayanan itu tidak memiliki kualitas bagi partisipasi. Dengan perkataan lain, partisipasi itu dapat saja terhambat oleh pelayanan atau presbiter yang tidak memiliki kualitas. Dengan perkataan lain, secara praktis mau dikatakan sejauh mana persyaratan bagi pelayanan itu. Sebab mungkin saja seorang yang dipilih menjadi pelayan karena mungkin ia dapat berdoa dengan baik, atau mungkin ia mempunyai status sosial yang lumayan atau karena ia masuk keluarga pendeta, dan lain-lain.

Bertolak dari pemahaman baik dari dimensi kewajiban dan tanggung jawab serta dimensi fungsi dan kedudukan otoritas di atas, dapatlah dikatakan bahwa secara ideal, baik tanggung jawab dan kewajiban umat maupun otoritas mempunyai tempat di dalam prinsip Kristus Sentris dalam pemerintahan dan kepemimpinan gereja. Itu berarti, konstitusi presbiterial sinodal sebetulnya tidak meniadakan atau menghilangkan otorits Kristus dan Roh-Nya di dalam pemerintahan dan kepemimpinan gereja. Namun, harus selalu disadari dan diingat bahwa kuasa otoritas dan tanggung jawab yang sangat ditekankan akan mematikan,

meniadakan otoritas dan kewibawaan Kristus dan Roh-Nya di dalam pemerintahan dan kepemimpinan gereja itu.

Bagaimana dengan kasus konstitusi presbiterial sinodal pada Gereja Protestan Maluku. Apakah memang ciri atau watak konstitusi presbiterial sinodal itu telah inheren pada struktur oraganisasi GPM? Apabila dipahami ciri atau watak konstitusi presbiterial di atas dan dikonfrontasikan dengan struktur organisasi GPM, dapat dicatat beberapa indikator berikut.

- Adanya hierarki status, yang berarti adanya hierarki otoritas secara yuridis yang dikoodinasikan secara tertulis. Misalnya, hierarki otoritas kepemimpinan pada fungsi, kedudukan, dan tugas pokok di tingkat sinodal, tingkat klasis, maupun tingkat jemaat. Adanya fungsionalisasi kekuasaan secara eksekutif dan legislatif. Misalnya, persidangan Jemaat legislatif dan Majelis Jemaat eksekutif, atau sinode legislatif dan badan pekerja harian eksekutif.
- Adanya konstitusi hukum dari gereja yang menjamin kewibawaan dan kebenaran komunitas orang percaya.
 Misalnya, Tata Gereja, peraturan jemaat, peraturan disiplin, dan lain-lain.
- c. Jemaat dipimpin oleh suatu dewan presbiter. Dewan presbiter ini melaksanakan mandat yang diberikan olehj. Itu berarti jemaatlah yang menentukan otoritas. Misalnya, pada peraturan pemilihan Majelis Jemaat atau pemilihan badan pekerja harian sinode. Di mana mengungkapkan tanggung jawab dan kewajiban jemaat itu secara demokratis (untuk contoh, lih. hlm. 36-43 tentang peraturan pemilihan Majelis Jemaat, pada peraturan-peraturan GPM).

d. Adanya fungsioalisasi kepengurusan, yang berarti dewan presbiter yang menjalankan mandat mempunyai batas waktu kepengurusan. Misalnya, tentang batas waktu kepemimpinan Majelis Jemaat. Kepemimpinan sinode yang telah ditegaskan sejak sinode ke-XXIX di mana sinode secara regular terjadi 4 tahun sekali, di samping kemungkinan penyelenggaraan sinode luar biasa sewaktu-waktu.

Dengan memberikan beberapa indikasi secara singkat di atas, dapat dikatakan bahwa watak atau ciri konstitusi presbiterial sinodal itu telah inheren pada struktur organisasi GPM. Jika demikian, salah satu persoalan serius yang dihadapi ialah sejauh mana pengaruh konstitusi itu bagi konteks GPM atau sebaliknya. Konteks yang dimaksudkan ialah konteks kultural, seperti nilai-nilai *paternalism* dan nilai-nilai emosi kelompok yang sangat kuat memainkan pengaruhnya.

Di sini yang dimaksudkan dengan sikap *paternalism*, yaitu sikap yang menganggap pemimpin itu seorang bapak. Sebagai seorang bapak, ia menjadi tempat berlindung dan ia menentukan segala-galanya. Sebutan bapak pendeta misalnya, ada manifestasi dari sikap yang *paternalism* itu. Di samping meniumbulkan sikap positif, sebutan bapak ini juga ada bahayanya, misalnya menganggap seorang pendeta itu sebagai bapak maka ia sudah menganggap kesalahannya dimaafkan, sebab seorang bapak itu merupakan keluarganya sendiri.

Dalam konteks GPM, sikap yang *paternalism* ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Jemaat atau umat melihat dan menganggap bapak pendeta serta Majelis Jemaat itu sebagai orang-orang yang tahu segala-galanya dan yang

harus melaksanakan segala-galanya. Apa yang dikatakan, itulah yang benar. Hemat penulis, sikap semacam ini banyak memperlemahkan tanggung jawab dan kewajiban anggota jemaat dalam kehidupan bergeraja. Apabila tidak disadari oleh presbiter, sikap paternalistis ini juga dapat membentuk dan mengoordinasi presbiter sedemikian rupa sehingga dapat saja melahirkan gejala presbiterialisme dalam pemerintahan gereja, di mana segala sesuatu itu bertumpu pada presbiter, yang tentunya mengemban tanggung jawab dan partisipasi umat dalam hidup bergereja. Gejala presbiterialisme ini juga diakibatkan karena tidak jelas atau dipersempitkannya pengertian mengenai konstitusi presbiterial sinodal itu. Itulah sebabnya, mengapa gejala presbiterialisme ini oleh GPM dilihat sebagai salah satu problem pokok yang dihadapi.

Gejala presbiterialisme ini mungkin dapat teratasi dengan memberikan pengertian yang jelas dan luas tentang konstitusi presbiterial sinodal itu bagi presbiter. Di mana baik fungsi, hierarki, dan kepemimpinan gereja secara keharusan mesti bertumpuh pada asas presbiterial sinodal itu. Namun, persoalannya sejauh mana konstitusi itu mampu menembusi sikap yang paternalistis daripada jemaat. Karenanya, paling tidak nilai-nilai sikap paternalistisi itu telah menjadi bagian dari orientasi secara kultural. Itu berarti, tidak dapat, tidak konstitusi presbiterial itu diperhadapkan dengan persoalan secara kultural. Dalam hubungan itulah, pertanyaan yang muncul, sejauh mana daya tembus konstitusi presbiterial sinodal (yang notabene barang impor) itu mampu menembus kultur dan struktur manusia Maluku?

Persoalan yang sama juga mengenai "emosi kelompok". Tidak dapat diingkari bahwa emosi kelompok, kampungisme, sub-suku-isme telah menjadi persoalan secara kultural. Persoalan-persoalan kultural ini banyak sekali menghambat watak atau karakteristik konstitusi presbiterial sinodal. Misalnya, dalam pemilihan Majelis Jemaat, atau pemilihan sinode. Bukankah dapat terjadi bentrokan kepentingan dengan idialisme-idialisme yang terselubung sebagai akibat dari begitu dominannya emosi kelompok itu. Dengan demikian, pertanyaan mendasarnya, sejauh mana daya tembus konstitusi itu bagi persoalan-persoalan kultural menyata, ataukah mungkin terjadi persoalan-persoalan kultural itu lebih kuat dari daya tembus konstitusi itu?

2. Setiap organisasi atau struktur organisasi keagamaan secara keharusan mesti memiliki "kualitas" dan karakteristik yang khas. Kualitas atau karakteristik itulah yang membedakan struktur organisasi atau organisasi itu dengan oraganisasi sosial yang lainnya. Dimensi "spiritual atau transendental" merupakan kualitas atau karakteristik, serta secara keharusan mesti menjadi presuposisi yang mendasari, baik fungsi kegiatan ataupun prosedur-prosedur atau struktur organisasi itu. Dengan perkataan lain, baik fungsi, kegiatan atau pun struktur organisasi itu harus dibangun berdasarkan presuposisi atau kualitas. Katakanlah struktur organisasi keagamaan itu tidak dapat berdiri netral atau bebas nilai dari presuposisi spiritual atau teologis. Begitu juga dengan struktur organisai gereja sebagai suatu struktur organisasi keagamaan. Struktur itu tidak boleh, tidak harus mengenakan kualitas atau presuposisi spiritual atau teologis. Persoalannya, apakah persuposisi spiritual atau teologis itu?

Di depan (BAB III) telah dijelaskan secara singkat mengenai apakah presuposisi teologis itu, yang secara keharusan mesti menjadi presuposisi bagi struktur organisasi gereja. Secara simplifikasi, dapat dikatakan bahwa kualitas atau presuposisi spiritual atau teologis itu pada dasarnya menekankan tentang suatu realitas kualitas struktur gereja yang senantiasa dan tetap berada dalam realitas membantu dan menolong gereja menjadi gereja yang benar, menjadi gereja yang tetap memiliki kualitasnya, yaitu "kebenaran", serta yang senantiasa fungsional dalam misi dan pelayanannya. Struktur gereja itu harus senantiasa terusmenerus menjadi struktur yang memelihara komunitas, membangun umat, menopang kesaksian, serta menyatakan pelayanan, maka struktur itu sangat dinamis dan kreatif.

Hemat penulis, kualitas struktur yang dinamis dan kreatif menjadi presuposisi sebagai yang demikian di atas, akan mempunyai daya tembus yang mampu memengaruhi baik individu (anggota jemaat) maupun organisasi itu sendiri terhadap pranata-pranata lain di dalam masyarakat atau terhadap lingkungan, baik manusia maupun alamiah di mana organisasi itu berada. Katakanlah kualitas struktur itu mempunyai daya yang "mentransformasikan" nilai-nilai baik manusia atau alamiah.

Terhadap individu (anggota jemaat) kualitas struktur itu akan menjadi faktor motivasi yang mampu menstimulasi anggota jemaat untuk menjadi anggota jemaat yang "benar" sekaligus mampu mendorong dan mengarahkan untuk melakukan partisipasinya dalam kehidupan bergereja dalam semua bidang pelayanan. Itu berarti, kualitas kepribadian dan moral anggota jemaat itu. Sebab kemungkinan yang dapat saja timbul ialah terjadi "krisis kualitas", sebagai akibat dari kurang kuatnya atau tidak ada sama sekali daya yang dinamis dan kreatif dari kualitas struktur itu untuk menstimulasi, menopang, serta membangun dan menciptakan serta mengarahkan moral dan kepribadian anggota jemaat itu. Misalnya,



terjadi krisis pengabdian dalam kehidupan bergerja, dan lainlain.

Secara fungsional, kualitas spiritual dari struktur itu harus mampu mentransformasikan nilai-nilai manusiawi dan alamiah yang mungkin saja menghambat kualitas manusia itu menjadi manusia yang memiliki kualitas kebenaran, serta yang mendorong dan membangunkannya menjadi manusia yang kreatif dan dinamis. Bukan saja bagi individu atau manusia, tetapi juga bagi organisasi itu sendiri. Bagaimana gereja sebagai suatu institusi yang bersikap positif bagi dunia dan pranata-pranata sosial, serta konteks permasalahan yang aktual, sejauh mana kualitas struktur itu menopang institusi gereja itu untuk senantiasa dan tetap menjadi "gereja yang benar".

Sejauh mana sebagai suatu institusi yang memengaruhi dunia dengan ideal-idealnya itu tetap menyandang kualitas kebenaran. Sebagai suatu institusi gereja itu hadir dan berada di dalam dunia. Namun, ia tidak dapat hidup hanya dengan prinsip-prinsip dunia ini, ia tidak boleh larut dalam prinsip dunia itu. Tetapi, ia sebagai institusi secara keharusan mesti mempertahankan kualitasnya, menjadi institusi yang benar. Sebab dapat saja terjadi, gereja mungkin sebagai yang telah mempertahankan kualitasnya, tetapi sebaliknya justru pengaruh-pengaruh dunia itulah yang dominan. Atau pula dapat dikatakan kecendrungan institusional itu lebih diutamakan dalam mengimbangi dan memengaruhi dunia daripada keharusan mewujudkan kualitas gereja itu. Apabila kecendrungan-kecendrungan ini terjadi, itu berarti ia telah kehilangan kualitasnya. Itu berarti, ia akan kehilangan kesempatan untuk menyatakan identitas dan eksistensinya secara hakiki di dalam dunia dengan pranata-

pranata yang kompleks. Misalnya, sebagai suatu pranata yang mempunyai kontribusi secara sosial dapat menyuarakan tentang ketidakadilan, memprotes tentang penyalahgunaan kekuasaan, menciptakan stabilitas sosial, memperjuangkan persatuan bangsa. Padahal di dalam institusi gereja itu sendiri ada ketidakadilan, penyalagunaan kekuasaan, ada perpecahan, ada bentrokan kepentingan karena idialismeidialisme yang terselubung. Kenyataan-kenyataan ini menurut hemat penulis, gereja harus tetap memengaruhi dunia dan masyarakat, meskipun pengaruh-pengaruh itu bukanlah pengaruh religius atau kualitas gereja itutetapi hanya pengaruh kekuasaan sekuler institusional di dalam pakaian religius. Gereja membantu memperkecil dan mengatasi kesulitan serta permasalahan sosial yang nyata, gereja juga membantu melindungi struktur sosial dilestarikan di dalam kehidupan institusi gereja. Itu berarti, ia telah berkesempatan menyatakan kualitas kebenaran itu.

Dalam kasus struktur organisasi GPM, dapat dicatat beberapa indikator sebagai berikut.

a. Keharusan mempertahankan kualitas gereja sebagai gereja yang benar, bukan suatu pemikiran baru bagi GPM. Tetapi, sejak sinode 1968, berkenan dengan dikeluarkannya tata pelayanan Gereja Protestan Maluku, yang merupakan sesuatu dialog konfensional pada realitas gereja, realitas kepemimpinan Tuhan, dan realitas dunia dengan bertitik tolak dari pola kehadiran gereja sebagai hamba yang melayani dan menghambakan dirinya. Dikatakan bahwa secara keharusan, kehadiran gereja di tengah-tengah dunia adalah kehadiran yang membebaskan dan menyelamatkan dan bila perlu harus menyangkali kelembagaannya. Juga diungkapkan,



tentang usaha untuk membebaskan kecenderungan introversi GPM.

- b. Dalam salah satu esensilia (9) dikatakan; adanya kesatuan arah komando, dalam rangka penyederhanaan pengertian bahwa di lingkungan GPM, hanya ada satu garis haluan gereja, yang harus diwujudkan baik secara fungsional pada pelbagai bidang pelayanan dan ditaati pada semua hierarki di tingkat sinode, kalsis, dan jemaat. Hal ini akan membantu penyeragaman kebijakan yang menyangkut hal-hal seperti:
 - 1) Perwujudan kehadiran dan kewibawaan gereja dalam segala aspeknya yang nyata.
 - Tugas pengembangan pengakuan iman yang Injili dan sejalan dengan itu memberikan amanat kepada seluruh gereja mengenai pelaksanaan pelayanan gereja pada pelbagai bidang.
- c. Memahami komponen-komponen perencanaan seperti yang dikatakan di depan (BAB IV) di mana ada keterkaitan fungsional antara komponen yang satu dengan yang lainnya, termasuk di dalamnya komponen organisasi gereja. Dari kedua contoh bidang perencanaan dengan komponen-komponen perencanaan itu, khususnya tentang komponen organisasi gereja dikatakan:
 - 1) Sistem organisasi dapat menunjang kepentingan pembangunan jemaat di atas segala kepentingan yang lain, Mengembangkan diri sendiri untuk mencapai taraf pertumbuhan iman dan pengharapan kepada Tuhan.
 - 2) Sistem organisasi yang menekankan solidaritas yang kritis serta dapat membuat perencanaan dan



mengembangkan diri sendiri untuk penghubung iman dan keadilan (lih. BAB IV, p. 75-77).

Dengan mencoba memberikan beberapa indikator di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara ideal, ada komitmen sikap GPM untuk tetap dan senantiasa memperjuangkan secara gigih "kualitas institusi gereja". Itu berarti, secara ideal struktur organisasi GPM benar, menjadikan gereja mempunyai kualitas, yaitu "kebenaran" serta memberikan amanat kepada seluruh gereja tentang pelaksanaan pelayanan gereja, struktur gereja senantiasa diarahkan dalam rangka perwujudan kehadiran dan kewibawaan gereja dalam segala aspeknya. Secara ideal konsepsional, GPM telah melihat pentingnya kualitas struktur atau organisasi gereja itu diberlakukan secara fungsional sebagai komponen perencanaan, yang secara fungsional mempunyai kaitan dengan komponen-komponen perencnaan yang lain.

Untuk itu, terhadap interpretasi di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai pertimbangan pokok, yaitu sebagai berikut.

a. Secara praktis, komitmen kualitas struktur itu dapat terlambat karena kecenderungannya institutional yang terlalu kuat. Misalnya, tingkat formalisasi yang terlalu kuat dan mapan, di mana tujuan secara institusional itu menjadi sangat steril, orang akan terikat pada tindakantindakan institusional, ketimbang komitmen terhadap kualitas institusi gereja itu. Dalam konteks pikiran ini, perlu ditekankan bahwa, penulis tidak menolak formalisasi, tetapi yang ditolak ialah tingkat formalisasi yang sangat ketat dan kuat sehingga tidak ada "ruang" lagi bagi "kualitas" institusi itu berperan. Katakanlah

sisanya, ketaatan dan kemapanan institusional atau formalisasi yang terlalu kuat dapat saja menghambat peranan Roh Kudus yang secara bebas bekerja di dalam institusi, misalnya, dalam mutasi atau penempatan pejabat (pendeta). Dalam kasus semacam ini, mungkin saja akan terjadi bahaya di mana aspek kualitas institusi atau struktur itu terabaikan hanya untuk menjaga tujuan-tujuan secara institusional tidak terganggu dan mengalami konflik-konflik institusional. Tepatnya bagaimana keputusan institusi mengenai mutasi itu tetap menjaga dan memelihara kualitas institusi gereja.

Dalam kasus GPM, penulis melihat dan merasakan adanya gejala kemapanan dan tingkat formalisasi yang sangat ketat. Di mana tujuan-tujuan institusional cenderung menjadi steril sehingga orang akan terikat ketentuan-ketentuan secara institusional. dengan Keanggotaan di dalam gereja, lebih banyak diperhitungkan sebagai orang-orang yang terikat secara struktural, ketimbang aspek-aspek moral, psikologis dan kehidupan ibadah bersama. Orang melakukan tanggung jawab dan kewajibannya dalam kehidupan bergereja hanya karena desakan dan tuntutan struktural, bukan karena ditopang dan dimotivasi oleh kualitas institusi gereja itu. Misalnya, tentang unit-unit pelayanan dalam jemaat. Orang atau anggota jemaat yang datang ke unit bukan karena ia mempunyai motivasi yang didorong dan ditopang oleh kualitas struktur, tetapi lebih banyak karena desakan dan tuntutan struktural. Dalam kasus semacam ini maka efisiensi dan efektivits unit itu menjadi tidak efektif dan efisien.

h.

Secara praktik pula kualitas struktur institusi gereja itu dapat saja terancam, karena faktor manusia yang mengelola struktur itu. Faktor manusia memang salah satu faktor penting dalam memberlakukan secara nyata kualitas struktur. Sebab mungkin saja terjadi struktur itu sendiri telah memiliki kualitas dalam pelayanan dan pengabdian di dalam pelayanan kehidupan bergereja, tetapi manusialah yang menghambatnya di tengah jalan. Dalam kasus semacam ini mungkin saja diakibatkan karena daya tembus kualitas struktur hukum itu kurang kuat atau sama sekali tidak kuat memengaruhi serta menstimulasi moral dan kepribadian manusia, baik secara individu maupun kolektif. Kualitas itu tidak mempunyai daya yang dinamis dan kreatif untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai manusiawi di dalam struktur. Jika demikian, kualitas itu perlu perbarui ulang secara memadai. Dalam kaitannya dengan faktor manusiawi ini, tentu tidak dapat dilepaskan dari kualitas manusia itu sendiri yang sebetulnya terkandung nilainilai budaya, harapan-harapan, dan cita-cita tertentu. Itu berarti, paling tidak membangun suatu kualitas struktur itu, tentu tidak dapat lepas dari pemikiranpemikiran mengenai aspek-aspek yang disebutkan. Dalam kasus GPM misalnya, tentang nilai-nilai emosi kelompok, kampungisme, dan lain-lain sebetulnya telah menghasilkan suatu kepribadian tertentu, yang pada akhirnya melahirkan suatu kualitas sikap tertentu. Persoalan seriusnya, bagaimana dan sejauh mana dampak kualitas struktur itu bagi nilai-nilai manusiawi itu. Semua ini membutuhkan pemikiran-pemikiran yang sangat memadai dan terarah.

c.

Dalam catatan evaluasi ketiga ini, diarahkan pada sejauh mana kemampuan pengelolaan struktur yang ada di GPM dalam kaitannya dengan rencana induk pelayanan. Sejenak memahami RIP GPM, penulis melihat suatu jangkauan yang sangat jauh dengan suatu kerangka pikiran managemen yang sangat terarah, dengan suatu pendekatan sistem yang secara keharusan mesti fungsional. Misalnya, dalam perencanaan, telah dipikirkan dan dikonkretkan berbagai faktor atau komponen perencanaan secara fungsional dalam suatu kesatuan sistem. Itu berarti, apabila salah satu komponen tidak fungsional akan mengakibatkan keseluruhan komponen itu menjadi terganggu. Itu berarti sistem itu akan mengalami ketidakseimbangan. Dalam hubungan ini, penulis melihat, misalnya komponen pejabat gereja sebagai pengelola struktur. Apakah memang ia sudah siap dan disiapkan agar fungsional melakukan peran yang dimintakan. Sadar atau tidak, suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa GPM masih harus jauh sekali mempersiapkan kualitas manusia-manusia pengelola struktur yang mempunyai kualitas yang memadai, bukan saja secara kuantitas. Sebab bagaimanapun juga perang yang dimainkan oleh manusia-manusia pengelola struktur membutuhkan kualitas dalam berbagai spek, ilmiah, iman, dan lainlain. Kualitas itu bukah hanya mempunyai dedikasi yang tinggi dan selalu taat terhadap tuntutan struktural, tetapi juga mempunyai kualitas kepekaan terhadap transformasi nilai-nilai, mempunyai kualitas intelektual, dan lain-lain. Dalam hal ini, penulis melihat suatu tantangan besar yang dihadapi GPM, terutama di tingkat



jemaat. Kenyataan semacam di atas menjadi tantangan dalam perencanaan bidang-bidang pelayanan gereja. Sebab apabila salah satu komponen perencanaan tidak fungsional, komponen-komponen yang lain pun akan mengalami ketidak-seimbangan dan tentu akan menghambat tujuan-tujuan perencanaan yang akan di capai.





Pada akhirnya, secara metodis usaha memahami, menganalisis, dan mengevaluasi struktur organisasi gereja dalam rangka pelaksanaan misi dewasa ini dengan "studi kasus" pada struktur organisasi GPM, tidak dapat dilakukan tanpa sistematisasi pendekatan yang memadai dan mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lainnya, seperti yang terungkap pada keenam bab terdahulu. Bertitik tolak dari keenam sistematisasi pendekatan itu, dapatlah dilakukan pendekatan yang ke-7, yakni "penutup", yang meliputi beberapa kesimpulan, dapat dilakukan saran-saran yang barangkali dapat dipertimbangkan.

Kesimpulan

1. Secara hakiki, Gereja Protestan Maluku (GPM) bukanlah organisasi atau institusi. Gereja Protestan Maluku adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang dibentuk dan ditantang oleh kenyataan tindakan Allah di dalam dunia, karena itu ia Kudus dan Oikumenis. GPM adalah *Community of the holy*. Namun, secara sosiologis GPM mempunyai sisi institusional. Sebagai suatu persekutuan atau komunitas manusia maka menyatakan suatu bentuk kehadiran yang nyata pada satu lokal/tempat tertentu, dalam

konteks kultural tertentu, dan dalam konteksnya secara temporal. Dengan demikian, ia membutuhkan organisasi. Sebagai yang demikian, organisasi sebagai peralatan sosiologis dapat dianalisis dan dievaluasi secara sosiologis hanya sebagai "sarana" yang dinamis dan kreatif. Organisasi bukan gereja (GPM), dan organisasi itu tidak pernah menjadi gereja (GPM). Bahwa kebutuhan bagi aspek iman Kristen (individu dan kolektif) yang berada pada konteks yang aktual dan untuk memanifestasikan iman itu keluar sehingga dibutuhkan suatu pusat organisasi yang independen, yang dapat memberikan vitalitas, kesegaran, serta ekspresiekspresi, yang dapat memberikan dan keterikatan-keterikatan bersama. Dengan demikian, memahami dan mengatakan GPM sebagai suatu organisasi, mengasumsikan agama yang diatur atau komunitas gereja yang diatur atau yang dilembagakan, yang berarti ada proses sistematisasi, institusional. Itu artinya, ada aturan-aturan, prosedur-prosedur secara formal yang mengatur tingkah laku individu dan/atau kolektivitas. Di samping itu, ada interaksi antara individu, interaksi dengan lingkungan yang aktual/dunia. Interaksi itu di samping menyatakan keterikatannya dengan dimensinya secara temporal dalam ruang dan waktu tertentu, sekaligus menyatakan suatu organisasi di dalam sistem kultural tertentu. Itulah kultur Maluku. Selain itu, ada peranan individu. Ini menyatakan bahwa GPM merupakan kesadaran individu dan kolektif yang diorganisasikan secara sadar serta mempunyai keharusan untuk memainkan peranan di dalamnya. Hal ini juga mengasumsikan fungsi dan peranan gereja yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berarti mengasumsikan adanya pengaturan dan penataan "struktur" secara formal.

- 2. Memahami GPM sebagai suatu organisasi secara demikian maka secara fungsional sebagai suatu pranata sosial GPM mempunyai kontribusi secara sosial di dalam masyarakat, baik dari fungsinya maupun dari kegiatan-kegiatannya. Namun, kontribusinya itu tentu tidak dapat netral dari watak dan karakteristiknya yang khas sebagai suatu organisasi/ pranata keagamaan. Itu berarti baik, fungsi, kegiatan, struktur organisasi itu harus dibangun di atas suatu presuposisi spiritual atau teologis yang mendasari struktur itu secara kualitatif mau menyatakan, sejauh mana struktur gereja itu dapat membantu gereja menjadi gereja yang memiliki kualitas, yaitu: "kebenaran" serta yang dapat membawa misi gereja. Struktur itu akan selalu dan mesti berada dalam realitas menjadi struktur yang memelihara komunitas, yang membangun umat, menopang kesaksian, serta yang menyatakan pelayanan. Itu berarti, struktur itu adalah sarana yang sangat dinamis dan kreatif. Struktur itu bukanlah alat yang mati statis, tetapi struktur itu hidup, dinamis, dan kreatif. Dalamnya terkandung daya spiritual yang mampu menembusi dan mentransformasikan nilai-nilai manusiawi maupun alamiah. Bukan hanya mentransformasikan nilainilai, tetapi juga mampu mengarahkan nilai-nilai, sebagai potensi-potensi daya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Memahami struktur organisasi GPM, dapatlah dikatakan beberapa kesimpulan berikut.
 - a. Ada indikator-indikator yang menyatakan bahwa struktur organisasi yang tetap bertumpu pada perwujudan asas presbiterial sinodal dengan garis-garis kerja (garis komando, garis staf, garis hubungan fungsional, dan garis koordinasi), yang jelas dan tegas. Dengan demikian, ada proses institusionalisasi dan

sistematisasi secara formal. Kenyataan ini tidak dapat dihindari.

- b. Ada indikator-indikator yang menyatakan sejauh mana ketereratan struktur organisasi pada konteks permasalahan yang dihadapi GPM, baik itu konteks geografis atau pun konteks sosio-budaya, juga keterarahan struktur itu pada misi atau program yang harus dilaksanakan.
- c. Serentak dengan keterarahan-keterarahan struktur itu maka serentak pula ada indikator-indikator yang menyatakan komitmen struktur organisasi tetap memiliki dan menyandang nilai-nilai spiritual atau teologis. Ada presuposisi spiritual atau teologis yang menyatakan tentang kualitas dan independensi struktur itu, yang senantiasa berada dalam realitas menjadikan gereja itu memiliki kualitas, yaitu "kebenaran". Struktur yang selalu berada dalam realitas menjadi struktur yang memelihara komunitas, menopang kesaksian, serta menyatakan pelayanan.

Dengan memahami struktur organisasi GPM secara demikian, dapatlah dikatakan bahwa, secara ideal struktur organisasi GPM telah diperuntukan kepada pelayanan. Itu berarti, secara ideal struktur itu telah diarahkan, baik pada konteks permasalahan, program pelayanan, tetapi sekaligus terkandung di dalamnya nilai-nilai spiritual/teologis, yang mengasumsikan kualitas independensi dan wataknya yang spiritual atau teologis. Persoalannya, apakah memang yang ideal itu dapat fungsional. Atau dengan perkataan lain, apakah yang ideal itu secara praktis dapat melakukan atau mengabdi kepada pelayanan, itulah yang belum diketahui. Paling tidak membutuhkan suatu penelitian yang mendalam tentang struktur organisasi GPM itu. Bertolak

dari beberapa kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran-saran mana lebih banyak bersifat evaluatif.

Sebagai suatu organisasi, Gereja Prrotestan Maluku berada a. di dalam perkembangan dan kecenderungan masyarakat modern. Secara realistis GPM tidak dapat mengacuhkan realitas kecenderungan kemodern itu. Dalam kaitan itu, bahaya yang dapat saja terjadi ialah organisasi itu menjadi sangat institusional. Gereja menjadi suatu kekuatan yang mapan secara institusi sebab memang institusionalisasi itulah kecenderungan masyarakat modern dewasa ini. Apabila kecenderungan ini terjadi, di mana tercipta proses institusionalisasi dan formalisasi yang sangat mapan dan ketat maka tujuan gereja secara hakiki, justru cenderung menjadi tujuan institusi atau organisasi itu. Bahayanya bila tujuan institusi itu sudah sangat steril maka individu kolektif itu akan berada di bawah ketaatan institusi itu. Sebab justru orang akan berusaha mempertahankan kemapanan itu. Karenanya, keanggotaan di dalam gereja lebih terutama diperhatikan sebagai orang-orang yang terikat kepada tindakan-tindakan institusi, serta mengabaikan dimensidimensi spiritual, psikologis serta kehidupan dan ibadah bersama. Dengan perkataan lain, proses institusionalisasi dan formalisasi yang sangat mapan dengan sendirinya akan mematikan bahkan meniadakan presuposisi spiritual atau teologis, vang berarti meniadakan kualitas gereja itu.

Bukan hanya itu, bahaya lain yang dapat saja muncul ialah, apa yang dikenal sebagai "ketidakpuasan struktural atau institusional", di mana akan tercipta kelompok-kelompok di dalam institusi itu, yang bereaksi secara keras atas kemapanan institusi itu serta menentang semua relasi yang impersonal. Dalam kasus struktur organisasi GPM,

penulis melihat kecenderungan proses institusionalisasi dan formalisasi yang ketat sehingga terasa aspek-aspek spiritual, psikologis, kehidupan, dan ibadah bersama itu cenderung terabaikan. Penulis melihat keanggotaan di dalam gereja lebih banyak diperhitungkan dan diperhatikan sebagai orang-orang yang terikat kepada bentuk-bentuk institusi. Misalnya, unit pelayanan, terasa kesadaran orang yang beribadah di unit, bukan karena kesadaran spiritual dan kehidupan Bersama, tetapi lebih banyak karena terikat oleh bentuk-bentuk institusi. Bahayanya, dapat saja memperlemah tanggung jawab anggota jemaat dalam kehidupan bergereja.

Dalam hubungan itu, penulis melihat di samping pentingnya pemahaman-pemahaman mendasar tentang apakah hakikat gereja itu sebagai suatu organisasi, serta apakah fungsi dan kedudukan organisasi atau struktur organisasi itu maka perlu sekali untuk merumuskan secara tegas dan jelas tentang presuposisi spiritual atau teologis yang mengasumsikan kualitas struktur atau organisasi itu. Dalam kasus GPM, penulis melihat presuposisi itu belum terlalu jelas dan tegas dirumuskan sehingga yang terjadi ialah penafsiran yang berbeda-beda mengenai kualitas atau presuposisi itu.

Penulis takut, kalau-kalau tujuan institusi itu menjadi tujuan gereja. Sebab kalau ini terjadi maka akan timbul gereja berada di dalam suatu keadaan haus kuasa, intervensi, dan terperangkap di dalam orientasi eksekutivisme dan aktivisme yang menonjol. Oleh karena itu, perlu tindakantindakan preventif dari kecenderungan-kecenderungan institusionalisasi yang kuat dan mapan, sebab dapat saja meniadakan atau bahkan mematikan kualitas gereja.

b. Faktor manusia

Sekali berbicara tentang faktor manusia maka tidak dapat dilepaskan dari pembentukan sikap dan kualitas manusia itu dari dalam struktur kemasyarakatan di mana manusia itu berada. Demikian pula manusia GPM, yang secara kultural dan antropolog telah dibentuk nilai-nilai kultur di Maluku itu. Tentu nilai-nilai maanusia itu dapat saja menjadi potensi-potensi daya yang bermanfaat dan dapat dikembangkan dan ditransformasikan, tetapi juga nilainilai dapat secara keras menjadi ancaman dan hambatanhambatan di dalam pelayanan struktur dan kehidupan bergeraj itu. Dapat saja terjadi nilai-nilai manusia yang sudah mapan dalam dirinya itu menjadi penghambat utama dalam rangka menghidupkan dan mendinamiskan presuposisi spiritual atau teologis dari struktur itu. Karenanya, kualitas gereja itu menjadi terancam dan tidak dapat diberlakukan secara fungsional sebab memang nilai-nilai anutanya itu tentu akan memengaruhi baik moral maupun kepribadian manusia itu, yang pada akhirnya akan ditampakkan dalam sikap manusia itu.

Dalam kasus struktur organisasi GPM, saya melihat persoalan serius ialah, sejauh mana daya dan nilai-nilai struktur organisasi (yang notabene diimport) itu mampu menembusi dan mentransformasikan nilai-nilai manusia di dalam struktur masyarakat yang tentu berbeda. Sejauh mana daya adaptasi nilai struktur presbiterial sinodal itu bagi nilai-nilai manusia Maluku.

Dengaan perkataan lain, sejauh mana nilai-nilai struktur presbiterial sinodal itu, dapat memengaruhi baik moral, maupun kepribadian manusia itu. Dalam hubungan ini, menurut hemat penulis yang harus dicari ialah apakah dan bagaimana kualitas sikap manusia itu yang telah dilahirkan, ditumbuhkan, dan dikembangkan dalam bentuk struktur masyarakat Maluku itu. Inilah yang masih sulit ditemui. Kalau pun ada dampak nilai-nilai universal manusia (dalam kontek Indonesia), tetapi juga dampak nilai-nilai modern.

Setelah itu, perlu dipertanyakan dan dirumuskan ulang secara mendasar dan memadai apakah dan bagaimana presuposisi spiritual atau teologis yang harus menyatakan tentang kualitas gereja itu. Hemat penulis, nilai-nilai yang menjadi presuposisi itu harus harus mampu menstimulasi dan mentransformasikan nilai-nilai manusia itu. Serentak dengan itu, nilai-nilai yang menjadi presuposisi itu akan menciptakan dan menghasilkan serta mengarahkan perkembangan suatu "kualitas" sikap menopang dan mempertahankan serta melestarikan kualitas gereja itu. Sebab bisa saja nilai-nilai itu tidak kuat atau sama sekali kurang kuat dalam menstimulasi dan mentransformasikan nilai-nilai manusia. Misalnya, nilai-nilai emosi kelompok yang telah membentuk suatu kualitas manusia. Sejauh mana nilai-nilai spiritual/teologis itu menstimulasi dan mentransformasikan nilai-nilai itu dan menjadikan itu memiliki suatu kualitas manusia baru.

Alternatif lain yang dapat diusulkan ialah barangkali sudah saatnya GPM memikirkan tentang manisfestasi nilai dan pola-pola budaya di dalam kehidupan dan pelayanan gereja. Dengan perkataan lain, sejauh mana GPM sebagai gereja terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan hidup secara kultural, tentu keterbukaan yang kritis dan kreatif. Sebab dapat saja terjadi keterbukaan itu untuk kembali kepada kemurnian alkitab, namun bisa saja terjadi kembali dan terbuka pada kemurnian alkitab itu merupakan sesuatu



yang sedang dikoyakan oleh perubahan ini. Oleh karena itu, barangkali penting untuk tetap terbuka kepada alkitab, tetapi apa artinya keterbukaan itu dalam konteks yang berubah ini. Dengan kata lain, bagaimana keterbukaan terhadap alkitab di tengah konteks kultural yang nyata itu?





Pdt. Dr. Frans E. Serang¹

Membaca alur pikir Dr. Johny. Chr. Ruhulessin (JR) tentang struktur organisasi pelayanan gereja dalam kerangka misiologi menjadi relevan dan terus *adaptable* dalam siklus waktu perziarahan Gereja Protestan Maluku. Penulis membangun konfigurasi arsitektur institusi yang dipertautkan dengan diskursus kontekstualisasi desain organisasi *ala*-GPM menyongsong usia 100 tahun kehadirannya di lokus khusus Maluku dan Maluku Utara, serta Indonesia pada perspektif Oikumene. Narasi itu dikembangkan dalam tulisan pendamping ini.

Postur GPM 10 atau 20 tahun yang mendatang akan terus dibayangi suasana ketidakpastian (*uncertainty avoidance*) bila diskursus untuk memutuskan titik pijak yang berbasis pada marwah organisasi, yaitu eklesiologi GPM yang dibangun di atas fondasi *presbiteryum* tidak konsisten diaplikasikan dalam praksis institusional GPM. Secara kolektif, kelembagaan GPM

¹ Alumni S3 Manajemen Strategis dan SDM Fakultas Ekonomi Bisnis UKSW, Salatiga.

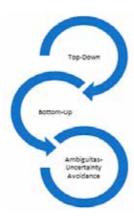
telah sepakat untuk memilih konsep Presbiterial Sinodal sebagai sistem yang membimbing (*guidance*) organisasinya, namun pada titik yang sama secara institusional pula GPM didera ambiguitas atau dilema untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dari Presbiterial Sinodal secara konsisten di dalam praktik-praktik kelembagaannya.

Menjemaatkan Sistem Presbiterial Sinodal

Dinamika organisasi GPM menunjukkan ambiguitas dan *uncertainty avoidance* telah lama melingkupi fase pengorganisasian GPM. Organisasi GPM mewarisi sistem manajemen organisasi yang dipengaruhi oleh Gereja Belanda (*Indische Kerk*) dengan model desain organisasi yang sentralistik (*top-down approach*).

Legasi itu justru mematikan inisiatif organisasi GPM untuk mendesain fitur kelembagaan yang berakar pada kekayaan dan keragaman budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam konteks GPM. Pendekatan sentralistik didesain dengan ciri mekanistik yang cenderung mematikan produktivitas elemenelemen organisasi karena didesain dengan alat kontrol yang terikat dengan aturan dan prosedur, struktur yang birokratis, tuntutan kepada kepatuhan sangat tinggi, sifat pekerjaan yang rutinitas, dan dalam lingkungan yang stabil. Desain tipikal ini tidak cocok (compatible) lagi dengan perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Perangkat aturan yang menopang orientasi ber-GPM mestinya didesain dengan mempertimbangkan konteks kewilayahan GPM. Karenanya, sistem birokrasi gereja harus sungguh-sungguh memperhatikan konteks lingkungan organisasi. Kondisi jemaat dengan tipikal laut dan pulau-pulau semestinya menjadi pertimbangan khusus bagi regulator organisasi gereja untuk tidak kaku memberlakukan aturan.





Gambar 1. Fenomena Uncertainty Avoidance Pemilihan Desain Organisasi (evolvement organisasi GPM)

Dewasa ini, *trend* sedang berlangsung untuk mengubah desain organisasi (Hage, 1999). Perubahan adalah proses yang kompleks, hasilnya dapat berakibat positif atau negatif bagi organisasi. Untuk itu, menurut (Barnard Stoll, 2010) perubahan harus didasari pada telaah empiris yang kuat agar prosesnya bisa efektif dan efisien, karena (Burnes, 2004; Beer, 1997) perubahan menjadi fitur yang selalu hadir dalam organisasi. Namun, sementara tiap organisasi menyadari perlunya perubahan, ternyata ditemukan sebanyak 70% dari program perubahan tidak mencapai hasil yang diinginkan (Kotter, 1990; Hammer dan Champny, 1993; Higgs dan Rowland, 2000). Di sinilah letak sebuah paradoks. Gaya intervensi perubahan *top down* masih mendominasi di dunia organisasi, meskipun ada banyak bukti bahwa itu sering tidak berhasil. Karena itu, organisasi perlu mencari metode perubahan alternatif yang menentang sifat hierarkis dari paradigma *top-down*.

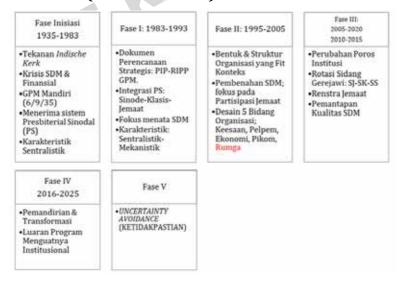
Paradoks itu mewarnai cara GPM mengorganisasikan dirinya, tampak dalam sekuensil (rangkaian logika) implementasi kebijakan organisasi GPM yang selama ini digunakan untuk mengorganisir praksis GPM menimbulkan *uncertainty avoidance*.



Ketidakpastian itu akibat dari tidak konsistennya organisasi di dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi sesuai prinsip dasar sistem Presbiterial Sinodal. Tampak paradoksal antara Sistem Organisasi dan Implementasi Kebijakan Organisasional GPM. Paradoks itu terlihat pada Tata Gereja-GPM (TG-GPM) pada mukadimah khusus butir 12 yang menyebutkan sebagai berikut.

Bahwa demi terwujudnya kehidupan gereja yang tertib dan teratur, maka Gereja Protestan Maluku berketetapan hati dalam memelihara, membina, dan mengembangkan struktur dan fungsi kepemimpinan gereja yang menganut sistem Presbiterial Sinodal secara dinamis, kritis, dan kreatif yang menekankan pada jemaat sebagai basis pelayanan dalam rangka menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di bumi. Karena itu, Jemaat, Klasis, dan Sinode selalu berada dalam gerak berjalan bersama yang selaras, serasi, utuh, terpadu, dan dinamis.

EVOLVEMENT (PERKEMBANGAN) ORGANISASI GPM



JR telah memperingatkan dalam tulisannya bahwa dinamika pertumbuhan organisasi GPM yang menyimpang dari konstitusi GPM justru akan manampilkan tekanan kompetitif yang terakumulasi dalam setiap evolusi GPM, justru saat ini menimbulkan ketidakpastian bahkan keraguan pada relevansi paradigma perubahan yang didasarkan pada kontrol, hierarki, dan supremasi manajemen puncak. Demikian juga Butcher dan Sally (2000) mengingatkan para ahli manajemen bahwa kekuatan kompetitif organisasi sekarang didasarkan pada keberagamannya dan kemampuan responsifnya untuk mengembangkan kontribusi individu bukan pada kohesi. Karena itu, cara untuk menjaga ritme dinamika orgamisasi, yaitu pada desain sistem yang menjamin konsistensi implementasi sistem Presbiterial Sinodal.

Membaca dekade ketiga perkembangan organisasi GPM, menunjukkan desain regulasi yang bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi jemaat, yaitu melalui desentralisasi prakarsa. Implementasi desentralisasi prakarsa sudah mulai dilakukan beberapa tahun terakhir dengan pemberlakukan Rencana Strategis (Renstra) dengan mengubah siklus pengorganisasian yang menempatkan jemaat sebagai sentrum perubahan dan pertumbuhan. Strategi ini bagi GPM menjadi penting agar secara bertahap atau sedikit demi sedikit peran Sinodal dan Klasis dikurangi dan menonjolkan semangat Presbiterial Sinodal yang utamanya memberi atau membuka ruang seluas-luasnya bagi jemaat untuk berprakarsa.

Organisasi GPM dalam seluruh diskursus yang telah dipaparkan dalam pertumbuhannya sudah saatnya mengubah cara mengorganisir institusinya, karena pendekatan *bottom up* secara implisit telah diatur di dalam Tata Gereja-gereja Protestan Maluku (TG-GPM). Mengingat GPM kental mewarisi Tata Gereja Calvinis sebagai pranata yang mengatur tertib organisasi yang didesain berupa kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh Gereja untuk

mewujudkan kehidupan organisasi yang utuh, dinamis, dan terbuka. Itu berarti, tumbuh kesadaran kolektif organisasi GPM di dalam mengonseptualkan Tata Gereja itu sebagai pembaharu kondisi gereja, atau GPM berkepentingan mengontekstualisasikan Tata Gereja itu di dalam ruang dan waktu yang sesuai dengan organisasi GPM sendiri. Tren ini menuntut aplikasi pendekatan bottom-up yang layak untuk mengubah paradigma lama. Perubahan orientasi kebijakan organisasional GPM telah dilakukan, regulasi sebagai sandaran organisasi sudah dirumuskan. Kini yang perlu diteguhkan adalah konsistensi seluruh elemen organisasi untuk menegakan serta bertanggung jawab memberlakukan prinsip Presbiterial Sinodal secara murni dan konsekuen.

Konsistensi Implementasi Regulasi (Tata Aturan) Organisasi

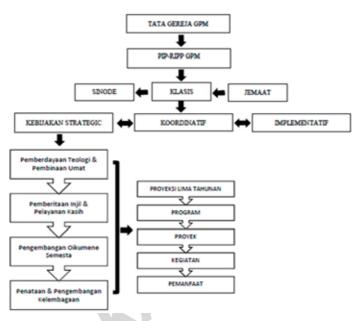
Konsistensi desain organisasi GPM diuji ketika merasionalisasi makna Presbiterial Sinodal ke dalam berbagai regulasi institusional, yaitu Peraturan Pokok tentang Sinode, Klasis, dan Jemaat. Di dalam TG-GPM Bab IX Pasal 20 tentang Perangkat Kepengurusan dan Kepemimpinan GPM, terdiri dari Perangkat Kepengurusan Jemaat, Perangkat Kepengurusan Klasis, dan Perangkat Kepengurusan Sinode. Hierarki jenjang kepengurusan dan kepemimpinan GPM yang diatur dari jemaat tidak konkordan dengan produk implementatif pada setiap level kebijakan organisasi, baik di tingkat Sinode, Klasis, dan Jemaat. Inkonsistensi kelembagaan GPM dipotret pada produk implementatif kebijakan (sekuensil) organisasi GPM yang selama delapan dekade berkiprah pada lokus topografi wilayah yang terbentang di antara jejeran 999 pulau-pulau dan 776.500 km² hamparan laut yang sangat luas, belum sepenuhnya selaras dengan konten Presbiterial Sinodal.

Sekuensil implementasi kebijakan organisasi GPM berpedoman pada TG-GPM sebagai sandaran konsepsional. Logika perencanaan organisasional yang diatur di dalam PIP-RIPP GPM menunjukkan alur implementasi kebijakan organisasi yang berlangsung di jemaat, karena di jemaatlah berlangsung seluruh praktik-praktik organisasi GPM. Implementasi kebijakan merupakan fase krusial dalam proses kebijakan organisasi. Pada tiap program strategis yang didesain di setiap level organisasi berbasis pada logika perencanaan, yaitu program implementatif pada level jemaat, program koordinatif pada level klasis, dan program strategis pada level sinode. Seluruh level organisasi mendesain perencanaan strategis dengan berpedoman pada empat induk program pelayanan. Untuk menghindari inkonsistensi di dalam implementasi kebijakan maka pendekatan berbasis isu dilakukan dalam mendaratkan program-progam perencanaan strategis kelembagaan GPM. Tiap program digarap dengan berbagai isu yang berbeda pada tiap jenjang organisasi. Itu artinya di aras Sinodal karakteristik program bersifat strategis, di level Klasis karakteristik program bersifat koordinatif, dan pada aras jemaat karakteristik program bersifat implementatif.

Namun, dalam pengorganisasian GPM, poros orientasi sebagai pendasaran mendesain perencanaan strategis belum sungguh-sungguh berbasis pada sistem Presbiterial Sinodal yang menuntun jemaat menuju kemandiriannya. Jemaat masih dibebani dengan kegiatan-kegiatan partisipatif yang mengalir dari jenjang Sinode dan Klasis.



SEKUENSIAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI GPM



Gambar 2. Sekuensil Implementasi Kebijakan Organsasi GPM

Dalam logika bottom up oriented, Klasis sebagai penghubung yang mengerjakan aktivitas koordinatif dan sebaiknya tidak mengerjakan program strategis implementatif yang juga dikerjakan oleh jemaat. Program Lima Tahunan (Prolita) yang senapas dengan Renstra yang basis perencanaannya berlangsung di jemaat juga dikerjakan oleh Klasis. Akibatnya, muncul paradoks di dalam strategi perencanaan yang dituangkan di dalam PIP-RIPP sebagai dokumen perencanaan. Akibat dari kondisi uncertainty avoidance itu nilai konsistensi implementasi kebijakan organisasional GPM justru turun. PIP-RIPP dekade IV menunjukkan implementasi kebijakan turun pada prosentasi 8,75 % dan lebih dari 52,2 % program dan kegiatan terealisir di luar Kebijakan Umum Pelayanan. Ambiguitas ini akibat dari implementasi kebijakan

yang dilakukan belum mencerminkan model pengelolaan organisasi berbasis sistem Presbiterial Sinodal. Karenanya, GPM mesti mendesain ulang regulasi strategi perencanaan di dalam mengorganisir lalu lintas perencanaan dan implementasi kebijakan organisasional pada setiap level implementasi kebijakan organisasi. Cara solutifnya melalui pembagian kewenangan (separation of power) dan menempatkan posisi klasis dalam porsi yang tepat untuk menjembatani ketidakpastian di level menengah (stuc in the middle.

Perangkat regulasi organisasi GPM telah mengatur mekanisme regulatif untuk menjamin terlaksananya suatu kebijakan, baik pada aras Sinode, Klasis, serta pada jenjang jemaat. Tata Gereja, Peraturan Pokok Penggembalaan, Peraturan Pokok tentang Sinode. Pasal 18 Peraturan Pokok tentang Sinode telah gamblang mengatur tugas dan wewenang Majelis Pekerja Harian Sinode (MPHS), vaitu menvelenggarakan administrasi pada tingkat Sinodal dan menetapkan mekanisme penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan GPM. Pasal 23 Tata Gereja menjelaskan GPM berkewajiban membina dan mengembangkan sikap, tata nilai, pola hidup, pola pikir, dan secara gembalamenggembalakan baik antaranggota Gereja, antarpenyelenggara pelayanan Gereja, termasuk dalamnya pembinaaan para pelayan khusus. Pasal 18 juga mengatur kewenangan MPHS untuk memimpin penggembalaan seluruh potensi organisasi GPM. Konteks regulatif itu menegaskan tanggung jawab administrasi regulatif di bawah kewenangan MPHS. Untuk itu, MPHS memiliki tanggung jawab administratif untuk menjaga tertib organisasi, termasuk menjaga konsistensi kelembagaan GPM.



Tempat Presbiter (Penatua) dalam Eklesiologi GPM

Konsistensi implementatif regulatif vang menimbulkan ketidakpastian dalam perkembangan organisasi GPM selama ini, yaitu bertalian dengan akomodasi memadai Presbiter di praktik-praktik institusional GPM. Abineno (2011) mengungkapkan Gereja yang bermazhab atau menganut tradisi Calvinis (termasuk GPM) jabatan Penatua (Presbiter) menempati tempat yang penting dalam gereja. Presbiter bukan satu-satunya jabatan di dalam Gereja, tetapi Presbiter bekerja bersama (kolektif kolegial) dengan pejabat-pejabat, yaitu Pendeta dan Diaken. Tradisi Calvinis menekankan kesetaraan dalam jabatan Gerejawi. Semua Jabatan Gerejawi setara hanya berbeda di dalam fungsi dan tanggung jawab. Tugas utamanya adalah memelihara dan memimpin jemaat. Secara esensial mereka bekerja di dalam wadah Presbiterium atau Majelis Jemaat. GPM menjalankan fungsifungsi organisasi (Pelayanan) dengan sistem Presbiterial Sinodal. Presbiterial Sinodal bagi organsasi GPM ditempatkan sebagai eklesiologinya. Eklesiologi merupakan cara gereja memahami dirinya dan bagaimana praksisnya dalam konteks di mana Gereja itu berprakarsa.

Eklesiologi GPM menekankan peran Presbiter di dalam sistem penyelenggaraan pelayanan (organisasi). Dalam Pengakuan GPM dan Pemahaman Iman, GPM melaksanakan tugas pelayanannya di dalam setiap bidang pelayanan sebagaimana tercantum dalam PIP-RIPP GPM sebagai dokumen Perencanaan Organisasi.

Bidang pelayanan itu meliputi bidang Koinonia (Bersekutu), Marturia (Bersaksi), Diakonia (Melayani), dan Oikonomia (Penatalayanan). Sistem Presbiterial sebagai anutan ber-GPM di dalam sistem penyelenggaraan organisasinya menekankan hal berikut.

Keterpanggilan Presbiter untuk melayani dan memimpin gereja serta memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan Tubuh Kristus; Pengelolaan dan penatalayanan kehidupan Gereja atas dasar persekutuan dan kasih; Hubungan yang selaras, serasi, utuh, terpadu dan dinamis penyelenggaraan pelayanan gereja, jenjang-jenjang kepemimpinan gereja, serta umat gereja secara menyeluruh.

Ruhulessin (2015) menegaskan bahwa eklesiologi harus menjadi acuan teologi-sosial terhadap jati diri (integritas) gereja, dan arah operasional kepada gereja dalam mengembangkan berbagai sistem bergereja (sistem berjemaat, kepemimpinan, institusionalisasi/organisasi, pelayanan, pemberdayaan). Karena itu, Presbiterial Sinodal memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk memberi isi dan arah pengorganisasian GPM.

Presbiter menempati posisi strategis sebagai langkah maju sesuai arahan PIP-RIPP GPM untuk memberdayakan satu dari tiga pilar (Penguatan Kapasitas Institusi, Pelayan, Umat) penopang organisasi GPM yaitu pilar pelayan sebagai sentrum pengorganisasian GPM. GPM secara organisasi telah mengimplementasikan regulasi organisasi untuk secara bertahap mengurangi dominasi para pendeta (domine sentris) pada sentrasentra pelayanan (organisasi), serta menumbuhkan partisipasi Presbiter melalui pelibatan langsung di dalam pengambilan kebijakan organisasi. Konsepsi Desentralisasi Prakarsa merupakan bukti keseriusan organisasi untuk meletakan Jabatan Presbiter pada tempat yang sesuai dalam konteks Presbiterial Sinodal.

Namun, tempat tertinggi (*suprime*) Presbiter di dalam struktur kepemimpinan organisasi GPM belum terakomodir. Dalam praktiknya, Presbiter baik pada level Sinode, Klasis, dan Jemaat menjadi bagian di dalam presbiterium, namun bukan dalam posisi *suprime*. Diskursus ini memang telah menjadi diskursus kolektif kelembagaan seiring semakin memadainya kapasitas

Sumber Daya Manusia di jemaat-jemaat GPM. Secara institusional, GPM mengalami ambiguitas atau *uncertaity avoidance*. Sistem Presbiterial Sinodal yang dipraktikkan GPM selama ini semacam modifikasi kondisional. Ingat waktu itu (medio 1935) GPM sulit memenuhi tuntutan kemandirian sebuah institusi yang harus ditopang dengan sumber daya organisasi ,baik ketersediaan aktor penggerak dan dukungan finansial.

Suasana kebatinan kolektif kelembagaan GPM saat itu dapat dirasionalisasi bahwa pilihan sistem ini hanya bersifat sementara (ad hock) sambil secara bertahap menginisiasi desain kelembagaan yang lahir dari "kandungan" GPM sendiri yang mencirikan konteks ber-GPM laut dan pulau-pulau. Tentu saja desain kelembagaan secara bertahap pula harus memformulasikan visi pengembangan SDM yang sinkron dengan intisari Presbiterial Sinodal. Presbiterial Sinodal adalah cara bergereja yang dipimpin oleh sebuah lembaga vang disebut Presbiterium (Majelis Jemaat). Dalam Tata Gereja GPM, Majelis Jemaat terdiri dari Pendeta/Penginjil, Penatua, dan Diaken. Tiga aktor ini bekerja secara kolektif kolegial. Equal atau setara di dalam kedudukan institusional. Dalam logika kelembagaan, pengaturan kewenangan (separation of power) telah diatur GPM untuk menjaga tertib organisasi dengan meng-SKkan Pendeta sebagai kepala dari *Presbyterium* itu. Dengan asumsi mendasar terkait kapasitas Sumber Daya Manusia yang belum merata di seluruh jemaat-jemaat.

Akan tetapi, membaca tren pertumbuhan organisasi GPM masa kini, ternyata GPM telah memiliki anggota jemaat dengan kualifikasi pendidikan lintas keilmuan yang bahkan terkuantifikasi secara memadai. Menjembatani diskursus ini, proyeksi kelembagaan GPM sudah harus diletakkan pada perspektif merasionalisasi posisi Presbiter di dalam sistem Presbiterial Sinodal yang menjadi anutan GPM, mengingat Tata Gereja, juga PIP-RIPP



GPM telah menggiring konstitusionalitas jemaat sebagai sentrum dan titik orientasi pengembangan organisasi GPM. Visi utama GPM adalah kemandirian jemaat karena dijemaat praktik-praktik bergereja dilangsungkan.

Internalisasi Core Activity

Visi GPM dalam bingkai Presbiterial Sinodal berkaitan erat pada dimensi aktivitas inti (core activity) organisasi GPM. Aktivitas inti (core activity) d ijemaat-jemaat GPM terkoneksi dengan dinamika pertumbuhan Gereja Denominasi Protestan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen Provinsi Maluku sampai tahun 2017 tercatat 41 gereja denominasi Protestan yang berkiprah sejak tahun 1958 di Provinsi Maluku. Sebanyak 41 gereja denominsi itu bertumbuh secara progresif dan tidak lagi mengenal batas-batas aktivitasnya. Kiprah 41 gereja Denominasi Protestan di Maluku merupakan bagian dari 37.74% total pemeluk agama Protestan, merujuk data BPS Provinsi Maluku tahun 2017. Dengan asumsi menurut *database* organisasi GPM jumlah anggota GPM yang terdaftar sampai tahun 2017, yakni 572.405 jiwa maka terdapat 75.042 jiwa yang mengikuti aktivitas gereja denominasi Protestan. Pertumbuhan gereja-gereja denominasi Protestan di Maluku, lokusnya juga merupakan area utama dari aktivitas jemaat-jemaat GPM tidak dapat dihindarkan.

Terhadap dinamisasi yang sulit dibendung ini, strategi pengembangan utamanya melalui perbaikan mutu pelayanan berkaitan erat dengan manajemen pelayanan. Optimalisasi pelayanan pada basis jemaat menjadi domain Majelis untuk mengelola dan mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanannya. Mengingat peran organisasi dalam lingkup gereja dipakai sebagai alat untuk menggerakan atau menginternalisasi fungsi-fungsi teologi dalam konteks GPM. Karenanya, pilihan pada bentuk-bentuk desain yang cocok (compatible) diperlukan untuk mengatasi masalah

kelembagaan GPM. Dengan demikian, gerak orientasi yang telah bertumpu pada jemaat semestinya konsisten diaplikasikan. Ruang pemberdayaan jemaat mesti dibuka seluas-luasnya, yaitu dengan mengurangi atau meniadakan beban program partisipatif yang mengalir dari Sinode dan Klasis serta meningkatkan program partisipatif atau implementatif yang bertalian langsung dengan upaya menumbuhkan partisipasi dan inovasi jemaat.

Pemisahan dan Pembagian Kewenangan (Tugas dan Tanggung Jawab)

Pada perspektif yang demikian, konsistensi diperlukan untuk meramu bentuk-bentuk kebijakan yang cocok (fit) ketika luaran kebijakan yang terimplementasi selaras (in line) dengan dimensi karakteristik GPM dengan ciri khas Gereja Laut Pulau. Akumulasi dari berbagai determinasi itu menjadi sentrum kebijakan organisasional untuk menghentar organisasi GPM menuju titik tertinggi (elivasi) agar cara pandangnya jernih dan objektif untuk dapat melihat dan memutuskan Pilihan Rasional Organisasi, yaitu Presbiterial Sinodal yang berdimensi fleksibilitas Bottom Up oriented, yakni menjamin konsistensi implementasi kebijakan organisasi GPM yang dikembalikan pada pendekatan yang bertumpu pada jemaat sebagai poros pengorganisasian yang dipolakan secara fleksibel. Itu artinya, dimensi demografi yang mendeterminasi kerja institusional GPM masih membutuhkan pendekatan top down berupa organ penghubung (Peran Klasis) dan kualifikasi dan kuantifikasi Sumber Daya penggerak organisasi.

JR sudah mengingatkan organ penghubung yang diragakan oleh sekuensial implementasi kebijakan organisasi dirasionalisasi kembali sesuai isi seruan Presbiterial Sinodal. Tumpuannya pada Tata Gereja (TG-GPM), Peraturan Pokok Tentang Sinode, Klasis,



dan Jemaat (PP Sinode, PP Klasis, PP Jemaat), serta PIP-RIPP GPM sebagai Dokumen Perencanaan Organisasi.

Tata Gereja-Gereja Protestan Maluku (TG-GPM) secara konsepsional berfungsi untuk mengatur pengorganisasian Gereja (organisasi). Mukadimah Tata Gereja secara eksplisit Bab I Pasal 2 dijelaskan bahwa GPM mewujudkan dirinya sebagai a) Jemaat; b) Klasis; c) Sinode. Selanjutnya, Bab IX tentang Perangkat Kepengurusan dan Kepemimpinan Gereja Pasal 20 mengatur hierarki Perangkat Kepengurusan GPM, terdiri dari: a) Perangkat Kepengurusan Jemaat; Perangkat Kepengurusan Klasis; c) Perangkat Kepengurusan Sinode. Ayat 2 menjelaskan perangkat kepengurusan Jemaat, Klasis, dan Sinode beserta tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Pokok GPM.

Dinamika Jemaat, Klasis, dan Sinode

Hierarki regulasi organisasi GPM menjadi sandaran di dalam mengimplementasikan kebijakan. Secara tegas dalam hierarki regulasi GPM, jemaat di tempatkan pada puncak pengorganisasian ber-GPM. Dengan demikian, perubahan orientasi pengorganisasian GPM yang telah bergeser dari fokus menata institusi GPM kepada cara GPM mengelola dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Penggerak Organisasi dan secara konstitusional dijamin pemberlakuannya, baik pada TG- GPM, PP Jemaat, PP Klasis, dan PP Sinode. Secara konsepsional sudah jelas dan tegas memandu arah pergerakan organisasi. Organ-organ pengerak organisasi GPM dituntut untuk konsistensi untuk mengimplementasikan seluruh aturan organisasi itu di dalam kerja-kerja kelembagaan GPM. Muaranya jelas, konsistensi itu akan mendorong perubahan kearah penguatan praktik-praktik Presbiterial Sinodal yang secara konsisten bergerak dari tataran Jemaat, Klasis, dan Sinode. Konsistensi desain organisasi itu berimplikasi langsung pada cara GPM mengimplementasikan seluruh seluruh strategi, Visi, dan Misi GPM sesuai isi yang diamanatkan oleh PIP-RIPP sebagai dokumen strategis perencanaan Organisasi GPM.

Seluruh paraksis institusional GPM baik dilevel Sinode, Klasis, dan Jemaat luarannya berpola pada pengorganisasian Program, Proyek, Kegiatan yang terintegrasi pada PIP-RIPP GPM. Dalam Dokumen Perencanaan Organsiasi (PIP-RIPP) telah di beri batasan yang jelas. Pada level Sinodal mengerjakan Program-program Strategis (Sentralisasi Visi), Pada Level Klasis mendesain program-program koordinatif, Program Lima Tahunan (Prolita), Pada level Jemaat, mendesain program-program implementatif; Rencana Strategis (Rentra). Klasis dan Jemaat mengagregasi Sentralisasi Visi Sinodal dalam dimensi Sentralisasi Prakarsa. Tujuan akhir dari seluruh aktivitas pengorganisasian GPM, yaitu bermuara pada Pemberdayaan Jemaat untuk mencapai Kemandiriannya. Itulah sentrum dari isi Presbiterial Sinodal.

Dalam praksis ber-GPM sesuai Dokumen Perencanaan GPM, evalusi implementasi kebijakan organisasional ditemukan terjadi inkonsisensi kelembagaan yang signifikan. PIP-RIPP GPM (2010-2015) menunjukkan inkonsistensi itu sebagai berikut.

Hasil evaluasi terhadap implementasi PIP/RIPP 2010-2015 menunjukkan bahwa tingkat konsistensi sangat rendah (8,75%) sementara tingkat inkonsistensi sangat tinggi (50,2%). Temuan ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam proses perencanaan sebelumnya, di mana penyusunan program/kegiatan tidak sepenuhnya mengacu pada PIP/RIPP, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi program PIP/RIPP karena tidak ada lembaga/departemen/biro/ruling yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian program. Berdasarkan temuan itu maka ruang lingkup pengendalian program perlu ada untuk meminimalisir tingkat inkonsistensi serta

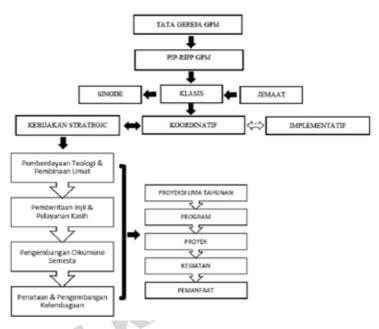


mengawal implementasi program-program yang telah dirumuskan dalam PIP/RIPP, sebagai bagian dari dijalankan fungsi monitoring.

Perkembangan (evolvement) organisasi GPM konsisten menunjukkan inkosistensi dari implementasi kebijakan organisasional GPM, di dalam PIP-RIPP Dasawarsa Pertama Tahun 1983-1993, Dasawarsa Kedua Tahun 1995-2005 dan Dasawarsa Ketiga Pemberlakukan PIP-RIPP Tahun 2015 memaparkan problematika dari implementasi kebijakan organisasi GPM yang menciptakan *uncertainty avoidance*. Tidak ada kepastian di dalam mengeksekusi secara tepat kebijakan-kebijakan organisasional. Perencanaan sampai implementasi kebijakan disemua level organisasional belum terintegrasi kepada PIP-RIPP sebagai Dokumen Perencanaan Organisasi. Terjadi tumpang tindih perencanaan sampai implementasi Program. Bahkan praktik-praktik kebijakan yang diliputi ambigu dan uncertainty avoidance itu telah berlangung selama delapan dekade (Tahun 1983-sekarang). Cara terbaik untuk mengubah uncertainty menjadi certainty, yaitu dengan munumbuhkan budaya konsistensi kolektif kelembagaan.



SEKUENSIAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI GPM



Penguatan Kapasitas Organisasi (Capacity Building)

Separation of Power (Pembagian Kewenangan)

Dimensi pengorganisasian implementasi kebijakan adalah melalui pembagian kewenangan yang jelas antara Sinode, Klasis, dan Jemaat. Dalam dimensi strategi perencanaan yang telah disebutkan diatas membatasi Sinode untuk mendesain Program-program yang berdimensi Strategi. Pada level Klasis, program yang didesain berkarakteristik koordinatif. Serta pada level jemaat sebagai basis ber-GPM perumusan desain program bertipikal, implementatif. Karena itu, di level jemaatlah rencana strategi di rumuskan. Klasis berada pada level *middle line* dalam struktur organisasi GPM yang harus dibatasi untuk hanya mendesain program-program koordinatif. Tujuannya untuk mencegah *overlapping* di dalam implementasi kebijakan organisasi serta

merefungsionalisasi perannya. Muara dari strategi itu adalah perannya sebagai pendamping jemaat. Data menunjukkan potret jemaat GPM yang memerlukan pendampingan. Sebanyak 140 jemaat akan mandiri serta tersisa 136 yang belum dapat dimandirikan. Untuk itu, fungsionalisasi peran Klasis sebagai penghubung antara Sinode dan Jemaat menjadi lebih terarah.

Penguatan kapasitas organsasi menjadi kata kunci dari seluruh desain besar Gereja Protestan Maluku. Dimensi penguatan kapasitas organisasi (capacity building) merupakan kebutuhan mendasar dalam rangka meningkatkan kualitas layanan organisasi dan kepemimpinan. Di samping itu, diarahkan untuk benar-benar menjadikan setiap level organisasi gereja (Sinode, Klasis, dan Jemaat) menjadi lebih dinamis dan efektif. Salah satu hal strategis yang kiranya dipikirkan kembali dalam kaitan dengan penguatan kapasitas organisasi adalah kerjasama antarlembaga dan antarpersonil (pejabat pada setiap level). Sinergitas kelembagaan turut melahirkan sinkronisasi di dalam implementasi kebijakan organisasi GPM.

Refungsionalisasi Klasis (Technical Assistance)

Refungsionalisasi Klasis didasarkan pada fakta semakin menguatnya kapasitas dan kapabilitas Jemaat-jemaat GPM, baik pada sisi penguatan kapasitas sumber daya manusia maupun dalam konteks sumber daya anggaran yang menopang atau membiayai pelaksanaan pelayanannya. Klasis dalam peran yang demikian strategis apalagi sebagai penghubung antara Sinode dan Jemaat harus dirasionalisasi kembali perannya agar lebih terarah melaksanakan tugas-tugas koordinatifnya. Perspektif itu tetap berangkat pada ruh Presbiterial Sinodal yang secara institusional telah diwadahi dalam regulasi GPM. Kewenangan Klasis yang dipraktikkan selama ini sepertinya terlampau menjurus pada

kewenangan struktural yang dalam konteks gereja laut dan pulau tidak compatible (cocok) dengan upaya gereja memandirikan Jemaat.

Fungsi koordinatif yang diperankan berpola pada visi besar GPM, yaitu untuk memandirikan Jemaat. Perannya demikian strategis melalui *technical assistance* untuk menumbuhkan pemberdayaan Jemaat. Kehadiran Klasis, yaitu mendesain programprogram yang berbasis penguatan dan pemberdayaan Sumber Daya Jemaat. Tren pengembangan sumber daya gereja tidak lagi diasumsikan sebagai objek dari gereja, tetapi manusia GPM harus dikembangkan dalam mekanisme penatalayanan gereja secara komprehensif. Untuk itu, peran Klasis mesti diletakkan juga dalam men-*support* upaya pengembangan sumber daya manusia GPM.

Menatap masa depan GPM bukan semata terletak pada kuantifikasi bangunan Gerejanya, tanahnya, lautnya, tetapi lebih khusus pada bagaimana menata pengembangan sumber daya manusianya. Semua itu pernak-pernik institusional, namun manusia unggullah yang dapat berinovasi menyelaraskan seluruh potensi itu menjadi kekuatan GPM di masa yang terus bergulir.

Agenda krusial kelembagaan menurut JR, meliputi cara GPM mereformulasikan konsep Presbiterial Sinodal di dalam regulasi institusionalnya, meletakkan secara tepat (*supreme*) Presbiter di dalam sistem Presbiterial Sinodal serta mengatur fungsi Klasis sebagai *technical assistance* yang lebih efektif memainkan peran koordinatif. Muara dari diskursus itu untuk memandirikan Jemaat sebagai basis pengorganisasian pelayanan GPM. Konsistensi kelembagaan setidaknya dapat meminimalisir ledakan eklesiologi GPM di masa yang sementara dijalani oleh GPM. Olehnya, kita mesti terus berusaha melakukan reposisi dan aktualisasi



kelembagaan agar menjawab panggilan menghadirkan damai sejahtera bagi umat dan semesta ciptaan Tuhan. Ingatlah selalu moto GPM: *Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan* (1 Korintus 3: 6).





- Anderson, G.H & Stransky Th.F (Ed.). 1974. *Mission Trends*, No.1,2. New York: Paulist Press.
- Bennet, John.C. 1950. Christian Ethics and Social Polity. New York.
- Bernard, Chester. 1938. *The Functions of the Executive*. Cambridge Harvard: University Press.
- Blau, M & Scott, R. 1962. *Formal Organization*. San Fransisco: Chanlder Publishing.
- Bouman, P.J. 1982. *Sosiologi Fundamental*. Diterjemahkan oleh Ratmoko SH. Jakarta: Jambatan.
- Champion, Dean, J. 1957. The Sociology of Organization. New York.
- Cooley, F.L. 1961. *Altar and Throne in Central Moluccan Societies*.

 A Dissertation Presented to the Faculty of Departemen of Religion, Yale University.
- Davidsz, Wim. 1980. *Sikap Jemaah pada Konteks Pedesaan*. Pidato Ilmiah pada Lustrum III STT GPM.
- DGI. 1976 Melihat Tanda-tanda Zaman. Jakarta: BPK.

 ____. 1971. Notulen Sidang Raya VII. Siantar.

 GPM. Peraturan-peraturan Gereja Protestan Maluku.

 ____. Pola Induk Pelayanan Tahun 1983-1993.

 ____. Himpunan Ketetapan-ketetapan Sinode, Sinode ke XXIX, Tahun
 1978.



- ____. Himpunan Ketetapan-ketetapan Sinode, Sinode ke XXX, Tahun 1983.
- ____.Kumpulan Keputusan-keputusan Sinode, Periode Tahun 1933 s/d 1974.
- Hal, Richard, Eugene & Norman Johnson. 1987. *Organization, Size, Complexity and Formalization*. New York.
- Hill, Michael. 1976. A Sociology of Religion. London: Heinemann.
- Koentjaraningrat. 1965. *Pengantar Antropologi*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kung, Hans. 1964. *Structure of the Church.* London: Trans Salvator Attanasio.
- Loomis, Charles & Beegle Allan. 1957. *Rural Sociology.* Prentice Hall.
- Mac Iver. 1957. Society an Introductory Analysis. New York.
- Martin, David. 1970. *Key Words Sociology*. New York: Lutter Worth Press.
- Martindale, D. 1966. *Institutions, Organization, and Mass Society*. New York.
- Mehl, Roger. 1970. *The Sociology of Protestantism*. James H. Farley, London: SCM Press Ltd.
- Moberg, David. 1962. *The Church as a Social Institution*. New Jersey Prentice Hall: Englewood Cliffs.
- Niebuhr, R.H. 1956. *The Purpose of the Church and its Ministry*. Harper and Row.
- Niebuhr, R.H & Fliche Augustin. 1957. *Religion Institutions, Christian, in Encyclopedia of the Social Sciences.* Vol. XIII-XIV, ed. New York: Macmillian.
- O'Dea, Thomas, F. 1966. *The Sociology of Religion*. New Jersey, Prentice Hall: Englewood Cliffs.
- Selznick, Philip. 1961. *Foundations of Theory of Organization*. Ed.by Etzioni. New York.

- Schorl. 1981. Modernisasi. Jakarta: Gramedia.
- Snyder, Howard, 1977. *Community of the King.* Inter Varsity Christian Fellowship of the USA.
- Soekanto, Soejono. 1969. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet VI. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemarjan Selo & Soleman Soemardi (Ed.). 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Edisi 1. Jakarta, Yayasan Badan Penerbit FE UI.
- Troetlsch, Ernst. 1931. *The Social Teaching of the Christian Churches*. 2 Vol., translated by Olive Wyon. London.
- Truzzi, Marcello. 1971. Sociology the Classic Statement. New York,
- Wach, Joachim. 1949. *Sociology of Religion*. Chicago: Chicago University Press.
- Yinger, Milton, J. 1946. *Religion in thr Struggle for Power*. Durham, NC, Duke University Press.



Pdt. Dr. Johny Christian Ruhulessin, lahir di Amahai, 24 Januari 1957. Dosen senior pada Fakultas Teologi UKIM Ambon. Menyelesaikan sarjana muda teologi di STT GPM, sarjana teologi di Fakultas Teologi UKSW, Salatiga. S2 dan S3 diselesaikan pada kampus yang sama. Pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Angkatan Muda GPM 2000-2005, Ketua Sinode GPM dua periode (2005-2010; 2010-2015). Saat ini menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Maluku.